

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang saat ini sedang aktif melakukan pembangunan di segala bidang, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, politik, pertahanan dan keamanan. Seiring jumlah populasi manusia yang meningkat, tuntutan kebutuhan ekonomi pun terus meningkat. Supardi (2003:149), menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kegiatan perekonomian nasional agar tingkat perkembangan ekonomi sedapat mungkin lebih besar daripada tingkat pertumbuhan penduduk, pemerintah secara kuantitatif dan kualitatif meningkatkan proyek-proyek pembangunan di segala bidang.

Sebagai negara agraris, Indonesia melakukan modernisasi dalam bidang pertanian agar dapat diperoleh produktivitas yang tinggi dari sektor ini. Disusul juga dengan peningkatan industrialisasi, baik pada bidang-bidang industri yang sudah ada dan tengah berjalan, maupun penambahan industri kecil dan industri besar dengan menggunakan teknologi modern. Diharapkan kemudian hari titik berat perekonomian tidak bergantung sepenuhnya terhadap sektor pertanian, melainkan beralih ke sektor industri.

Pengalaman hampir di semua negara menunjukkan bahwa industrialisasi sangat perlu guna menjamin pertumbuhan ekonomi jangka

panjang, Tambunan (2003:249). Oleh karena itu berbagai industri banyak didirikan di Indonesia, mulai dari industri skala kecil, skala menengah hingga skala besar. Industrialisasi menjadi kebutuhan yang sangat penting bagi pemerintah Indonesia.

Selama 20 tahun terakhir pembangunan ekonomi Indonesia mengarah kepada industrialisasi. Tidak kurang terdapat 30.000 industri yang beroperasi di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan angka peningkatan yang signifikan. Peningkatan jumlah tersebut tentu berbanding lurus dengan dampak yang ditimbulkan. Dampak negatif dari proses industrialisasi yaitu tingginya tingkat pencemaran lingkungan hidup dan munculnya ketimpangan sosial masyarakat yang berada di sekitar industri berdiri.

Secara sederhana industrialisasi didefinisikan sebagai pembangunan ekonomi melalui transformasi sumber daya dan kuantitas energi yang digunakan. Dalam kajian sosiologi, industri adalah bagian dari suatu sistem masyarakat yang terintegrasi bersama unit-unit masyarakat lain dalam satu komunitas. Oleh sebab itu, pola hubungan yang saling mempengaruhi antara industri dan masyarakat bagaikan dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan, artinya kehadiran industri di tengah-tengah masyarakat akan mempengaruhi perkembangan masyarakat itu sendiri, baik secara sosial, ekonomi dan lainnya. Demikian juga halnya dengan industri, dimana kelangsungan industri sangat tergantung dari penerimaan masyarakat setempat (<http://deeruanglebas.blogspot.com>).

Kabupaten Gresik merupakan salah satu pusat kawasan industri terbesar yang berada di Jawa Timur. Beberapa industri besar di Gresik antara lain Petrokimia Gresik, Semen Gresik, Nippon Paint, BHS-TEX, Industri Perkayuan/Plywood dan Maspion. Dengan berdirinya industri-industri besar tersebut maka menjadikan Kabupaten Gresik sebagai salah satu penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar di Jawa Timur yakni sekitar 18,7% (*digilib.its.ac.id*). Oleh karena itu, Kabupaten Gresik mendapat julukan sebagai kota industri.

PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu industri besar yang berada di Kabupaten Gresik. PT Petrokimia Gresik merupakan pabrik pupuk terlengkap dan terbesar di Indonesia. Industri yang diresmikan oleh Presiden Soeharto pada tanggal 10 Juli 1972 tersebut, menempati lahan seluas 450 hektar. Keberadaan PT Petrokimia Gresik adalah untuk mendukung program pemerintah meningkatkan produksi pertanian nasional. Pada tahun 2012, PT. Petrokimia Gresik dipercaya oleh pemerintah untuk meningkatkan kapasitas produksi menjadi 5,4 juta ton atau meningkat 1,6 juta ton dibandingkan tahun 2011. Hal ini menjadikan PT. Petrokimia Gresik sebagai produsen pupuk yang memasok 50% kebutuhan pupuk subsidi nasional (*www.petrokimia-gresik.com*).

PT. Petrokimia Gresik memiliki dua kategori produk, yaitu pupuk dan non-pupuk. Untuk pupuk subsidi PT. Petrokimia Gresik memproduksi pupuk Urea, NPK (Phonska), Petroganik (pupuk organik), SP-36, dan ZA. Sedangkan untuk non-subsidi PT. Petrokimia Gresik memproduksi pupuk

NPK Kebomas, ZK, DAP, KCL, Rock Phosphate, Petronik, Petro Kalimas, Petro Biofertil dan Kapur Pertanian. Untuk kategori non-pupuk, PT. Petrokimia Gresik memproduksi benih padi unggul dengan nama Petroseed dan Petro Hibrid, serta dekomposer bernama Petro Gladiator. Tak hanya itu, PT. Petrokimia Gresik juga memiliki produk probiotik bernama Petrofish untuk meningkatkan produktivitas hasil tambak ikan dan udang. Petro Chick untuk unggas (ayam dan bebek), dan Fit Rice, yaitu beras dengan indek glikemik rendah. PT. Petrokimia Gresik juga menghasilkan produk-produk kimia untuk keperluan berbagai industri, diantaranya adalah Amoniak, Asam Sulfat, Asam Fosfat, Cement Retarder, Aluminium Flourida, CO₂ cair, Dry Ice, Asam Chlorida, Oksigen, Nitrogen, Hidrogen, dan Gypsum. Selain menghasilkan dan memasarkan produk pupuk dan non pupuk, PT. Petrokimia Gresik juga menawarkan berbagai bentuk jasa dan pelayanan, antara lain meliputi jasa pelabuhan, keahlian, fabrikasi, penelitian laboratorium, konstruksi dan rancang bangun, pendidikan dan latihan, dan lain-lain. (www.petrokimia-gresik.com).

Dengan potensi industri yang demikian besar, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik mengoptimalkan sektor industri. Tujuannya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Gresik, seperti yang diharapkan oleh Pemerintah Daerah. Sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Pasal 3 tentang Perindustrian bahwa, “Pembangunan industri bertujuan untuk meningkatkan

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata dengan memanfaatkan dana, sumber daya alam, dan/atau hasil budaya serta dengan memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup”.

Proses produksi suatu industrialisasi pasti akan membawa dampak buruk yang disebabkan oleh limbah-limbah hasil dari suatu proses produksi. Pencemaran air, udara, tanah dan pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah merupakan pencemaran yang berasal dari hasil suatu proses industri. Seperti yang diungkapkan oleh Supardi (2003:32), berbagai pabrik industri yang bahan bakunya banyak menggunakan zat-zat kimia organik maupun anorganik akan menghasilkan sisa produk-produk yang tidak berguna dan bersifat racun.

Secara langsung maupun tidak langsung dampak industrialisasi akan menyebabkan kerugian, baik itu terhadap kerusakan lingkungan hidup maupun kehidupan sosial masyarakat yang berada di sekitar industri. Hal ini merupakan persoalan yang harus dihadapi oleh komunitas-komunitas yang tinggal di sekitar kawasan industri. Seperti yang dijelaskan dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 Pasal 5 Ayat (1) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa, “Setiap orang mempunyai hak yang sama atas lingkungan hidup yang baik dan sehat”.

Upaya pertanggungjawaban industri yang dilakukan secara konsisten dapat mencegah kerusakan lingkungan hidup dan memperbaiki ketimpangan sosial masyarakat akibat proses industrialisasi. Pengelolaan

lingkungan yang baik bukan dengan mencegah pembangunan industri, sebab pembangunan industri itu diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia. Mengutip pernyataan Wibawa (2005:119), kita butuh industri untuk menyerap tenaga kerja, namun di sisi lain industri menghasilkan polusi. Keberlangsungan industri harus tetap berkelanjutan (*sustainable*) untuk menjaga stabilitas politik kita.

Usaha menyeimbangkan antara proses pembangunan industri dengan lingkungan sekitarnya baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial bertujuan agar nantinya proses industri dapat berjalan secara berkelanjutan (*sustainable*). Seperti yang ditegaskan oleh Supriadi (2008:32), bahwa keberlanjutan pembangunan di suatu daerah atau negara ditentukan oleh kemampuan daerah atau negara tersebut dalam mengolah lingkungan hidupnya. Kemudian dijelaskan lagi seperti yang telah tercantum pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa, “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan”.

Seiring perkembangan jaman industrialisasi berkembang semakin pesat, hal itu juga berbanding lurus dengan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan sekitarnya yang ditimbulkan. Dari situ kemudian

industri diharapkan mempunyai kesadaran untuk mengurangi dampak negatif tersebut dengan mengembangkan *Corporate Sosial Responsibility* (CSR). Dalam mempertanggungjawabkan kegiatannya *Corporate Social Responsibility* bersifat wajib bagi industri untuk menjalankannya. Sejalan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (3) tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menjelaskan bahwa, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”. Melihat makna yang terkandung dalam Undang-Undang di atas, tersirat bahwa suatu perusahaan dan/atau industri harus mempunyai tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan hidup maupun lingkungan sosial. Tanggung jawab tersebut bisa diwujudkan dengan cara menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memberdayakan masyarakat yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sekitar industri agar menjadikan masyarakatnya makmur dan sejahtera.

Corporate Social Responsibility merujuk pada semua *stakeholder* baik itu pemerintah, karyawan, pelanggan dan bahkan masyarakat sekitar. Pertanggungjawaban industri didasari dengan adanya *triple bottom line*. *Triple bottom line* memandang bahwasanya ada tiga aspek yang harus berjalan secara seimbang, yaitu aspek ekonomi, sosial dan lingkungan. Aspek ekonomi saja tidak mampu menjadikan industri dapat tumbuh dan

berkembang secara berkelanjutan (*sustainable*). Suatu industri akan berkelanjutan apabila memperhatikan ketiga aspek tersebut dan menjaga agar aspek ekonomi, sosial dan lingkungan selalu dapat berjalan dengan seimbang. Apabila salah satu aspek saja tidak dapat terpenuhi, baik aspek sosial maupun aspek lingkungan dampaknya akan berimbas kepada salah satu industri yang dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan dari kegiatan yang telah dilakukan.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulisan skripsi ini penulis berusaha untuk mengulas tentang **“Akuntabilitas Industri dalam *Sustainable Development* (Studi Implementasi *Corporate Social Responsibility* pada PT. Petrokimia Gresik)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah akuntabilitas industri dalam *sustainable development* pada PT. Petrokimia Gresik?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan akuntabilitas industri dalam *sustainable development* pada PT. Petrokimia Gresik?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan-tujuan yang ingin dicapai penulis pada penelitian ini adalah, sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan pelaksanaan akuntabilitas industri dalam *sustainable development* pada PT. Petrokimia Gresik.
2. Mendiskripsikan faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan akuntabilitas industri dalam *sustainable development* pada PT. Petrokimia Gresik.

D. Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat serta memberikan kontribusi bagi pihak-pihak terkait, yang terdapat pada:

1. Manfaat Akademis
 - a. Memberikan tambahan wawasan dan pengetahuan bagi pembaca dan bagi penulis itu sendiri tentang akuntabilitas industri dalam *sustainable development*.
 - b. Memberikan sumbangan referensi atau sumber informasi bagi penelitian-penelitian yang akan datang dengan topik yang sama tentang akuntabilitas industri dalam *sustainable development*.
2. Manfaat Praktis
 - a. Memberikan sumber informasi atau referensi pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan akuntabilitas industri dalam *sustainable development*.

- b. Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Gresik, khususnya industri-industri di Kabupaten Gresik dalam upaya meningkatkan akuntabilitas industri dalam *sustainable development* sebagai pedoman utama.

E. Sistematika Penulisan

Di dalam sub bab ini, akan diuraikan secara garis besar pokok-pokok isi yang terkandung di dalam setiap bab. Adapun sistematika pembahasan dalam penulisan ini antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Mengemukakan teori atau temuan yang berkaitan dengan topik dan pembahasan penelitian. Dalam hal ini, tinjauan pustaka berisi tentang landasan teori yang mendukung masalah yang ada, serta sebagai kerangka pemikiran penulis yang terdiri dari tinjauan tentang akuntabilitas industri dalam *sustainable development*.

BAB III METODE PENELITIAN

Membahas tentang metode penelitian yang digunakan, meliputi jenis penelitian, pemilihan lokasi, variabel

penelitian, dimensi waktu dan data, metode pengumpulan data, serta teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Mengemukakan mengenai data-data yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, berkaitan dengan tujuan penelitian dan sesuai dengan fokus penelitian. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dan diinterpretasikan.

BAB V PENUTUP

Mengemukakan tentang kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan dan saran yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran serta masukan bagi PT. Petrokimia Gresik dalam meningkatkan akuntabilitas industri dalam *sustainable development*.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Implementasi *Corporate Social Responsibility* Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat.

Mapisangka (2009), melakukan penelitian mengenai implementasi *corporate social responsibility* terhadap kesejahteraan hidup masyarakat. Penelitian ini mengukur *corporate social responsibility* dengan menggunakan pendekatan *cross sectional* yang bertujuan untuk menggambarkan pengaruh diantara variabel *corporate social responsibility goal*, *corporate social issue* dan *corporate relation program* terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel *corporate relation program* memiliki pengaruh yang paling besar dalam mempengaruhi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.

2. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* di Indonesia (Studi Empiris Pada Perusahaan Berkategori *High Profile* Yang *Listing* di Bursa Efek Indonesia).

Nur (2012), melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan *corporate social responsibility*. Penelitian ini mengukur pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, *leverage* dan pengungkapan media terhadap *corporate social responsibility*.

Pemilihan variabel dalam penelitian ini dikarenakan berbagai hasil penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang inkonsisten, selain itu variabel pengungkapan media masih jarang digunakan dalam penelitian di Indonesia yang mengkaji faktor-faktor pengungkapan *corporate social responsibility*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, kepemilikan saham publik dan pengungkapan media tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Dewan komisaris dan *leverage* berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*. Adapun profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, *leverage* dan pengungkapan media (*media exposure*) secara bersama-sama (*simultan*) berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

3. Analisis Penerapan *Corporate Social Responsibility* di Perusahaan Multilevel Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia.

Handjaja (2013), melakukan penelitian mengenai penerapan *corporate social responsibility* di perusahaan multilevel marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *corporate social responsibility* pada bidang pendidikan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan negatif masyarakat Indonesia tentang perusahaan multilevel marketing

tidak selalu benar, karena ternyata ada perusahaan multilevel marketing yang memiliki visi dan program *corporate social responsibility* yang peduli terhadap masyarakat seperti yang telah dilakukan oleh PT. Harmoni Dinamik Indonesia pada bidang pendidikan.

4. Pengaruh Penerapan Program *Corporate Social Responsibility* Terhadap Citra Perusahaan PT. Semen Padang.

Yenti (2013), melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan terhadap program *corporate social responsibility* terhadap citra perusahaan. Penelitian ini menganalisis pengaruh dimensi sosial dan dimensi lingkungan terhadap citra PT. Semen Padang. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Kecamatan Lubuk Kilangan. Pengambilan sampel menggunakan teknik *proportional sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi sosial dan dimensi lingkungan berpengaruh terhadap citra perusahaan, namun dari kedua variabel yang diteliti tersebut, dimensi lingkungan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap citra PT. Semen Padang dibandingkan dengan dimensi sosial.

5. Pengaruh Program *Corporate Social Responsibility* PT. Pusri Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan 3 Ilir Palembang.

Yulianti (2013), melakukan penelitian mengenai pengaruh program *corporate social responsibility* terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini ingin mengetahui seberapa besar pengaruh

program *corporate social responsibility* yang dilakukan PT. Pusri terhadap kesejahteraan masyarakat dengan mengukur variabel Pengaruh Program *Corporate Social Responsibility* (x) dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat (y). Sampel menggunakan teknik *proportioned stratified random sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang terdiri dari 55 responden laki-laki dan 45 responden perempuan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh program *corporate social responsibility* PT. Pusri terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat rendah.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Kesimpulan
1.	Mapisangka, Andi (2009)	Implementasi <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel <i>corporate relation program</i> memiliki pengaruh yang paling besar dalam mempengaruhi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat.
2.	Nur, Marzulli (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan saham publik, dewan komisaris, <i>leverage</i> dan pengungkapan media (<i>media exposure</i>) secara bersama-sama (<i>simultan</i>) berpengaruh terhadap pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> .
3.	Handjaja, Gabriela (2013)	Analisis Penerapan <i>Corporate Social Responsibility</i> di Perusahaan Multilevel Marketing PT. Harmoni Dinamik Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan negatif masyarakat indonesia tentang perusahaan

		multilevel marketing tidak selalu benar, karena ternyata ada perusahaan multilevel marketing yang memiliki visi dan program <i>corporate social responsibility</i> yang peduli terhadap masyarakat seperti yang telah dilakukan oleh PT. Harmoni Dinamik Indonesia pada bidang pendidikan.
4.	Yenti, Anofrida (2013)	Pengaruh Penerapan Program <i>Corporate Social Responsibility</i> Terhadap Citra Perusahaan PT. Semen Padang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi sosial dan dimensi lingkungan berpengaruh terhadap citra perusahaan, namun dari kedua variabel yang diteliti, dimensi lingkungan memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap citra PT. Semen Padang dibandingkan dengan dimensi sosial.
5.	Yulianti, Yeni (2013)	Pengaruh Program <i>Corporate Social Responsibility</i> PT. Pusri Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan 3 Ilir Palembang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaruh program <i>corporate social responsibility</i> PT. Pusri terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat rendah.

B. Pembangunan

1. Pengertian Pembangunan

Salah satu tujuan dari setiap negara-negara berkembang mempunyai komitmen terhadap pembangunan nasional. Pembangunan yang ada di negara-negara berkembang secara umum merupakan proses kegiatan yang terencana dalam upaya pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan modernisasi bangsa untuk peningkatan kualitas hidup manusia dan kesejahteraan masyarakat. Secara etimologi, istilah pembangunan

berasal dari kata “bangun” yang dalam kata kerja berarti mempunyai makna membuat, mendirikan dan membina. Sedangkan secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep yang dikenal oleh dunia, Suryono (2010:26).

Menurut Siagian dalam Suryono (2010:2), “Pembangunan sebagai suatu arah atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan suatu bangsa, negara dan pemerintah secara sadar menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”.

Selanjutnya Irma dan Cynthia dalam Ryadi (1981:13), mendefinisikan pembangunan sebagai berikut:

“Bahwa hakikat pembangunan adalah merupakan perubahan-perubahan sosial yang besar dan oleh karena sebab itu tumbuh dan berkembangnya harus bertahap untuk menghindari ekses-ekses yang dapat merugikan proses pembangunan itu sendiri pada tahap rintisan. Ekses-ekses di dalam pembangunan yang berlangsung terlalu cepat tanpa melewati pentahapan waktu yang cukup dapat menimbulkan frustrasi, aliansi, kegoncangan-kegoncangan identitas dan lain-lain di dalam masyarakat yang pada gilirannya akan menimbulkan sifat tidak mendukung maupun tidak simpatik dari sebagian besar masyarakat yang sesungguhnya justru merupakan kekuatan pembaharuan itu”.

Pengertian pembangunan itu sendiri harus dilihat secara dinamis, bukan hanya dilihat sebagai konsep yang statis. Dengan kata lain pembangunan merupakan suatu proses kearah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya. Perubahan juga dapat dirumuskan sebagai perubahan yang terencana dari situasi nasional satu ke satu situasi nasional yang lain yang dinilai lebih tinggi, Katz dalam Suryono (2001:90).

Pada dasarnya pembangunan merupakan konsep yang sangat kompleks pengertiannya. Pembangunan mengandung arti tidak terbatas

pada masalah pertumbuhan ekonomi saja tetapi juga meliputi keseluruhan aspek kehidupan manusia. Menurut Myrdal dalam Suryono (2001:56), kegiatan pembangunan merupakan suatu proses yang saling terkait, antara proses pertumbuhan ekonomi, perubahan sosial dan demokrasi politik yang terjadi dalam lingkaran sebab akibat kumulatif (*circular cumulative causation*). Pada umumnya pembangunan nasional di negara berkembang dipusatkan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena yang paling dirasakan di negara berkembang adalah keterbelakangan ekonomi terutama masalah kemiskinan. Oleh karena itu pembangunan di bidang ekonomi diharapkan dapat mendukung tercapainya tujuan atau mendorong perubahan dan pembaharuan dalam bidang kehidupan masyarakat.

Dari pendapat-pendapat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya inti dari pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik dari keadaan yang sebelumnya dengan mengadakan usaha secara maksimal untuk menuju tatanan kehidupan yang lebih baik. Pembangunan tidak hanya mengandung arti secara fisik melainkan meliputi keseluruhan aspek kehidupan masyarakatnya.

2. Administrasi Pembangunan

Dalam perkembangannya ilmu administrasi banyak mengalami perubahan, penyempurnaan hingga penambahan cakupan dari ilmu administrasi itu sendiri. Salah satu cakupan dari ilmu administrasi adalah

administrasi pembangunan. Seperti yang diungkapkan oleh Siagian (1999:3) mengenai definisi dari administrasi pembangunan, yaitu:

“Administrasi Pembangunan merupakan salah satu disiplin ilmiah dalam rumpun Administrasi Negara. Telah diketahui dan diakui pula bahwa fokus analisis Administrasi Pembangunan adalah proses pembangunan yang diselenggarakan oleh suatu *nation* dalam rangka pencapaian tujuan dan cita-cita negara bangsa tertentu, termasuk cara-cara ilmiah yang dipergunakan dalam pemecahan masalah, menghadapi tantangan, memanfaatkan peluang, dan menyingkirkan ancaman. Administrasi Pembangunan mencakup dua pengertian, yaitu (1) administrasi dan (2) pembangunan. Telah umum diketahui bahwa yang dimaksud dengan administrasi ialah keseluruhan proses pelaksanaan keputusan-keputusan yang telah diambil dan diselenggarakan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*)”.

Apabila batasan pengertian tersebut dikaji, di dalamnya terkandung beberapa pokok pikiran yang sangat penting apabila seseorang berbicara mengenai pembangunan. Pokok pikiran yang dimaksud seperti yang dijelaskan oleh Ginanjar (<http://arrosyadi.wordpress.com>):

1. Pembangunan adalah merupakan suatu proses. Pembangunan itu harus dilaksanakan terus menerus, berkesinambungan, pentahapan, jangka waktu, biaya dan hasil tertentu yang diharapkan;
2. Pembangunan merupakan suatu usaha yang dilakukan secara sadar. Sudah merupakan hasil pemikiran sampai pada tingkat rasionalitas tertentu;
3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana;
4. Pembangunan mengarah pada modernitas. Untuk menemukan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju dan dapat menguasai imtaq dan iptek;
5. Pembangunan mempunyai tujuan yang bersifat multidimensional. Meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara. Terutama aspek: politik, ekonomi, sosbud, dan pertahanan dan keamanan;
6. Pembangunan ditujukan untuk membina bangsa.

Selanjutnya, Siagian (1999:5) berpendapat mengenai definisi kerja dari administrasi pembangunan, yaitu “Seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu negara/bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan akhirnya”.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Administrasi Pembangunan adalah suatu cara dan upaya untuk memperbaiki sistem atau proses (baik masalah teknis maupun non teknis) yang digunakan oleh negara-negara berkembang untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan yang meliputi aspek budaya, sosial, dan politik secara terencana dan telah disesuaikan dengan keadaan di negara tersebut (<http://arrosyadi.wordpress.com>).

3. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan bangsa (*nation building*) merupakan salah satu aspek dari konsep pembangunan multidimensional sebagai bentuk perubahan sosial. Pembangunan bangsa lebih ditujukan kepada upaya pemantapan dan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa (integrasi bangsa), wawasan ideologi, dan pencegahan terhadap berbagai bentuk perpecahan (disintegrasi bangsa), konflik antar suku, antar agama, antar daerah dan antar kelompok kepentingan.

Suryono (2010:26), menyebutkan tinjauan terhadap konsep pembangunan dengan mengkaji dari dua aspek penting, yakni secara etimologik dan secara ensiklopedik:

“Secara etimologik, istilah pembangunan berasal dari kata *bangun*. Kata *bangun* setidaknya mengandung 4 arti: (1) bangun dalam arti sadar atau siuman (aspek fisiologis), (2) bangun dalam arti bangkit atau berdiri (aspek perilaku), (3) bangun dalam arti bentuk (aspek anatomi), (4) bangun dalam arti kata kerja membuat, mendirikan, atau membina (gabungan aspek fisiologi, aspek perilaku, dan aspek bentuk). Sedangkan secara ensiklopedik, kata pembangunan telah menjadi bahasa dan konsep dunia. Konsep itu antara lain dianalogikan dengan konsep: pertumbuhan (*growth*), rekonstruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), westernisasi (*westernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaruan (*inovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pembangunan (*development*), pengembangan (*progress/developing*), dan pembinaan (*construction*)”.

Dengan melihat analogi konsep-konsep di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan secara menyeluruh, baik dilihat dari sisi politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta hubungan antar negara. Konsep pembangunan secara menyeluruh yaitu pembangunan diartikan sebagai suatu proses perubahan keadaan dari tatanan awal menuju ke arah tatanan kehidupan manusia yang lebih baik dimana dilakukan oleh manusia secara sadar, terencana dan melembaga. Sedangkan pembangunan fisik merupakan proses perubahan sarana dan prasarana dan fasilitas-fasilitas umum yang menyangkut kepentingan masyarakat menuju ke arah yang lebih baik, dilakukan secara sadar oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses pembangunan ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan hasil-hasil dari pembangunan.

4. Pembangunan Berkelanjutan

a. Pengertian Pembangunan Berkelanjutan

Sejak tahun 1970-an mulai disadari bahwa umat manusia tidak dapat memiliki negara yang sehat dalam dunia yang sarat dengan kemiskinan dan kerusakan lingkungan. Perkembangan ekonomi tidak dapat dihentikan, tetapi harus diganti arah agar tidak merusak lingkungan. Tantangan pada tahun 1990-an adalah menerapkan pengertian ini menjadi tindakan, dan melaksanakan perubahan menuju pembangunan dan gaya hidup yang berkelanjutan. Perlu perubahan besar-besaran di segala bidang, mulai dari ladang pertanian sampai ke ruang rapat dewan perusahaan, dari pasar swalayan sampai ke anggaran belanja negara.

Munculnya kata-kata keberlanjutan dalam perencanaan pembangunan memberikan inspirasi bagi setiap sektor untuk juga menuju ke arah pengembangan yang lebih ramah terhadap lingkungan. Di atas itu semua, ada satu konsep yang mendasari munculnya paradigma-paradigma untuk mewujudkan keberlanjutan dalam setiap aktivitas umat manusia. Konsep itu adalah pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan menurut Djajadiningrat (2004:19), adalah:

“Pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana menyelenggarakan pembangunan yang memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang. Di dalamnya terkandung dua gagasan penting, yaitu gagasan ‘kebutuhan’ yaitu kebutuhan esensial yang memberlanjutkan kehidupan manusia; dan gagasan keterbatasan yang bersumber pada kondisi teknologi dan

organisasi sosial terhadap kemampuan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan kini dan hari depan”.

Pembangunan menimbulkan transformasi yang progresif pada ekonomi dan masyarakat. Suatu jalur pembangunan yang berkelanjutan dalam pengertian fisik, secara teoritik dapat ditelusuri. Akan tetapi keberlanjutan fisik tidak mungkin dicapai kecuali bila kebijakan pembangunan mengarahkan perhatiannya pada hal-hal seperti berubahnya akses ke sumber daya serta berubahnya distribusi biaya dan keuntungan. Bahkan gagasan sempit keberlanjutan fisik mengimplementasikan perhatian pada keadilan sosial antara generasi, suatu perhatian yang secara logis harus berkeadilan dalam setiap generasi.

Asdak (2012:39) menjelaskan bahwa, pembangunan berkelanjutan umumnya didefinisikan sebagai pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan kita saat ini tanpa menghilangkan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka. Untuk tercapainya pembangunan berkelanjutan, diperlukan tiga syarat, yaitu terlanjutkan secara ekologi, ekonomi dan sosial. Keambrokan jalannya pembangunan dapat terjadi apabila salah satu syarat tidak terpenuhi. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup secara berkelanjutan.

Konsep pembangunan berkelanjutan, di samping mempunyai nilai ekonomi juga mengandung nilai moral dan nilai ekologi. Sebagai bangsa yang sedang melaksanakan pembangunan saat ini, kita mempunyai tanggung jawab moral terhadap generasi yang akan datang, yaitu memberikan kesempatan yang sama atau bahkan lebih baik lagi bagi generasi mendatang untuk melaksanakan pembangunan

dan menikmati hasil pembangunan yang mereka lakukan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan harus menguntungkan generasi saat ini dan generasi mendatang. Keseluruhan proses dalam implementasi konsep pembangunan berkelanjutan bukan semata-mata untuk mempercepat dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, tapi harus ditujukan pada efisiensi biaya dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Sedangkan nilai ekologi yang terkandung dalam konsep pembangunan berkelanjutan berkaitan dengan toleransi manusia terhadap kehadiran makhluk lain selain manusia. Pembangunan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia diharapkan tidak mengancam kehidupan makhluk lain karena gangguan terhadap makhluk lain tersebut yang pada gilirannya akan mengganggu kehidupan manusia. Dengan demikian, dimensi ekologi lebih menekankan pada pentingnya upaya-upaya untuk mencegah terganggunya fungsi dasar ekosistem sehingga tidak akan mengganggu fungsi layanan ekologi (*ecological services*). Oleh karenanya, tuntutan ke arah konservasi ekosistem makin besar karena meningkatnya ancaman terhadap keanekaan hayati oleh pertumbuhan jumlah penduduk, anomali iklim, pola konsumsi dan oleh sebab antropogenik lainnya.

Selain dimensi ekonomi dan ekologi, konsep pembangunan berkelanjutan juga mengacu pada dimensi sosial. Dimensi sosial mencakup isu-isu yang berkaitan dengan distribusi keuntungan secara

adil, akuntabilitas, pemberdayaan masyarakat serta penghapusan kemiskinan. Upaya ke arah terselenggaranya aspek sosial dalam proses pembangunan harus terus dilaksanakan. Uraian singkat tersebut di atas mengisyaratkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dicapai apabila terjadi keselarasan pencapaian tujuan ekonomi, tujuan sosial dan tujuan ekologi. Aspek ekologi merupakan aspek yang paling banyak dipahami oleh praktisi pembangunan. Mungkin karena pembangunan berbasis sumber daya alam sangat dominan di berbagai belahan dunia terutama negara berkembang. Meskipun demikian, konsep pembangunan ini masih global dan membutuhkan fokus-fokus kegiatan spesifik (*tribunnews.com*).

b. Prinsip-Prinsip Pembangunan Berkelanjutan

Prinsip dasar setiap elemen pembangunan berkelanjutan menurut Djajadiningrat (2004:20), dapat diuraikan menjadi empat hal, yaitu:

1. Pembangunan berkelanjutan menjamin pemerataan dan keadilan sosial; Kepedulian utama dari suatu pembangunan yang berkelanjutan adalah menjawab pertanyaan tentang pemerataan, untuk generasi masa kini dan generasi mendatang. Strategi pembangunan harus dilandasi “premis” pada hal seperti: lebih meratanya distribusi sumber lahan dan faktor produksi, lebih meratanya peran dan kesempatan, dan pada pemerataan ekonomi yang dicapai harus ada keseimbangan distribusi kesejahteraan. Akan tetapi, pemerataan bukanlah hal yang secara langsung dapat dicapai. Karena pemerataan adalah konsep yang relatif dan tidak secara langsung dapat ditukar. Dimensi etika pembangunan berkelanjutan adalah hal yang menyeluruh (global), kesenjangan pendapatan negara-negara kaya dan miskin semakin lebar, walaupun pemerataan di banyak negara sudah meningkat. Aspek etika lainnya yang menjadi kepedulian pembangunan berkelanjutan adalah prospek generasi masa kini. Ini berarti pembangunan generasi masa kini harus selalu mengindahkan generasi masa depan untuk mencapai kebutuhannya.

2. Pembangunan berkelanjutan menghargai keanekaragaman (*diversity*); Pemeliharaan keanekaragaman hayati adalah persyaratan untuk memastikan bahwa sumber daya alam selalu tersedia secara berkelanjutan untuk masa kini dan masa datang. Keanekaragaman hayati juga merupakan dasar keseimbangan tatanan lingkungan (ekosistem). Pemeliharaan keanekaragaman budaya akan mendorong perlakuan yang merata terhadap setiap orang dan membuat pengetahuan terhadap tradisi yang dapat lebih dimengerti oleh berbagai masyarakat.
3. Pembangunan berkelanjutan menggunakan pendekatan integratif; Pembangunan berkelanjutan mengutamakan keterkaitan antara manusia dengan alam. Manusia mempengaruhi alam dengan cara yang bermanfaat atau merusak. Hanya dengan cara yang bermanfaat pengertian tentang kompleksnya keterkaitan antara sistem alam dan sistem sosial, dan dengan menggunakan pengertian ini melaksanakan cara-cara yang lebih integratif dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan masa depan dimungkinkan. Hal ini merupakan tantangan utama kelembagaan.
4. Pembangunan berkelanjutan meminta perspektif jangka panjang; Masyarakat cenderung menilai masa kini lebih dari masa depan. Implikasi pembangunan berkelanjutan merupakan tantangan yang melandasi penilaian ini. Pembangunan berkelanjutan mensyaratkan dilaksanakan penilaian yang berbeda dengan asumsi-asumsi normal dalam prosedur “pemotongan” (*discounting*). Perspektif jangka panjang adalah perspektif pembangunan yang berkelanjutan. Hingga saat ini kerangka jangka pendek mendominasi pemikiran para pengambil keputusan ekonomi.

c. Strategi Pembangunan Berkelanjutan

Banyak langkah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini adalah langkah-langkah yang dapat dimanfaatkan sebagai strategi pembangunan berkelanjutan menurut Asdak (2012:43):

1. Menciptakan dan/atau menguatkan lembaga koordinasi yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan serta mengupayakan agar lembaga tersebut mempunyai cukup kewenangan dan sumber dana untuk melaksanakan tugasnya;
2. Membangun dan/atau memperbaiki komitmen politik dari sejak proses persiapan hingga pelaksanaan dan melibatkan berbagai elemen dari pusat hingga daerah;
3. Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang diharapkan berperan dalam persiapan dan implementasi strategi

- pembangunan berkelanjutan dan mendorong terjadinya diskusi tentang peran masing-masing yang terlibat;
4. Menjamin atau memastikan terciptanya suasana adanya rasa memiliki (*sense of belonging*) strategi pembangunan berkelanjutan oleh masing-masing kementerian sektoral dan lembaga lain yang terlibat serta masyarakat luas dan kalangan bisnis dan industri;
 5. Menggerakkan sumber daya yang diperlukan untuk terlaksananya pembangunan berkelanjutan. Hal ini dilaksanakan melalui identifikasi, mengamankan dan mengalokasikan sumber daya pada waktu dan cara yang tepat. Untuk itu, diperlukan persyaratan sebagai berikut: keahlian dan sumber pengetahuan termasuk pelatihan; dukungan pengelolaan, legalitas dan kelembagaan; sumber daya finansial.
 6. Mendefinisikan dan mencari kesepakatan tentang peran masing-masing pemangku kepentingan, misalnya hak masing-masing pemangku kepentingan, tanggung jawab dan kewajiban yang harus dilaksanakan;
 7. Memetakan proses strategi pelaksanaan pembangunan berkelanjutan dengan cara: identifikasi isu-isu yang perlu ditelaah, visi, tujuan dan tanggung jawab; identifikasi proses dan mekanisme yang digunakan dalam strategi pembangunan saat ini; telaah/*review* hasil yang ingin dicapai di bawah strategi dan mekanisme pembangunan saat ini dalam konteks sinergitas, kesenjangan, konflik dan keluaran yang diperoleh; mengenali konflik sektoral yang terjadi termasuk konsistensi dan upaya untuk mencari jalan keluar atas persoalan-persoalan tersebut; identifikasi tentang hal-hal yang diperlukan untuk memperbaiki sinergitas dan mengatasi kesenjangan yang masih terjadi.
 8. Mengembangkan dan memperbaiki koordinasi dan koherensi antar strategi dari tingkat internasional hingga tingkat lokal, antar dan dalam sektor;
 9. Menciptakan atau memperbaiki regulasi yang mengatur proses strategi pembangunan berkelanjutan melalui: mendiskusikan dan menyepakati proses pengambilan keputusan dan hasilnya serta bersepakat tentang cara menyelesaikan persoalan yang timbul; melakukan koordinasi tentang cara-cara negosiasi dan pengelolaan konflik.
 10. Menciptakan dan memperbaiki persyaratan untuk analisis regular, perdebatan/diskusi, komunikasi, perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi. Memastikan bahwa seluruh pemangku kepentingan dapat memainkan peran secara optimal dalam mencapai strategi pembangunan berkelanjutan.

d. Teori Keberlanjutan

Keberlanjutan merupakan konsep yang sederhana namun kompleks, sehingga pengertian keberlanjutan pun sangat multi-dimensi dan multiinterpretasi. Keberlanjutan ini dapat dipahami lebih jauh dengan adanya lima alternatif pengertian sebagaimana yang diuraikan Perman et al., (1996) dalam Fauzi (2004), sebagai berikut (<http://hmjanfisipunsoed.blogspot.com>):

1. Suatu kondisi dikatakan berkelanjutan (*sustainable*) jika utilitas yang diperoleh masyarakat tidak berkurang sepanjang waktu dan konsumsi tidak menurun sepanjang waktu (*non-declining consumption*).
2. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola sedemikian rupa untuk memelihara kesempatan produksi di masa mendatang.
3. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam (*natural capital stock*) tidak berkurang sepanjang waktu (*non-declining*).
4. Keberlanjutan adalah kondisi dimana sumber daya alam dikelola untuk mempertahankan produksi jasa sumber daya alam.
5. Keberlanjutan adalah kondisi dimana kondisi minimum keseimbangan dan daya tahan (*resilience*) ekosistem terpenuhi.

Pada dasarnya dalam pembangunan berkelanjutan terdapat 3 dimensi penting, yaitu dimensi sosial, ekonomi dan ekologi. Dengan demikian, tujuan pembangunan berkelanjutan terfokus pada keberlanjutan kesejahteraan sosial yang adil dan merata (*social progress*), keberlanjutan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*economic growth*), serta keberlanjutan ekologi dalam tata kehidupan yang serasi dan seimbang (*ecological balance*) (<http://yunienurhayati.blogspot.com>). Uraian singkat tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berkelanjutan dapat dicapai

apabila terjadi keselarasan pencapaian tujuan sosial, tujuan ekonomi dan tujuan ekologi. Masing-masing dimensi sosial, ekonomi, dan ekologi juga mempunyai persyaratan tersendiri untuk berlangsungnya keberlanjutan (*sustainable*) sistem sosial, ekonomi dan ekologi.

Berikut menurut Asdak (2012:40):

1. Keberlanjutan Sistem Sosial;
SDA seharusnya dimanfaatkan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan keadilan sosial bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*). Keberlanjutan sistem sosial (*social sustainability*) lebih menekankan pada peningkatan segi kualitas daripada aspek pertumbuhan yang bersifat kuantitas. Keberlanjutan sistem sosial dapat dicapai apabila akuntabilitas masyarakat cukup tinggi serta dijalankan secara sistematis (Putnam, 1993). Kombinasi dari kohesi sosial, identitas budaya, pengembangan kelembagaan, kepercayaan, hukum, disiplin, dan moralitas akan menentukan dan menjadi bagian yang penting dari modal sosial yang mungkin agak sulit untuk dikuantifikasi, tapi penting untuk diperhatikan. Untuk terwujudnya modal sosial tersebut di atas, peran agama dan kebudayaan yang berkembang dalam masyarakat menjadi penting. Tanpa pegangan ajaran agama dan/atau sistem nilai yang berasal dari kebudayaan yang kondusif terhadap keberlanjutan sistem sosial, maka modal sosial dapat mengalami kemerosotan untuk selanjutnya runtuh sebagaimana halnya dengan modal fisik.
2. Keberlanjutan Ekonomi;
Secara umum yang dikatakan sebagai keberlanjutan ekonomi (*economic sustainability*) adalah dalam pengertian “mempertahankan” kapital atau menjaga agar kapital (sumber daya alam) tidak mengalami kemerosotan ketika kapital tersebut dimanfaatkan (Dieren, 1995). Dari keseluruhan kapital yang selama ini dikenal, yaitu sumber daya buatan, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya sosial, para pakar ekonomi lebih memberikan perhatian pada sumber daya alam, misalnya sumber daya hutan, air dan udara karena keberadaan sumber daya ini relatif masih memadai. Namun demikian, karena para pakar ekonomi lebih sering menggunakan *monetary term* dalam menentukan nilai *monetary* untuk sumber daya alam yang termasuk *intangible*. Selama ini, ongkos ekonomi lingkungan dianggap sebagai faktor eksternal (*externalities*). Saat ini, oleh adanya tekanan dari berbagai pihak, perlu mempertimbangkan ongkos ekonomi dalam kaitannya dengan kerusakan lingkungan. Ongkos ekonomi lingkungan tersebut perlu diperhitungkan dalam

analisis ekonomi suatu proyek pembangunan melalui kebijakan dan teknis analisis yang tepat (*internalized the externalities*).

3. Keberlanjutan Ekologis;

Keberlanjutan ekologis sangat diperlukan oleh kehidupan umat manusia karena keberlanjutan kehidupan manusia di planet bumi ditentukan oleh keberadaan dan kualitas lingkungan. Oleh karena itu, dalam segala aktivitas yang dilakukannya, manusia seharusnya menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam masih di bawah daya dukung lingkungannya serta limbah yang dihasilkan dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut juga di bawah ambang batas. Untuk mencapai hal tersebut, manusia harus mampu belajar untuk hidup selaras dan tidak melawan hukum lingkungan. Dengan kata lain, manusia harus mampu menjalankan kehidupannya sesuai dengan keterbatasan fisik yang ada di sekitarnya termasuk kemampuan alam dalam mengakomodir limbah yang dihasilkan oleh aktivitas manusia. Selain masalah limbah, pemanfaatan sumber daya alam pun juga diupayakan masih dalam batas dimana laju tumbuh sumber daya alam lebih besar daripada laju pemanfaatannya. Untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, sebagian keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan sumber daya alam tersebut seharusnya disisihkan untuk membiayai upaya terciptanya (inovasi) teknologi yang dapat memanfaatkan sumber daya alam yang dapat diperbarui dan/atau untuk menciptakan bentuk kegiatan (ekonomis) pasca pemanfaatan sumber daya yang tidak dapat diperbarui tersebut. Dengan demikian, aktivitas sosial dan ekonomi yang didukung kemampuan ekologi akan berkelanjutan mengiringi laju pembangunan.

C. Industri

1. Pengertian Industri

Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Pasal 1 ayat (2) tentang Perindustrian menjelaskan bahwa, “Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri”.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi dan barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau *assembling* dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa (<http://organisasi.org>).

Tambunan (2003:249) mengartikan industrialisasi sebagai suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produksi dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan meningkatnya pendapatan masyarakat mendorong perubahan struktur ekonomi di banyak negara, dari yang tadinya berbasis pertanian menjadi berbasis industri.

Pada sebagian negara di dunia, industrialisasi sangat dibutuhkan guna menjamin kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakatnya. Bagi negara yang sedang berkembang, industri mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan. Tidak sedikit kebutuhan masyarakat yang terpenuhi oleh sektor industri melalui penyediaan barang dan jasa. Bahkan industrialisasi menjadi pondasi perekonomian beberapa negara di dunia.

Karena merupakan kegiatan ekonomi yang luas maka jumlah dan macam industri berbeda-beda untuk tiap-tiap negara atau daerah. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri, dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Cara penggolongan atau pengklasifikasian industri pun berbeda-beda. Tetapi pada dasarnya, pengklasifikasian industri didasarkan pada kriteria yaitu berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, pangsa pasar, modal, atau jenis teknologi yang

digunakan. Selain faktor-faktor tersebut, perkembangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara juga turut menentukan keanekaragaman industri negara tersebut, semakin besar dan kompleks kebutuhan masyarakat yang harus dipenuhi, maka semakin beranekaragam jenis industrinya (<http://geografi-bumi.blogspot.com>).

Kristanto (2002:157), mengklasifikasi industri secara konvensional sebagai berikut:

1. Industri primer, yaitu industri yang mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi, misalnya pertanian, pertambangan;
2. Industri sekunder, yaitu industri yang mengubah barang setengah jadi menjadi barang jadi;
3. Industri tersier, yaitu industri yang sebagian besar meliputi industri jasa dan perdagangan atau industri yang mengolah bahan industri sekunder.

Lebih detailnya, industri dapat diklarifikasikan secara garis besar sebagai berikut menurut Kristanto (2002:156):

1. Industri dasar atau hulu.
Industri hulu memiliki sifat sebagai berikut: padat modal, berskala besar, menggunakan teknologi maju dan teruji. Lokasinya selalu dipilih dekat dengan bahan baku yang mempunyai sumber energi sendiri dan pada umumnya lokasi ini belum tersentuh pembangunan. Oleh karena itu industri hulu membutuhkan perencanaan yang matang beserta tahapan pembangunannya, mulai dari perencanaan hingga operasional. Di sudut lain juga dibutuhkan pengaturan tata-ruang, rencana pemukiman, pengembangan kehidupan perekonomian, pencegahan kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Perubahan industri ini dapat mengakibatkan perubahan lingkungan baik dari aspek sosial-ekonomi dan budaya maupun pencemaran. Terjadi perubahan tatanan sosial, pola konsumsi, tingkah laku, sumber air, kemunduran kualitas udara, penyusutan sumber daya alam, dan sebagainya.
2. Industri hilir.
Industri ini merupakan perpanjangan proses industri hulu. Pada umumnya industri ini mengolah bahan setengah jadi menjadi barang jadi, lokasinya selalu diusahakan dekat pasar, menggunakan teknologi madya dan teruji, padat karya.

3. Industri kecil.

Industri kecil banyak berkembang di pedesaan dan perkotaan, memiliki peralatan sederhana. Sistem pengolahannya lebih sederhana. Sistem tata letak pabrik maupun pengolahan limbah belum dapat perhatian. Sifat industri ini padat karya.

Tambunan (2003:308), menggolongkan industri berdasarkan jumlah pegawainya sebagai berikut:

1. Industri rumah tangga dengan jumlah pegawai sekitar 1-4 orang biasanya anggota keluarga;
2. Industri kecil dengan jumlah pegawai sekitar 5-19 orang;
3. Industri sedang/menengah dengan jumlah pegawai sekitar 20-99 orang;
4. Industri besar dengan jumlah pegawai di atas 100 orang.

2. Ekologi Industri

a. Pengertian Ekologi Industri

Tidak ada satu pun definisi tunggal tentang ekologi industri yang berlaku umum. Namun pada dasarnya, kebanyakan definisi yang diberikan mengandung atribut-atribut serupa, walaupun dengan menggunakan penekanan yang berbeda-beda. Atribut-atribut tersebut menurut Djajadiningrat (2004:45), adalah:

1. Suatu pendekatan sistem yang menginteraksi antara sistem ekologis dengan industri;
2. Mempelajari aliran material dan energi dan transportasinya;
3. Merupakan suatu pendekatan multidisiplin ilmu;
4. Berorientasi pada masa depan;
5. Suatu perubahan dari proses yang bersifat linier (terbuka) ke proses siklis (yang tertutup), sehingga barang sisa (*waste*) dari satu industri digunakan sebagai input untuk industri lainnya;
6. Suatu usaha untuk mengurangi dampak-dampak lingkungan suatu ekologi karena aktivitas industri;
7. Menekankan keharmonisan yang mengintegrasikan aktivitas industri dalam sistem ekologi;

8. Gagasan untuk pembuatan sistem industri yang lebih efisien dan berkelanjutan secara alami;
9. Mendefinisikan dan membandingkan hirarki sistem-sistem alam dengan industri, untuk mengidentifikasi areal studi dan tindakan potensial bagi pengembangan industri.

Graedel dan Allenby dalam Djajadiningrat (2004:46) yang mengeluarkan *teksbook* pertama tentang ekologi industri, menyebutkan bahwa ekologi industri berarti manusia dapat dengan bebas (*deliberately*) dan secara rasional (*rationally*) mendekati dan memelihara apa yang diinginkan (*desirable*) sesuai kemampuannya, memberikan keberlanjutan secara ekonomi, budaya, dan perubahan teknologi. Konsep ini mengandung makna bahwa suatu sistem industri jangan dipandang secara terpisah dari sistem yang ada di sekitarnya, tetapi sebaliknya haruslah menyatu dengan sistem di sekitarnya tersebut, dengan tujuan untuk menemukan cara-cara untuk mengoptimalkan daur material (*material cycle*) dari material murni, produk akhir, komponen-komponen produksi, sampah hingga penjualan terakhir. Faktor-faktor yang dioptimalkan tersebut terdiri dari sumber daya, energi dan modal (*capital*).

Kata-kata “bebas” (*deliberately*) dan “rasional” (*rationally*) mengidentifikasi bahwa adanya multidisiplin bidang atau ilmu dalam ekologi industri yang di dalamnya mencakup teknologi dan ilmu-ilmu dasar untuk mempertimbangkan dan mewujudkan keberlanjutan global, dan bukan merupakan suatu hal yang tidak terencana, tergesa-gesa, atau pun menimbulkan biaya besar yang pada akhirnya hanya menimbulkan bencana. Sedangkan kata-kata “diinginkan” (*desirable*) memungkinkan sesuatu yang berbeda potensi teknologi, budaya, dan bentuk pengelolaan ekonomi sesuai yang diinginkan oleh para pelakunya. Artinya suatu aturan yang mutlak yang harus dipenuhi dalam penerapan konsep ekologi industri ini. Secara praktis ekologi industri tidak lain adalah menggambarkan keberterimaan suatu sistem industri bagi lingkungan, sehingga sistem

industri tersebut dapat selalu mampu memproduksi barang dan jasanya secara terus menerus (berkelanjutan).

Lowé dalam Djajadiningrat (2004:49) juga berpendapat tentang ekologi industri, yaitu bagaimana mengatur atau mengelola aktivitas-aktivitas manusia dalam suatu landasan yang berkelanjutan yang merupakan, suatu cara yang mencoba mengintegrasikan sistem-sistem manusia yang penting dengan sistem alam; Meminimalisasi penggunaan energi dan material; Meminimalisasi dampak-dampak aktivitas manusia terhadap kerusakan lingkungan.

b. Perspektif Ekologi Industri

Robert Socolow dalam Djajadiningrat (2004:51) mengidentifikasi enam perspektif berdasarkan prinsip sistem yang diadopsi oleh ekologi industri, yaitu:

1. Ekologi industri berfokus pada tujuan kelanggengan hidup untuk jangka panjang (*long term habitability*) daripada jangka pendek, atau hanya sebagai suatu pendekatan yang khusus, yang selalu menjaga kepraktisan. Dalam hal ini ekologi industri mencoba untuk memahami berbagai gangguan antroposentris terhadap siklus dan sistem-sistem yang fundamental mendukung kehidupan daripada hanya sekedar merespon berbagai kekhawatiran yang dihadapi;
2. Ekologi industri berfokus pada masalah-masalah skopnya yang bersifat regional dan global, menetap dan sulit untuk dikelola;
3. Ekologi industri berfokus pada kasus-kasus yang berhubungan dengan aktivitas-aktivitas manusia yang berhubungan dengan sistem alam;
4. Ekologi industri muncul dengan tujuan untuk memahami dan memproteksi keseimbangan/kelenturan antara sistem alam dan sistem manusia, ketika mengidentifikasi dan mencoba untuk meminimalisasi dampak-dampak terhadap sistem-sistem yang sangat sensitif;
5. Ekologi industri menggunakan teknik-teknik sistem sebagai *mass-flow analysis* untuk memahami sistem ekonomi dan lingkungan, dan hubungan antar komponen-komponen tersebut;
6. Ekologi industri memandang pelaku-pelaku ekonomi perusahaan-perusahaan swasta sebagai pelaku sentral guna mengurangi dampak-dampak lingkungan, dan mencari cara untuk memahami bagaimana perilaku-perilaku mereka lebih berwawasan

lingkungan (*become more environmentally appropriate*), daripada memandang mereka sebagai penyebab masalah (*blameworthy*).

c. Tujuan Ekologi Industri

Dari beberapa uraian di atas dapat disebutkan bahwa tujuan utama ekologi industri tidak lain adalah untuk memajukan dan melaksanakan konsep-konsep pembangunan berkelanjutan, baik itu secara global, regional, ataupun pada tingkat lokal, dengan mencoba menemukan antar kebutuhan generasi sekarang dan generasi yang akan datang.

Dalam hal ini ada 3 prinsip kunci pembangunan berkelanjutan yang menjadi tujuan ekologi industri menurut Djajadiningrat (2004:52):

1. Penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Ekologi industri mengembangkan prinsip untuk lebih mengutamakan penggunaan sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan mengurangi penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Aktivitas industri bergantung pada ketersediaan sumber daya alam yang kuat (*steady supply of resources*), sehingga untuk itu perlu untuk mengatur pemanfaatannya secara lebih efisien dalam proses operasi sebisa mungkin, walaupun sudah banyak penelitian yang menemukan cara meminimalisasi penggunaan bahan baku ini. Ini tidak dapat diasumsikan bahwa permintaan akan kebutuhan bahan-bahan baku tersebut akan berkurang. Selain sinar matahari, suplai sumber daya alam sangat terbatas. Sehingga menipisnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui dan rusaknya sumber daya alam yang dapat diperbaharui (seperti hutan) harus dapat diminimalisasi agar aktivitas industri dapat berkelanjutan dalam jangka waktu lebih lama;

2. Menjamin mutu/kualitas hidup masyarakat sekitarnya.

Manusia merupakan satu-satunya komponen dalam kompleksnya interaksi yang ada dalam ekologi. Aktivitas-aktivitas mereka tidak dapat dipisahkan dari fungsi-fungsi keseluruhan sistem. Karena kualitas hidup manusia bergantung pada kualitas komponen-komponen lain dalam ekosistem, struktur dan fungsi ekosistem, sehingga hal ini harus menjadi fokus dalam konsep ekologi industri. Bagaimana caranya agar aktivitas-aktivitas industri tidak menyebabkan bencana kerusakan bagi ekosistem atau secara

perlahan merusak struktur dan fungsi ekosistem itu sendiri, yang membahayakan sistem kehidupan di planet ini;

3. Memelihara kelangsungan hidup ekologi sistem alami (*Environmental Equity*).

Tantangan yang utama bagi pembangunan berkelanjutan adalah bagaimana upaya untuk mencapai suatu keadilan bagi antar generasi dan antar masyarakat (*intergenerational and intersocietal equity*). Menghabiskan sumber daya alam dan merusak kualitas ekologi demi mencapai tujuan jangka pendek dapat membahayakan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketidakadilan antar masyarakat juga muncul, sebagai fakta bahwa tidak adanya keseimbangan penggunaan sumber daya alam antara negara maju dengan negara berkembang, dimana terjadi ketidaksesuaian atau keseimbangan penggunaan sumber daya alam yang digunakan negara-negara maju dibandingkan negara-negara berkembang.

3. Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan

a. Definisi Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan

Djajadiningrat (2004:80), mendefinisikan kawasan industri berwawasan lingkungan (*Eco-Industrial Park*), sebagai berikut, *Eco-Industrial Park (EIP)* merupakan sekumpulan industri (penghasil produk/jasa) yang berlokasi pada suatu tempat dimana para pelaku-pelaku didalamnya secara bersama mencoba meningkatkan performansi lingkungan, ekonomi dan sosialnya.

Selain definisi di atas, Djajadiningrat (2004:81) juga mendefinisikan bahwa kawasan industri berwawasan lingkungan, yaitu, merupakan suatu sistem industri yang merencanakan adanya pertukaran material dan energi guna meminimalisasi penggunaan energi dan bahan baku, meminimalisasi sampah, dan membangun suatu ekonomi berkelanjutan, ekologi dan hubungan sosial.

Menurut Djajadiningrat (2004:81), untuk menjadi sebuah *Eco-Industrial Park (EIP)*, sebuah kawasan industri yang dikembangkan haruslah lebih dari hanya sekedar sebagai:

1. Sebuah jaringan-jaringan hasil samping (*by-Product*) saja;
2. Sebuah daur ulang klaster bisnis (*recycling business cluster*);

3. Sebuah kumpulan perusahaan-perusahaan yang memiliki teknologi ramah lingkungan;
4. Sebuah kumpulan perusahaan yang membuat suatu produk hijau (*green products*);
5. Sebuah kawasan industri yang hanya menerapkan hanya satu tema yang berhubungan dengan lingkungan, seperti kawasan industri yang merupakan kumpulan perusahaan yang memanfaatkan tenaga matahari, dll;
6. Sebuah kawasan industri yang memiliki infrastruktur-infrastruktur yang ramah lingkungan.

Eco-Industrial Park merupakan evolusi dari konsep kawasan-kawasan industri yang sudah ada. *Eco-Industrial Park* mencoba mengoreksi konsep kawasan-kawasan industri yang sudah ada selama ini. Anja-Katrin Fleig dalam Djajadiningrat (2004:82), menyebutkan bahwa perbedaan yang nyata antara *Eco-Industrial Park* dengan kawasan-kawasan industri yang biasanya ada, adalah:

1. Tingginya kerjasama/pertukaran antara perusahaan-perusahaan, pengelola kawasan dan para pembuat kebijakan lokal di wilayah tempat *Eco-Industrial Park* tersebut berkembang;
2. Para aktor/pelaku usaha dalam *Eco-Industrial Park* selalu bekerja keras untuk mewujudkan suatu visi dari aktivitas industri yang dilakukan untuk mencapai suatu keberlanjutan yang berkaitan dengan aspek ekonomi, sosial dan ekologis.

b. Manfaat Kawasan Industri Berwawasan Lingkungan

Djajadiningrat (2004:82) menjelaskan tentang manfaat sebuah *Eco-Industrial Park (EIP)*, sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Industri.
Bagi industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya, sebuah *Eco-Industrial Park* akan memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk mengurangi biaya-biaya produksi melalui efisiensi terhadap material dan energi, daur ulang sampah/limbah industri dan meminimalisasi biaya-biaya tambahan yang mungkin timbul karena denda yang berhubungan dengan aturan-aturan pemerintah terhadap pelanggaran perusahaan lingkungan dan aktivitas produksi yang dilakukan.

2. Manfaat bagi Lingkungan.

Penerapan konsep *Eco-Industrial Park* akan mengurangi banyak sumber-sumber polusi, limbah dan sampah, juga mengurangi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Dari sisi perusahaan-perusahaan yang merupakan anggota *Eco-Industrial Park* ini, dengan penerapan konsep *Eco-Industrial Park* ini akan mengurangi beban mereka terhadap tuntutan ramah lingkungan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif bagi penerapan produksi bersih, diantaranya termasuk usaha-usaha dalam pengendalian polusi, efisiensi energi, manajemen limbah, pemulihan sumber daya alam, dan teknik dan metode-metode lain bagi penerapan konsep manajemen lingkungan.

3. Manfaat bagi Komunitas/Masyarakat

Dengan meningkatnya performansi perusahaan-perusahaan anggota *Eco-Industrial Park* akan menjadikan *Eco-Industrial Park* sebagai suatu kekuatan alat pembangunan ekonomi suatu masyarakat. Seperti halnya kawasan-kawasan industri lain, maka pembukaan *Eco-Industrial Park* ini akan memberikan kesempatan usaha-usaha baru, diantaranya adalah usaha-usaha penyelenggaraan fasilitas untuk mewujudkan industri-industri bersih. Perusahaan-perusahaan pada regional yang bersangkutan akan memperoleh klien baru, baik dari sisi jasa maupun pembeli produk-produk mereka dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru dalam kawasan tersebut. Berkembangnya *Eco-Industrial Park* akan menciptakan program-program baru bagi kemajuan ekonomi regional bersangkutan dan juga memperoleh keuntungan lingkungan dari kemajuan yang diperoleh dari sektor industri mereka, diantaranya masyarakat di sekitarnya akan memperoleh udara, air dan tanah yang lebih bersih, berkurangnya sampah dalam jumlah besar, dan keuntungan-keuntungan lingkungan lainnya.

4. Sustainable Industry

Perkembangan industri memberikan harapan dan angin segar untuk meningkatkan perekonomian bangsa. Seiring berjalannya waktu, jumlah industrialisasi di Indonesia kian terus meningkat. Peningkatan jumlah tersebut ternyata berbanding lurus dengan masalah-masalah lingkungan. Pernyataan ini sesuai dengan pendapat Kristanto (2002:166) bahwa,

kemajuan yang diciptakan sektor industri di Indonesia telah memberikan kemakmuran bagi sebagian besar masyarakat, memperluas kesempatan kerja, menambah devisa negara, tetapi di sisi lain menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pemerintah dalam menangani masalah lingkungan ini, mengeluarkan beberapa peraturan misalnya, Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Pasal 21 tentang Perindustrian, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Keputusan Gubernur Jawa Timur No.45 Tahun 2002 tentang Baku Mutu Limbah Cair bagi Industri atau Kegiatan lainnya di Jawa Timur, Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Peraturan dikeluarkan karena perlindungan terhadap lingkungan merupakan agenda yang harus dijalankan. Harapannya agar industrialisasi yang sekarang sudah ada dapat menjadi industri yang berkelanjutan (*digilib.its.ac.id*).

Industri berkelanjutan adalah industri yang dalam operasionalnya selalu mengacu pada tiga hal yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan, atau dengan kata lain industri akan melakukan efisiensi energi, konservasi sumber daya untuk memenuhi kebutuhan generasi masa depan, menciptakan kondisi kerja yang aman dan meningkatkan keterampilan, menghasilkan limbah yang minimal, dan penggunaan bahan yang ramah lingkungan. Namun harus disadari bahwa untuk mencapai keberlanjutan, setiap perusahaan akan membutuhkan cara yang tepat dan biaya yang cukup besar karena untuk pengolahan limbah ada standarisasi dari

pemerintah yang harus dipenuhi. Sehingga terdapat pemikiran bahwa untuk menjadi *sustainable industry* itu sangat mahal. Hal inilah yang membuat banyak industri belum menjadi *sustainable industry* (digilib.its.ac.id).

Sesuai dengan namanya *sustainable industry* adalah sebuah industri yang dapat bertahan lama (*sustainable*) dan tidak “kadaluarsa” dalam jangka waktu yang relatif lama. *Sustainable* dalam hal ini menyangkut sebuah industri yang *environmentally friendly* dan *environmentally sustainable*. Sebuah industri pantas disebut *environmentally sustainable* tentunya tidak sembarangan. Seperti yang telah tercantum dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 Pasal 21 Ayat (1) tentang Perindustrian menjelaskan bahwa, “Perusahaan industri wajib melaksanakan upaya keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam serta pencegahan timbulnya kerusakan dan pencemaran terhadap lingkungan hidup akibat kegiatan industri yang dilakukannya”. Untuk sebuah industri dapat menjadi lebih bertanggung jawab atas keberlangsungan ekosistem yang *sustainable*, dapat dilakukan berbagai cara, sebagai berikut (<http://id.scribd.com>):

1. *Reduce and Recycle*;

Ini adalah hal yang paling mendasar dan sederhana yang dapat dilakukan sebuah industri untuk meningkatkan *environmental sustainability*. Tidak jarang sebuah industri tidak memperhatikan residu dari proses-proses industri. Yang harus diperhatikan adalah meningkatkan efisiensi untuk mengurangi residu dan seefektif mungkin mendaur ulang residu yang ditimbulkan tersebut untuk keberlangsungan lingkungan hidup.

2. Fokus pada ekonomi lokal;

Jika produk yang telah dihasilkan tersebut sudah *eco-friendly*, masih sangat mungkin bahwa masih banyak energi yang digunakan untuk memindahkan produk-produk tersebut. Memfokuskan industri pada industri lokal akan meminimalisasi *shipping and handling processes* yang melibatkan banyak energi alam dalam bentuk bensin, avtur, plastik sehingga lingkungan lebih terjaga.

3. Memanfaatkan teknologi sebaik mungkin;
Teknologi hijau dan bisnis hijau merupakan dua hal yang berkesinambungan dan saling membangkitkan. Dengan teknologi berbasis *environmental sustainability* yang semakin lama semakin dicari, sebuah industri yang *sustainable* sudah sewajarnya memanfaatkannya.

D. Corporate Social Responsibility

1. Pengertian Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility bukan merupakan suatu wacana baru. Berbagai pihak banyak yang telah mengkampanyekan pentingnya tanggung jawab sosial perusahaan ini untuk menjaga kelangsungan proses produksi. Dalam prakteknya di Indonesia, *Corporate Social Responsibility* sangat mudah untuk dibahas tetapi sangat sulit untuk dilaksanakan. Konsep *Corporate Social Responsibility* dengan realisasinya sangat berbeda. Banyak perusahaan yang memahami konsep tentang *Corporate Social Responsibility* tetapi masih banyak juga perusahaan yang enggan untuk melaksanakannya.

Corporate Social Responsibility sebagai suatu kewajiban sosial yang mana kewajiban tersebut diwujudkan dalam suatu tindakan. Tindakan mana harus sesuai dengan kebutuhan dan nilai-nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri, Bowen dalam Azheri (2008:20). Jadi sifat dari

Corporate Social Responsibility itu tidak bisa bersifat *top down* tetapi harus *bottom up*.

Corporate Social Responsibility adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan, Suhandari dalam Untung (2009:1).

Friedman's dalam Azheri (2008:22) menyatakan bahwa, “.....*there is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to say, engage in open and free competition, without deception or fraud*”. Pernyataan di atas menekankan bahwa satu-satunya tanggung jawab sosial perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang ada pada aktivitas usahanya dalam meningkatkan keuntungan sesuai dengan ketentuan aturan yang berlaku dalam upaya menghadapi persaingan bebas dan terbuka.

Sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa dalam memaknai dan mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility*, meskipun banyak kalangan menyadari bahwa *Corporate Social Responsibility* ini sangat penting bagi keberlanjutan (*sustainability*) usaha suatu perusahaan. Berdasarkan rumusan berbagai kalangan di atas, dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini belum ada kesamaan bahasa, dalam konteks Indonesia pun sebagaimana yang telah dituangkan dalam ketentuan perundang-undangan ternyata belum mempunyai bahasa dan makna yang sama terhadap *Corporate Social Responsibility*. Undang-undang No. 25 Tahun 2007

tentang Penanaman Modal menjelaskan bahwa, “Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.”

Kemudian Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas juga mengungkapkan bahwa, “Tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”.

Dari penjelasan di atas, semakin jelas bahwa pengertian *Corporate Social Responsibility* sangat luas. Namun demikian ada satu hal yang perlu dicatat sehubungan dengan belum adanya kesatuan bahasa dalam memaknai *Corporate Social Responsibility*. *Corporate Social Responsibility* ini telah diimplementasikan oleh perusahaan dalam berbagai bentuk kegiatan yang didasarkan atas kesukarelaan dan tergantung pada cara melihat dan memaknai *Corporate Social Responsibility* itu sendiri. Tidak salah jika selama ini banyak pihak atau perusahaan berbeda dalam implementasinya.

2. Ruang Lingkup *Corporate Social Responsibility*

Corporate Social Responsibility dalam arti luas merupakan komitmen perusahaan terhadap kepentingan para *stakeholders* bukan sekedar kepentingan perusahaan belaka. Dengan kata lain, meskipun secara moral perusahaan mengejar keuntungan, bukan berarti perusahaan dibenarkan mencapai keuntungan tersebut dengan mengorbankan kepentingan-kepentingan pihak lain yang terkait. Sehingga setiap perusahaan harus bertanggung jawab atas tindakan dan kegiatan dari usahanya yang mempunyai dampak, baik langsung maupun tidak langsung terhadap *stakeholders*-nya dan lingkungan dimana perusahaan melakukan aktivitasnya.

Berdasarkan pemaknaannya, disadari bahwa ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* sangat luas sehingga harus ada acuan atau pedoman untuk memudahkan pemahaman dan implementasinya dikalangan perusahaan. Berkaitan dengan ruang lingkup tersebut Elkingston's dalam Azheri (2008:44), mengelompokkan *Corporate Social Responsibility* atas 3 (tiga) aspek yang lebih dikenal dengan istilah "*Triple Bottom Line*" yang meliputi kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi (*economics prosperity*), peningkatan kualitas lingkungan (*environmental quality*), dan keadilan sosial (*social justice*). Bila dirinci lebih lanjut dari ketiga aspek *triple bottom line*, maka ketiga aspek dapat diwujudkan dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 2. Kegiatan *Corporate Social Responsibility*

No	Aspek	Muatan
1.	Sosial	Pendidikan, pelatihan, kesehatan, perumahan, penguatan kelembagaan (secara internal, termasuk kesejahteraan karyawan), kesejahteraan sosial, olahraga, pemuda, wanita, agama, kebudayaan dan sebagainya.
2.	Ekonomi	Kewirausahaan, kelompok usaha bersama/unit mikro kecil dan menengah (KUB/UMKM), agrobisnis, pembukaan lapangan kerja, infrastruktur ekonomi dan usaha produktif lain.
3.	Lingkungan	Penghijauan, reklamasi lahan, pengelolaan air, pelestarian alam, ekowisata penyehatan lingkungan, pengendalian polusi, serta penggunaan produksi dan energi secara efisien.

Sumber: Azheri (2008:45)

Pada sisi lain Brodshaw dan Vogel dalam Azheri (2008:46), menyatakan juga bahwa ada 3 (tiga) dimensi garis besar ruang lingkup

Corporate Social Responsibility yaitu sebagai berikut:

- a. *Corporate philanthropy* adalah usaha-usaha amal yang dilakukan oleh suatu perusahaan, dimana usaha-usaha amal ini tidak berhubungan secara langsung dengan kegiatan normal perusahaan. Usaha-usaha amal ini dapat berupa tanggapan langsung perusahaan atas permintaan dari luar perusahaan atau juga berupa pembentukan suatu badan tertentu, seperti yayasan untuk mengelola usaha amal tersebut.
- b. *Corporate responsibility* adalah usaha-usaha sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan ketika sedang mengejar profitabilitas sebagai tujuan perusahaan.
- c. *Corporate policy* adalah berkaitan erat dengan bagaimana hubungan perusahaan dengan pemerintah yang meliputi posisi suatu perusahaan dengan adanya berbagai kebijaksanaan pemerintah yang mempengaruhi baik bagi perusahaan atau masyarakat secara keseluruhan.

Perkembangan lebih lanjut dari *Corporate Social Responsibility* dalam praktek etika dunia usaha modern yaitu dengan memberikan pembatasan terhadap ruang lingkup *Corporate Social Responsibility*.

Menurut Mahoney dalam Azheri (2008:47), menegaskan bahwa ruang lingkup *Corporate Social Responsibility* dapat dibedakan atas 4 yaitu:

- a. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan-kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas;
Selama ini *image* yang berkembang pada sebagian besar perusahaan sehubungan dengan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan secara tradisional dianggap sebagai wujud paling *urgen* dalam implementasi *Corporate Social Responsibility*, bahkan ada *image* yang menyatakan bahwa *Corporate Social Responsibility* adalah satu-satunya kegiatan sosial yang dilakukan oleh perusahaan. Melalui keterlibatan perusahaan ini, diharapkan perusahaan tidak hanya melakukan kegiatan bisnis demi mencari keuntungan, melainkan juga ikut memikirkan kebaikan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat dengan keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial dalam mengatasi ketimpangan sosial dan ekonomi. Ada beberapa alasan perlunya perusahaan dilibatkan dan/atau melibatkan diri dalam kegiatan sosial tersebut:
 - 1) Perusahaan dan karyawan adalah bagian integral dari masyarakat setempat;
 - 2) Perusahaan telah diuntungkan dengan mendapatkan hak untuk mengelola sumber daya alam atau aktivitas lainnya yang ada dalam masyarakat tersebut dengan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan. Pada tingkat tertentu masyarakat telah berjasa pada perusahaan dengan menyediakan tenaga profesional yang telah mendatangkan keuntungan bagi perusahaan;
 - 3) Perusahaan telah memperlihatkan komitmen moralnya untuk tidak melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat;
 - 4) Sebagai upaya menjalin interaksi dan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan masyarakat supaya keberadaan perusahaan dapat diterima di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Akhirnya pada tingkatan tertentu akan melahirkan rasa memiliki (*sense of belongings*) masyarakat terhadap perusahaan. Dengan sendirinya kondisi ini akan menciptakan iklim sosial dan politik yang kondusif.
- b. Keuntungan ekonomis yang diperoleh perusahaan;
Dalam kegiatan usaha modern pada saat ini, sulit untuk memisahkan antara keuntungan ekonomis dengan keuntungan dari keterlibatannya dalam aktivitas sosial. Fakta empiris menunjukkan bahwa keterlibatan perusahaan dalam kegiatan sosial sangat menunjang aktivitas usahanya dan pada akhirnya akan menguntungkan perusahaan.
- c. Memenuhi aturan hukum yang berlaku, baik yang berkaitan dengan kegiatan dunia usaha maupun kehidupan sosial masyarakat pada umumnya;

Berkaitan dengan hal tersebut, lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yang paling penting adalah bagaimana perusahaan mematuhi aturan hukum. Hal ini tidak terlepas dari integritas masyarakat itu sendiri, karena perusahaan adalah bagian masyarakat yang bertanggung jawab dan berkewajiban untuk menjaga ketertiban dan keteraturan tatanan sosial tersebut.

- d. Menghormati hak dan kepentingan *stakeholders* atau pihak terkait yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas perusahaan;

Lingkup keempat dari tanggung jawab sosial perusahaan ini sedang mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, praktisi, akademisi dan lembaga swadaya masyarakat. Semua itu tidak terlepas dari asumsi bahwa suatu perusahaan mempunyai tanggung jawab moral dan sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan akan menjadi hal yang kongkrit baik demi terciptanya suatu kehidupan sosial maupun demi keberlanjutan dan keberhasilan aktivitas perusahaan itu sendiri.

Mengingat begitu luasnya ruang lingkup *Corporate Social Responsibility*, Siregar dalam Azheri (2008:51) membaginya dalam 2 (dua) ruang lingkup utama yaitu:

- a. Tanggung jawab institusional atau struktural berupa tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungan sekitar yang terikat oleh peraturan perundang-undangan. Tanggung jawab sosial ini dicirikan dengan adanya sanksi positif atau formal dari pemerintah apabila tidak dilaksanakan;
- b. Tanggung jawab kognitif atau interaksional yaitu tindakan sosial sukarela yang tidak terikat oleh peraturan perundang-undangan tetapi dianggap penting atau dilakukan oleh perusahaan, baik oleh kebutuhan inheren produksi perusahaan maupun oleh panggilan moral, sosial dan kemanusiaan. Tanggung jawab sosial ini dicirikan absennya sanksi positif apabila tidak dilaksanakan tetapi dalam hal ini akan berlaku sanksi sosial atau formal lainnya.

Azheri (2008:53), melihat cakupan *Corporate Social Responsibility* secara komprehensif meliputi 5 (lima) bidang, yaitu:

- a. Bidang Ekonomi;
Corporate Social Responsibility di bidang ekonomi pada dasarnya dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk berperan serta dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, bukan hanya internal akan tetapi juga eksternal. Implikasinya pun banyak seperti penciptaan

lapangan kerja, produksi barang dan jasa yang bermanfaat bagi konsumen, tidak memperlebar jurang pemisah antara yang miskin dan yang kaya dan secara internal memberikan imbalan yang adil, wajar dan layak bagi para anggota organisasi.

b. Bidang Politik;

Para manajer dan seluruh karyawan suatu organisasi adalah warga suatu masyarakat yang mempunyai hak dan kewajiban sebagaimana warga lainnya. Oleh karena itu, mereka pun mempunyai kewajiban di bidang politik seperti misalnya turut menjaga stabilitas politik di masyarakat dan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum yang diselenggarakan oleh pemerintah.

c. Bidang Sosial;

Sebagaimana halnya dengan bidang-bidang yang lain, perusahaan mempunyai kewajiban di bidang sosial yang mencakup berbagai aspek, seperti tanggung jawab untuk turut serta memajukan kegiatan pendidikan pada semua jenjang mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah lanjutan, pendidikan tinggi, mendorong dan mendukung terselenggaranya kegiatan pendidikan non-formal yang berlangsung seumur hidup, mendukung program pemberantasan tuna aksara, mendorong kreativitas masyarakat di bidang seni, termasuk seni musik, seni tari dan seni lukis. Salah satu segi penting dari bidang sosial adalah kebiasaan menggunakan bahasa nasional dengan cara yang benar, seperti dalam proses berkomunikasi antar individu dan antar kelompok dalam perusahaan.

d. Bidang Legal;

Logika dan rasa tanggung jawab sebagai warga negara mengatakan bahwa ketaatan pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesungguhnya bukan hanya merupakan salah satu tanggung jawab sosial seseorang akan tetapi keharusan mutlak. Dengan ketaatan itu ketertiban sosial dapat terpelihara dan keseimbangan antara hak dan kewajiban seseorang dapat diwujudkan.

e. Bidang Etika;

Sudah diakui dan diterima bahwa dalam kehidupan bersama terdapat norma-norma moral dan etika yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk kalangan dunia usaha. Meskipun sulit mengatakan bahwa norma-norma moral dan etika tersebut berlaku secara universal, akan tetapi di lingkungan suatu masyarakat tertentu biasanya terdapat kesepakatan tentang norma-norma moral dan etika yang berlaku bagi mereka. Pada dasarnya dapat dikatakan bahwa norma-norma moral dan etika dianggap baik apabila diterima oleh masyarakat. Kondisi ini juga berlaku dalam dunia perusahaan karena perusahaan merupakan anggota

dari suatu komunitas yang dalam artifisial sama dengan manusia sendiri.

3. Prinsip-Prinsip *Corporate Social Responsibility*

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sampai saat ini masih belum ada persamaan pandangan baik dari lembaga maupun para pakar mengenai pengertian maupun ruang lingkup *Corporate Social Responsibility*. Implementasi *Corporate Social Responsibility* tergantung dari pemahaman dan kebutuhan perusahaan yang bersangkutan. Namun demikian, berdasarkan pengertian dan ruang lingkungnya dapat ditarik prinsip-prinsip yang terdapat pada *Corporate Social Responsibility*.

Warhurst dalam Azheri (2008:57), menjelaskan ada 16 prinsip yang harus diperhatikan dalam mengimplementasikan *Corporate Social Responsibility*. Adapun prinsip-prinsipnya sebagai berikut:

- a. Prioritas perusahaan;
Dalam hal ini perusahaan harus menjadikan tanggung jawab sosial sebagai prioritas tertinggi dan penentu utama dalam pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian suatu perusahaan dapat membuat kebijakan, program dan praktek dalam menjalankan aktivitas bisnisnya dengan cara yang lebih bertanggung jawab secara sosial.
- b. Manajemen terpadu;
Manajer sebagai pengendali dan pengambil keputusan harus mampu mengintegrasikan setiap kebijakan dan program dalam aktivitas bisnisnya, sebagai salah satu unsur dalam fungsi manajemen.
- c. Proses perbaikan;
Setiap kebijakan, program dan kinerja sosial harus dilakukan evaluasi secara berkesinambungan dengan didasarkan atas temuan riset mutakhir dan memahami kebutuhan sosial serta menerapkan kriteria sosial tersebut secara global.
- d. Pendidikan karyawan;

Karyawan sebagai *stakeholders* primer harus ditingkatkan kemampuan dan keahliannya, oleh karena itu perusahaan harus memotivasi mereka melalui program pendidikan dan pelatihan.

- e. Pengkajian;
Sebelum perusahaan melakukan apapun dari suatu kegiatan harus terlebih dahulu melakukan kajian mengenai dampak sosialnya. Kegiatan ini tidak hanya dilakukan pada saat memulai suatu kegiatan tapi juga pada saat sebelum mengakhiri atau menutup suatu kegiatan.
- f. Produk dan jasa;
Suatu perusahaan harus senantiasa berusaha mengembangkan suatu produk dan jasa yang tidak mempunyai dampak negatif secara sosial.
- g. Informasi publik;
Memberikan informasi dan bila perlu mengadakan pendidikan terhadap konsumen, distributor dan masyarakat umum tentang penggunaan, penyimpanan dan pembuangan atas suatu produk barang dan/atau jasa.
- h. Fasilitas dan operasi;
Mengembangkan, merancang dan mengoperasikan fasilitas serta menjalankan kegiatan dengan mempertimbangkan temuan yang berkaitan dengan dampak sosial dari suatu kegiatan perusahaan.
- i. Penelitian;
Mengambil data atau mendukung suatu riset atas dampak sosial dari penggunaan bahan baku, produk, proses, emisi dan limbah yang dihasilkan sehubungan dengan kegiatan usaha. Penelitian dilakukan dalam upaya mengurangi dan/atau menghilangkan dampak negatif kegiatan yang dimaksud.
- j. Prinsip pencegahan;
Memodifikasi manufaktur, pemasaran dan/atau penggunaan atas produk barang atau jasa yang sejalan dengan hasil penelitian mutakhir. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya mencegah dampak sosial yang bersifat negatif.
- k. Kontraktor dan pemasok;
Mendorong kontraktor dan pemasok untuk mengimplementasikan dari prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan, baik yang telah maupun yang akan dilaksanakan.
- l. Siaga menghadapi darurat;
Perusahaan harus menyusun dan merumuskan rencana dalam menghadapi keadaan darurat.
- m. Transfer *Best Practice*;
Berkontribusi pada pengembangan dan transfer bisnis praktis dalam tanggung jawabnya secara sosial pada semua industri dan sektor publik.
- n. Memberikan sumbangan;

Sumbangan ini ditujukan untuk pengembangan usaha bersama kebijakan publik dan bisnis, lembaga pemerintah dan lintas departemen serta lembaga pendidikan yang akan membantu meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sosial.

- o. Keterbukaan (*disclosure*);
Menumbuhkembangkan budaya keterbukaan dialogis antara lingkungan perusahaan dengan publik. Selain itu perusahaan harus mampu mengantisipasi dan memberikan respon terhadap resiko potensial (*potential hazard*) yang mungkin muncul dari dampak negatif suatu operasi, produk, limbah dan jasa.
- p. Pencapaian dan pelaporan.
Melakukan evaluasi atas hasil kinerja sosial, melaksanakan audit sosial secara berkala dan mengkaji pencapaian berdasarkan kriteria perundang-undangan serta menyampaikan informasi tersebut kepada dewan direksi, pemegang saham, pekerja dan publik.

Pada sisi lain, *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) dalam Azheri (2008:60), juga merumuskan prinsip-prinsip yang dapat dijadikan pedoman dalam implementasi *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan transnasional. Pedoman itu berisikan:

- a. Memberi kontribusi untuk kemajuan ekonomi, sosial dan lingkungan berdasarkan pandangan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*);
- b. Menghormati hak-hak asasi manusia yang dipengaruhi oleh kegiatan yang dijalankan perusahaan tersebut, sejalan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah di negara tempat perusahaan beroperasi;
- c. Mendorong pembangunan kapasitas lokal melalui kerjasama yang erat dengan komunitas lokal, termasuk kepentingan bisnis. Selain itu, pengembangan kegiatan perusahaan pada pasar dalam dan luar negeri sejalan dengan kebutuhan praktek perdagangan;
- d. Mendorong pembentukan *human capital*, khususnya melalui penciptaan kesempatan kerja dan memfasilitasi pelatihan bagi karyawan;
- e. Menahan diri untuk tidak mencari atau menerima pembebasan di luar aspek hukum yang dibenarkan terkait dengan lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja, perburuhan, perpajakan, intensif finansial dan isu-isu lain;

- f. Mendorong dan memegang teguh prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik;
- g. Mengembangkan dan menerapkan praktek-praktek sistem manajemen yang mengatur diri sendiri (*self-regulation*) secara efektif guna menumbuhkembangkan relasi kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat setempat dimana perusahaan beroperasi;
- h. Mendorong kesadaran pekerja yang sejalan dengan kebijakan perusahaan melalui penyebarluasan informasi tentang kebijakan-kebijakan pada pekerja termasuk melalui program-program pelatihan;
- i. Menahan diri untuk tidak melakukan tindakan tebang pilih (*discrimination*) dan indispiliner;
- j. Mengembangkan mitra bisnis, termasuk para pemasok dan sub-kontraktor untuk menerapkan aturan perusahaan yang sejalan dengan pedoman tersebut;
- k. Bersikap *abstain* terhadap semua keterlibatan yang tidak semestinya dalam kegiatan-kegiatan politik lokal.

4. Bentuk-Bentuk *Corporate Social Responsibility*

Berbagai kalangan telah mengakui bahwa keberhasilan ekonomi dan finansial mereka berkaitan erat dengan kondisi sosial dan lingkungan dimana perusahaan mereka beroperasi. Dalam mewujudkan tanggung jawab itu, dunia usaha diharapkan memperhatikan *Corporate Social Responsibility* dengan sungguh-sungguh dalam aktivitas usahanya. Pada intinya *Corporate Social Responsibility* merupakan komitmen dari perusahaan untuk mengintegrasikan kepeduliannya terhadap masalah ekonomi, sosial dan lingkungan atau lebih dikenal dengan istilah *triple bottom line*. Azheri (2008:62), menggolongkan *Corporate Social Responsibility* dalam 4 (empat) bentuk, yaitu:

1. Pengelolaan lingkungan kerja secara baik, termasuk di dalamnya penyediaan lingkungan yang aman dan nyaman, sistem kompensasi

- yang layak dan perhatian terhadap kesejahteraan karyawan dan keluarganya;
2. Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan itu berhenti beroperasi;
 3. Penanganan kelestarian lingkungan, kegiatan ini dimulai dari lingkungan perusahaan sendiri termasuk melakukan penghematan penggunaan listrik, air, kertas dan lain sebagainya sampai penanganan limbah akibat kegiatan perusahaan, agar tidak mencemari lingkungan sekitar kantor, pabrik dan/atau lahan;
 4. Investasi sosial yang sering diartikan secara sempit sebagai “kegiatan amal perusahaan”. Makna sesungguhnya adalah perusahaan memberi dukungan finansial dan non-finansial terhadap kegiatan sosial dan lingkungan yang dilakukan oleh kelompok/organisasi lain yang pada akhirnya akan menunjang kegiatan bisnis perusahaan karena perusahaan melalui investasi sosial akan dapat menuai citra yang positif (*corporate image*).
- Menilik semua bentuk *Corporate Social Responsibility* tersebut,

perusahaan memang perlu melakukan itu semua untuk eksistensi perusahaan itu sendiri. Seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut harus dianggap sebagai bagian dari investasi, bukan kerugian. Semua itu bertujuan agar perusahaan dapat menjalankan fungsi utamanya yaitu berusaha untuk menghasilkan keuntungan dan bertahan lama.

5. Manfaat *Corporate Social Responsibility*

Kompleksitas permasalahan sosial yang semakin rumit dan implementasi *Corporate Social Responsibility* sebagai suatu konsep, diharapkan mampu memberikan alternatif terobosan baru dalam pemberdayaan masyarakat. Pada kenyataannya, di Indonesia pelaksanaan

program *Corporate Social Responsibility* belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat. Masalah tersebut disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan *Corporate Social Responsibility*. Untung (2009:6), menjelaskan manfaat *Corporate Social Responsibility* bagi perusahaan antara lain:

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan;
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial;
3. Mereduksi resiko bisnis perusahaan;
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha;
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas;
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dengan dampak pembuangan limbah;
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*;
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator;
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan;
10. Peluang mendapatkan penghargaan.

6. Kategori Perusahaan Menurut CSR

Dalam perkembangannya, *Corporate Social Responsibility* sering juga disebut sebagai *social disclosure*, *corporate social reporting* dan/atau *social accounting*. Ketiga ungkapan ini lebih merupakan proses “pengkomunikasian” dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan. Hal tersebut memperluas tanggung jawab perusahaan, di luar peran konvensional yaitu menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Perluasan tanggung jawab tersebut dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan

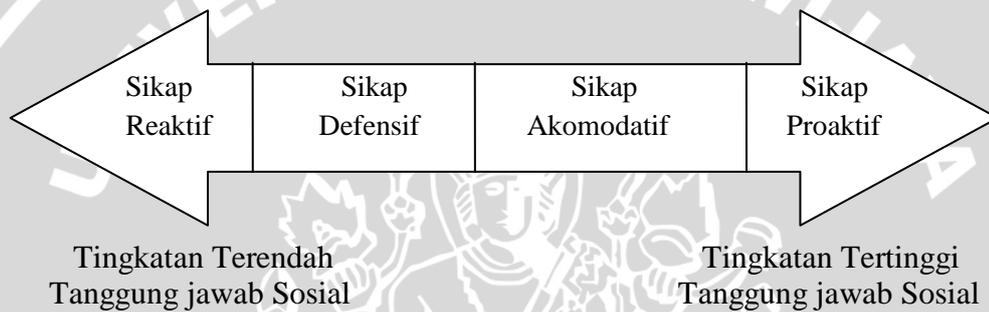
mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dibanding hanya mencari laba untuk *stakeholders*.

Atas dasar perkembangan pengertian *Corporate Social Responsibility* di atas Carrol dalam Azheri (2008:38), menjelaskan ada 4 (empat) karakteristik tipe perusahaan dalam menyikapi *Corporate Social Responsibility*, yaitu:

- a. Sikap reaktif yaitu pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan bahkan melibatkan usaha-usaha penolakan atau menutupi pelanggaran yang dilakukan, diantaranya:
 1. Tidak ada dukungan dari manajemen;
 2. Manajemen merasa entitas sosial itu tidak penting;
 3. Tidak adanya laporan tentang lingkungan sosial perusahaan;
 4. Tidak adanya dukungan pelatihan tentang entitas sosial kepada karyawan.
- b. Sikap defensif yaitu pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimum atas komitmen terhadap *stakeholders* dan lingkungan sosialnya. Adapun karakternya sebagai berikut:
 1. Isu lingkungan sosial hanya diperhatikan jika memang diperlukan;
 2. Sikap perusahaan tergantung pada kebijakan pemerintah tentang dampak lingkungan sosial yang harus dilaporkan;
 3. Sebagian kecil karyawan mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.
- c. Sikap akomodatif yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dengan melaksanakannya apabila diminta melebihi persyaratan minimal hukum dalam komitmennya terhadap *stakeholders* dan lingkungannya. Karakternya seperti:
 1. Terdapat beberapa kebijakan *top manajemen* tentang lingkungan sosial;
 2. Kegiatan *annual report* tiap akhir tahun dilaporkan secara internal dan sebagian kecil secara eksternal;
 3. Terdapat beberapa karyawan yang mendapat dukungan untuk mengikuti pelatihan tentang lingkungan sosial perusahaan.
- d. Sikap proaktif yaitu pendekatan tanggung jawab sosial dimana perusahaan secara aktif mencari peluang untuk melaksanakannya demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perbaikan lingkungannya. Karakternya sebagai berikut:

1. *Top manajemen* mendukung sepenuhnya mengenai isu-isu lingkungan sosial perusahaan;
2. Kegiatan *annual report* tiap akhir dilaporkan secara internal dan eksternal perusahaan;
3. Karyawan memperoleh pelatihan secara berkesinambungan tentang lingkungan sosial perusahaan.

Dari 4 (empat) tipe karakteristik perusahaan dalam menyikapi *Corporate Social Responsibility* tersebut, menurut Azheri (2008:40) dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Gambar 1. Pendekatan Tanggung jawab Sosial

Sumber: Azheri (2008:40)

Perilaku perusahaan juga beragam dari kelompok yang sama sekali tidak melaksanakan *Corporate Social Responsibility* sampai ke kelompok yang telah menjadikan *Corporate Social Responsibility* sebagai nilai inti (*core value*) dalam menjalankan aktifitas operasional perusahaan. Terkait dengan praktek *Corporate Social Responsibility*, perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kelompok yaitu, kelompok hitam, kelompok merah, kelompok biru dan kelompok hijau. Untung (2009:9), memberikan gambaran penjelasan tentang perilaku perusahaan pada tabel sebagai berikut:

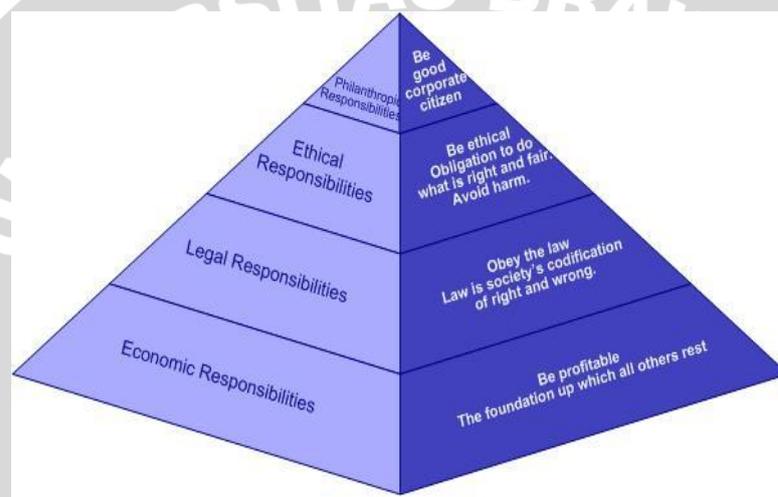
Tabel 3. Gambaran Perilaku Perusahaan

No.	Peringkat	Keterangan
1.	Hijau	Perusahaan yang sudah menempatkan <i>Corporate Social Responsibility</i> pada strategi inti dan jantung bisnisnya; <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak hanya dianggap sebagai keharusan tetapi kebutuhan (modal sosial).
2.	Biru	Perusahaan yang menilai praktek <i>Corporate Social Responsibility</i> akan membawa dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan biaya.
3.	Merah	Perusahaan peringkat hitam yang memulai menerapkan <i>Corporate Social Responsibility</i> . <i>Corporate Social Responsibility</i> masih dipandang sebagai komponen biaya yang mengurangi keuntungan perusahaan.
4.	Hitam	Kegiatannya degeneratif; mengutamakan kepentingan bisnis; tidak peduli aspek lingkungan dan sosial di sekelilingnya.

Sumber: Untung (2009:9)

Uraian di atas dapat disimpulkan, kelompok hitam adalah mereka yang tidak melakukan praktek *Corporate Social Responsibility* sama sekali. Mereka adalah perusahaan yang menjalankan bisnis untuk kepentingan sendiri. Kelompok ini tidak mempedulikan aspek lingkungan dan sosial sekelilingnya dalam menjalankan usaha bahkan tidak memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Kelompok merah adalah perusahaan yang mulai melaksanakan praktek *Corporate Social Responsibility* tetapi hanya memandang sebagai komponen biaya yang akan mengurangi keuntungannya. Aspek lingkungan dan sosial mulai dipertimbangkan tetapi dengan keterpaksaan yang biasanya dilakukan setelah mendapat tekanan dari pihak lain, seperti masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Praktek jenis ini tidak akan mampu berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan. Kelompok biru adalah perusahaan yang

menilai praktek *Corporate Social Responsibility* akan memberi dampak positif terhadap usahanya karena merupakan investasi, bukan sekedar biaya. Kelompok hijau, perusahaan yang menempatkan *Corporate Social Responsibility* pada strategi inti dan jantung bisnisnya, *Corporate Social Responsibility* tidak hanya dianggap sebagai keharusan tetapi kebutuhan modal sosial.



Gambar 2. Piramida CSR menurut Archie B. Carrol

Sumber: <http://www.actionamresponsabil.ro>

Konsep piramida yang dikembangkan Archie B. Carrol memberi justifikasi teoritis dan logis mengapa sebuah perusahaan perlu menerapkan *corporate social responsibility* bagi masyarakat dan sekitarnya. Berikut merupakan penjelasan dari gambar di atas (www.policy.hu):

1. Tanggung jawab ekonomis. Kata kuncinya adalah *make a profit*. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba. Laba adalah pondasi perusahaan. Perusahaan memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup (*survive*) dan berkembang.
2. Tanggung jawab legal. Kata kuncinya: *Obey the law*. Perusahaan harus taat hukum. Dalam proses mencari laba, perusahaan tidak boleh melanggar kebijakan dan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

3. Tanggung jawab etis. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktek bisnis yang baik, benar, adil dan *fair*. Norma-norma masyarakat perlu menjadi rujukan bagi perilaku organisasi perusahaan. Kata kuncinya: *Be ethical*.
4. Tanggung jawab filantropis. Selain perusahaan harus memperoleh laba, taat hukum dan berperilaku etis, perusahaan dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua. Kata kuncinya: *be a good citizen*. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda yakni, kepada perusahaan dan kepada publik yang dikenal dengan istilah *non-fiduciary responsibility*.

E. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Dewasa ini lingkungan hidup menjadi salah satu isu utama kebijakan pemerintah di beberapa negara. Sedangkan di Indonesia lingkungan hidup merupakan aset untuk kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Danusaputro (1980:61) menyatakan bahwa lingkungan adalah semua benda dan kondisi termasuk di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Salim (1982:34) menyatakan bahwa lingkungan hidup adalah sebagai segala benda, kondisi, keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam

ruangan yang kita tempati dan mempengaruhi hal yang hidup termasuk kehidupan manusia.

Soemarwoto (1994:51) menjelaskan pula tentang definisi dari lingkungan hidup, yaitu manusia bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik menempati suatu ruang tertentu. Kecuali makhluk hidup, dalam ruang itu terdapat juga benda tak hidup, seperti misalnya udara yang terdiri atas bermacam gas, air dalam bentuk uap, cair dan padat, tanah dan batu. Ruang yang ditempati suatu makhluk hidup bersama dengan benda hidup didalamnya disebut lingkungan hidup.

Hal senada diungkapkan juga oleh Supardi (2003:2) tentang pengertian lingkungan hidup, yaitu yang dimaksud lingkungan atau sering juga disebut lingkungan hidup adalah jumlah semua benda hidup dan mati serta seluruh kondisi yang ada didalam ruang yang kita tempati. Secara garis besarnya ada 2 macam lingkungan yaitu lingkungan fisik dan lingkungan biotik. Lingkungan fisik adalah segala benda mati dan keadaan fisik yang ada disekitar individu-individu misalnya: batu-batuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, cuaca, suhu, kelembaban, angin, faktor gaya berat, dan lain-lain. Lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup yang ada di sekitar individu baik tumbuh-tumbuhan, hewan dan manusia.

2. Permasalahan Lingkungan Hidup

Pada saat ini, permasalahan lingkungan hidup telah menjadi fokus utama bagi pemerintah dan masyarakat. Permasalahan ini muncul akibat menurunnya perhatian manusia terhadap lingkungan hidup dan juga melonjaknya populasi penduduk yang tidak terkendali. Selain itu permasalahan lingkungan hidup juga dipengaruhi oleh proses pembangunan. Seringkali proses pembangunan yang dilakukan kurang memperhatikan keseimbangan ekosistem, sehingga menimbulkan permasalahan bagi lingkungan hidup. Supardi (2003:144), menyatakan bahwa permasalahan lingkungan hidup yang terjadi di Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Kepadatan penduduk dan kemelaratan
Apabila kita perhatikan terjadinya kepadatan penduduk di Indonesia ditandai oleh beberapa karakteristik:
 - a. Laju pertumbuhan penduduk yang besar dan cepat;
 - b. Penyebaran penduduk yang tidak merata;
 - c. Komposisi penduduk menurut umur;
 - d. Arus urbanisasi yang tinggi.
- b. Pencemaran lingkungan hidup oleh proses pembangunan.

Hal lain yang juga menjadi permasalahan lingkungan hidup adalah polusi. Menurut Supardi (2003:28) polusi adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan terganggunya kesehatan serta ketenangan hidup makhluk hidup (termasuk manusia). Polusi tersebut terdiri dari polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik industri, polusi suara, polusi oleh radiasi, serta polusi air dan tanah akibat detergen, zat kimia dari pabrik, pupuk, dsb.

3. Pedoman Kelestarian Lingkungan Hidup

Pada suatu saat, lingkungan tidak dapat lagi memenuhi syarat kehidupan penghuninya karena daya dukungnya (jumlah unsur biotik dan abiotik) yang mulai berkurang atau akibat menurunnya kualitas lingkungan tersebut, akibat ulah manusia dan adanya pencemaran. Untuk menghalangi atau mengurangi terjadinya hal tersebut, maka perlu adanya suatu pedoman untuk mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.

Pedoman kelestarian lingkungan hidup menurut Supardi (2003:4):

- a. Manusia hendaknya selalu memelihara dan memperbaiki lingkungan untuk generasi mendatang;
- b. Sumber alam bumi seperti udara, air, tanah, flora dan fauna harus dihindarkan dan diselamatkan dari pencemaran dan kerusakan;
- c. Dalam pemanfaatan sumber-sumber daya yang *renewable* (yang tidak dapat diganti), perencanaan dan pengelolannya harus sebaik-baiknya;

- d. Tindakan-tindakan yang dapat menimbulkan pencemaran, merusak kesehatan dan lingkungan harus dihindarkan;
- e. Pembangunan ekonomi dan sosial hendaknya ditujukan selain untuk kesejahteraan umat juga untuk memperbaiki kualitas lingkungan;
- f. Dalam mengadakan kebijaksanaan lingkungan, hendaknya diarahkan kepada peningkatan potensi pembangunan bukan untuk masa kini saja, tetapi juga untuk masa depan;
- g. Sebagian hasil dari pemanfaatan sumber daya alam hendaknya disediakan pula untuk mengawetkan dan memperbaiki lingkungan;
- h. Ilmu dan teknologi diterapkan untuk pemecahan lingkungan harus ditujukan demi kegunaan seluruh umat manusia;
- i. Perlu adanya pendidikan dan penelitian maupun pengembangan secara ilmiah dalam masalah lingkungan, sehingga semua problem-problem lingkungan dapat ditanggulangi;
- j. Ada kerjasama yang baik dari semua pihak dalam rangka mempertahankan kelestarian dan mencegah terjadinya kerusakan/kemusnahan.

4. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup, diperlukan adanya strategi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Adapun pengelolaan lingkungan hidup menurut Supardi (2003:171), meliputi:

- a. Pengelolaan sumber daya alam.
Meliputi beberapa upaya yang dilakukan secara terpadu dan bertahap, meliputi: kegiatan pemanfaatan, pengendalian, pengawasan, pemulihan dan pengembangan lingkungan.
- b. Pengelolaan lahan.
Pengelolaan lahan disini termasuk pengelolaan lahan pertanian, pengelolaan tanah untuk pemukiman maupun industri. Strategi pengelolaan tersebut meliputi:
 1. Memperoleh hasil atau produksi maksimum dari setiap unit lahan;
 2. Memilih tata cara pengelolaan lahan yang memberi keuntungan maksimum;
 3. Menekan sekecil mungkin ketidakmampuan kondisi lahan potensial sehingga dapat meningkatkan hasil maksimum;
 4. Mencegah menurunnya potensi lahan potensial.
- c. Pengelolaan hutan.
Menggunakan pola pengelolaan *agroforestry*, meliputi kegiatan:

1. Meningkatkan produktivitas lahan hutan secara keseluruhan antara produktivitas hutan dengan produktivitas bidang pertanian, peternakan dan perikanan;
 2. Mengatasi sempitnya lahan pertanian;
 3. Pemerataan penduduk ke daerah pinggiran hutan dengan meningkatkan taraf hidupnya.
- d. Pengelolaan air.
- Pengelolaan air meliputi strategi sebagai berikut:
1. Melindungi perairan agar terjaga kebersihannya sehingga dapat menjaga kelangsungan hidup flora dengan menjaga perakaran tanaman dari gangguan fisik maupun kimiawi;
 2. Mengusahakan cahaya matahari dapat menembus dasar perairan, sehingga proses fotosintesis dapat berjalan lancar;
 3. Menjaga agar fauna mangsa dan predator selalu seimbang dengan mempertahankan rantai makanan;
 4. Mempergunakan sumber daya alam berupa air seefisien mungkin.
- e. Pengelolaan tanah.
- Usaha untuk mencegah pencemaran tanah meliputi:
1. Untuk menangani sampah plastik, maka harus dibakar dulu sebelum dibuang;
 2. Limbah yang mengandung bahan radioaktif hendaknya dibiarkan dahulu dalam waktu lama sebelum dibuang;
 3. Sampah radioaktif yang berbentuk padat harus dibungkus dengan bahan yang terbuat dari Pb untuk menahan sinar radioaktif, lalu dimasukkan dalam tromol bola antikarat sebelum dibuang;
 4. Pembuangan sampah berbahaya dilakukan ke dasar laut, pulau karang kosong, atau ke dalam sumur yang dalam dan jauh dari pemukiman penduduk.
- f. Pengelolaan udara.
- Usaha pencegahan pencemaran udara meliputi:
1. Mengurangi pemakaian bahan bakar fosil terutama yang mengandung asap serta gas-gas polutan lainnya agar tidak mencemarkan lingkungan;
 2. Melakukan penyaringan asap sebelum asap dibuang ke udara dengan cara memasang bahan penyerap polutan atau saringan;
 3. Penurunan suhu sebelum gas dibuang ke udara bebas;
 4. Membangun cerobong asap yang cukup tinggi;
 5. Menghemat bahan bakar dan mengurangi angkutan pribadi;
 6. Memperbanyak tanaman hijau di daerah polusi udara tinggi.
- g. Pengelolaan sumber daya manusia
- Pengelolaan sumber daya manusia dilakukan selain dengan menghilangkan atau memperkecil resiko penularan, masyarakat dapat diberikan sekedar ganti rugi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian merupakan sarana untuk memahami suatu permasalahan secara ilmiah. Dalam melakukan penelitian harus disesuaikan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Hal ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi dalam mendukung penulisan. Dari uraian di atas dapat diketahui pentingnya metode penelitian dalam menentukan arah kegiatan sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Menurut Bogdan dan Taylor seperti dikutip oleh Moleong (2000:3), mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar belakang dan individu secara holistik (utuh). Penggunaan penelitian ini lebih mendukung dalam memberikan arti dan makna yang berguna dalam memahami permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian. Sehingga dengan melakukan penelitian secara deskriptif melalui pendekatan kualitatif, diharapkan akan mendapat hasil dari adanya akuntabilitas industri dalam *sustainable development* pada PT. Petrokimia Gresik.

B. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2000:237), tujuan dari adanya fokus penelitian adalah penentuan fokus suatu penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus membatasi studi yang berarti bahwa dengan adanya fokus, penentuan tempat penelitian menjadi lebih layak. Kedua, penentuan fokus secara efektif menetapkan kriteria inklusi-eksklusi untuk menjangkau informasi yang mengalir masuk. Mungkin data cukup menarik, tetapi jika dipandang tidak relevan, data itu tidak akan dihiraukan.

Dari pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa fokus penelitian adalah hal-hal yang menjadi pusat penelitian dalam sebuah penelitian dan untuk memudahkan dalam menentukan data yang akan diperlukan untuk melakukan penelitian. Fokus penelitian berfungsi untuk membatasi studi dalam penelitian yang dilakukan khususnya terhadap objek penelitian agar tidak terlalu luas dan menjadi layak. Sehingga dengan adanya fokus penelitian ini maka akan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan. Oleh karena itu, untuk menghindari pembiasan dan pelebaran pembahasan maka fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Akuntabilitas industri dalam *sustainable development* pada PT. Petrokimia Gresik.
 - a. Program-program industri dalam rangka *sustainable development*;
 - b. Sarana dan prasarana industri dalam rangka *sustainable development*;
 - c. Menumbuhkan *partnership* dalam rangka *sustainable development*.

2. Faktor pendukung dan penghambat akuntabilitas industri dalam *sustainable development* pada PT. Petrokimia Gresik;
 - a. Faktor pendukung yang terdiri dari:
 - 1) Akuntabilitas masyarakat sekitar industri;
 - 2) Tersedianya dana;
 - 3) Adanya regulasi;
 - b. Faktor penghambat yang terdiri dari:
 - 1) Keterbatasan lahan;
 - 2) Kurangnya pemerataan revitalisasi teknologi.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian berkenaan dengan keseluruhan ruang dimana fenomena ditangkap, sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Berkaitan dengan hal tersebut maka yang menjadi lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Gresik. Pemilihan lokasi di Kabupaten Gresik, dikarenakan Kabupaten Gresik memiliki karakteristik yang berbeda dengan kabupaten yang lain yang ada di Provinsi Jawa Timur, yaitu dengan banyaknya industri yang dimiliki dibanding dengan daerah lainnya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka peneliti merasa sangat tertarik untuk mendeskripsikan kaitannya dengan akuntabilitas industri dalam *sustainable development*. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peneliti mengambil situs penelitian sebagai berikut:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;
2. PT. Petrokimia Gresik.

Pemilihan terhadap situs ini dikarenakan sektor industri merupakan tulang punggung bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik yang tidak hanya menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Gresik, akan tetapi juga sumber pendapatan bagi masyarakatnya.

D. Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan penggolongan sumber data, dalam penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Mukhtar (2000:206), memberi pengertian data primer dan sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti kepada sumbernya, tanpa ada perantara. Sumber data yang dimaksud dapat berupa benda-benda, situs, atau manusia. Selain itu peneliti dapat memperoleh data ini langsung melalui instrumen lain. Misalnya observasi langsung terhadap subjek atau *social setting* yang diteliti.
- b. Data sekunder adalah data yang diambil secara tidak langsung dari sumbernya. Data sekunder biasanya diambil melalui dokumen-dokumen, karya tulis orang lain, surat kabar cetak maupun elektronik, majalah, jurnal ilmiah dan lain sebagainya.

Dalam penelitian ini, data primer yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui wawancara maupun pernyataan langsung dengan pihak-pihak yang terkait. Data primer yang didapat oleh penulis berasal dari:

1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

2. PT. Petrokimia Gresik.

Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku yang relevan, jurnal ilmiah, internet dan dokumentasi tahun-tahun sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan, Sugiyono (2012:224). Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai *setting*, berbagai sumber dan berbagai cara. Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), dimana penelitian ini langsung mendatangi lokasi penelitian untuk mengamati kondisi yang sebenarnya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Wawancara (*Interview*)

Stainback dalam Sugiyono (2012:232) mengemukakan bahwa, "*interviewing provide the researcher a means to gain a deeper understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than can be gained through observation alon*". Jadi dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi.

Selanjutnya Esterberg dalam Sugiyono (2012:232) menyatakan bahwa, *“interviewing is at the heart of social reseacrh. If you look through almost any sociological journal, you will find that much social research is based on interview, either standardized or more in-depth”*. Interview merupakan hatinya penelitian sosial. Bila anda lihat jurnal dalam ilmu sosial, maka akan anda temui semua penelitian sosial didasarkan pada interview, baik yang standar maupun yang dalam.

2. Observasi (Pengamatan)

Menurut Nasution dalam Sugiyono (2012:226) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil (proton dan elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat diobservasi dengan jelas.

Marshall dalam Sugiyono (2012:226) menyatakan bahwa *“through observation, the reseacher learn about behavior and the meaning attached to those behavior”*. Melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.

Kemudian Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2012:226), mengklasifikasikan observasi menjadi observasi berakuntabilitas (*participant observation*), observasi yang secara terang-terangan dan tersamar (*overt observation dan covert observation*), dan observasi yang tak terstruktur (*unstructured observation*).

3. Dokumentasi

Sugiyono (2012:240) mengemukakan bahwa, dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (*life historis*), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya

karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat pendukung yang digunakan untuk menggali dan memperoleh data yang berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan menggunakan instrumen sebagai berikut:

1. Peneliti sendiri, Nasution dalam Sugiyono (2012:223) menyatakan bahwa, “Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.
2. Catatan lapangan (*field note*), catatan lapangan merupakan catatan tertulis yang berisi informasi yang diperoleh selama melakukan penelitian di lapangan.
3. Pedoman wawancara (*interview guide*), pedoman wawancara ini sifatnya terbuka sehingga peneliti memungkinkan untuk memperoleh data seakurat mungkin.

G. Keabsahan Data

Sebelum data hasil dari lapangan dianalisis dan ditafsirkan sebagai kesimpulan akhir, maka perlu dilakukan pengecekan ulang. Pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji konfirmabilitas.

1. Uji Kredibilitas, bertujuan agar hasil penelitian memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi sesuai dengan fakta di lapangan. Cara pengujian kredibilitas data terhadap hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan cara:

- a. Perpanjangan pengamatan;
Menurut Sugiyono (2012:270), perpanjangan pengamatan adalah teknik dengan cara peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk *rapport*, semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Bila terjadi *rapport*, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.
- b. Meningkatkan ketekunan;
Sugiyono (2012:272), mengemukakan bahwa meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti. Dengan membaca ini maka wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam, sehingga dapat digunakan untuk memeriksa data yang ditemukan itu benar/dipercaya atau tidak.
- c. Triangulasi;
Triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Bila peneliti melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti

mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data Sugiyono (2012:241). Cohen dan Manion dalam Setiyadi (2006:246), membagi triangulasi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Triangulasi waktu; Triangulasi waktu dapat berupa *cross-sectional* dan *longitudinal*. Dengan *cross-sectional* dimaksudkan bahwa pengumpulan data dilaksanakan dalam waktu yang sama kepada kelompok yang berbeda dan dalam triangulasi *longitudinal* data dikumpulkan dari kelompok yang sama dalam waktu yang berbeda;
 2. Triangulasi tempat; Untuk pengumpulan data agar lebih akurat dapat juga dilaksanakan dengan menggunakan tempat yang berbeda untuk data yang sejenis. Dengan perbedaan tempat yang berbeda tersebut diharapkan hasil penelitiannya dapat relatif berlaku lebih umum karena data dikumpulkan bukan hanya dari satu kelompok tertentu saja. Dalam ilmu sosial tempat yang berbeda cenderung menghasilkan data yang berbeda pula sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat berlaku umum.
 3. Triangulasi teori; Dengan metode ini peneliti mengumpulkan data berdasarkan teori yang berbeda atau menganalisa data yang sama dengan teori yang berbeda. Sebaiknya peneliti tidak menggunakan satu teori saja dalam mengumpulkan data sehingga ia tidak menutup mata dari kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat memperkaya data penelitian.
 4. Triangulasi metode; Peneliti menggunakan metode yang berbeda untuk mengumpulkan data yang sejenis. Dalam sebuah penelitian sering ada peneliti mengumpulkan baik data kualitatif maupun data kuantitatif. Pengumpulan dua jenis ini merupakan contoh triangulasi metode.
 5. Triangulasi peneliti; Untuk mengumpulkan data yang sama atau sejenis, bisa dilakukan oleh beberapa orang. Dengan melibatkan beberapa orang penelitian yang dihasilkan relatif mempunyai tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.
 6. Triangulasi metodologi; Triangulasi jenis ini dilakukan untuk mengumpulkan data dari proses belajar yang sama dengan menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan kuantitatif dan kualitatif sehingga peneliti mengumpulkan baik data kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian.
- d. Analisis kasus negatif;
Menurut Sugiyono (2012:275), melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang

berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti akan merubah temuannya.

e. Menggunakan bahan referensi;

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia, atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif seperti, kamera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan foto-foto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya, Sugiyono (2012:275).

f. Mengadakan *membercheck*;

Sugiyono (2012:276), menjelaskan *membercheck* adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data berarti datanya data tersebut valid, sehingga semakin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan.

2. Uji transferabilitas menurut Sugiyono (2012:276), merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil. Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

3. Uji dependabilitas dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini perlu diuji *dependability*-nya. Kalau proses penelitian tidak dilakukan tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak *reliable* atau *dependable*. Untuk itu pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Caranya dilakukan oleh auditor yang independen, atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian. Bagaimana peneliti mulai menentukan masalah/fokus, memasuki lapangan, menentukan sumber data, melakukan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai membuat kesimpulan harus dapat ditunjukkan oleh peneliti. Jika peneliti tak mempunyai dan tak dapat menunjukkan “jejak aktivitas lapangannya”, maka dependabilitas penelitiannya patut diragukan, Sanafiah Faisal dalam Sugiyono (2012:277).
4. Menurut Sugiyono (2012:277), uji konfirmabilitas mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *konfirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *konfirmability*. Dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada, tetapi hasilnya ada.

H. Analisis Data

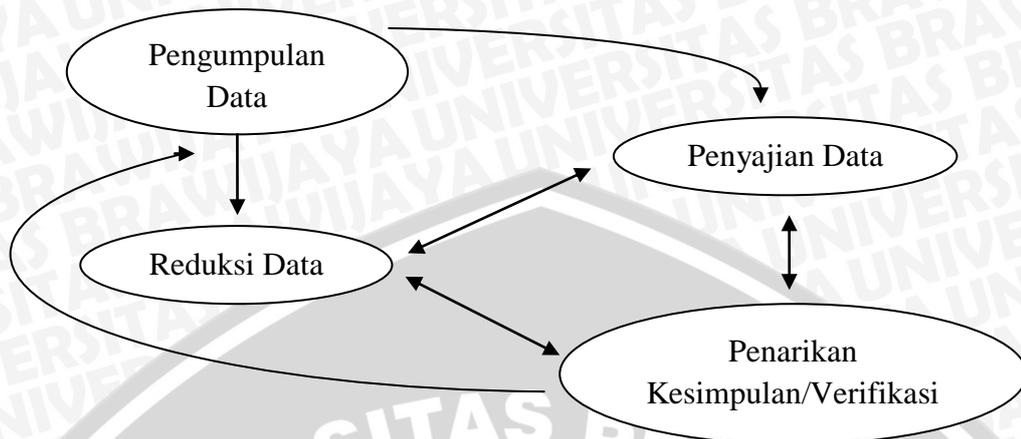
Data yang didapat selama melakukan penelitian tidak akan memiliki makna jika tanpa melalui proses pengolahan, analisis dan penyajian secara cermat dan sistematis. Analisis data merupakan fase dimana peneliti mengolah data yang telah diperolehnya saat di lapangan dengan menggunakan teknik yang sesuai untuk dapat memecahkan masalah yang diteliti sehingga tujuan penelitian dapat dicapai. Tujuan dari analisis data adalah untuk memperoleh makna, pengertian dan konsep serta untuk mengembangkan suatu hipotesis atau teori baru. Analisis data

dalam penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan. Dalam membahas tentang analisis data dalam penelitian kualitatif, para ahli memiliki pendapat yang berbeda. Miles dan Huberman dalam Idrus (2009:147), mengajukan model analisis data yang disebutnya sebagai model interaktif. Model interaktif ini terdiri dari:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*);
Data yang diperoleh di lokasi penelitian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data, selanjutnya membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gagasan dan menulis memo.
2. Penyajian Data (*Data Display*);
Untuk memudahkan bagi peneliti dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian.
3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion Drawing*);
Melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, mulai sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang bersifat tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat "*Grounded*", dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

Ketiga kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.

Gambaran model interaktif yang diajukan Miles dan Huberman dalam Idrus (2009:148), adalah sebagai berikut:



Gambar 3. Gambaran Model Interaktif

Sumber: Miles dan Huberman (1992)

Dalam model interaktif, tiga jenis kegiatan analisis dan kegiatan pengumpulan data merupakan proses siklus dan interaktif. Dengan sendirinya peneliti harus memiliki kesiapan untuk bergerak aktif di antara empat sumbu kumparan itu selama pengumpulan data, selanjutnya bergerak bolak-balik di antara kegiatan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan/verifikasi selama penelitian. Proses analisis interaktif ini merupakan proses siklus dan interaktif. Artinya, peneliti harus siap bergerak di antara empat “sumbu” kumparan itu, yaitu proses pengambilan data, penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan atau verifikasi. Dengan begitu, analisis ini merupakan sebuah proses yang berulang dan berlanjut secara terus-menerus dan saling menyusul. Kegiatan keempatnya berlangsung selama dan setelah proses pengambilan data berlangsung.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Gresik

a. Sejarah Kabupaten Gresik

Gresik sudah dikenal sejak abad ke-11 ketika tumbuh menjadi pusat perdagangan tidak saja antar pulau, tetapi sudah meluas ke berbagai negara. Sebagai kota Bandar, Gresik banyak dikunjungi pedagang Cina, Arab, Gujarat, Kalkuta, Siam, Bengali, Campa dan lain-lain. Gresik mulai tampil menonjol dalam peraturan sejarah sejak berkembangnya agama islam di tanah jawa. Pembawa dan penyebar agama islam tersebut tidak lain adalah Syech Maulana Malik Ibrahim yang bersama-sama Fatimah Binti Maimun masuk ke Gresik pada awal abad ke-11.

Sejak lahir dan berkembangnya kota Gresik selain berawal dari masuknya agama islam yang kemudian menyebar ke seluruh pulau jawa, tidak terlepas dari nama Nyai Ageng Pinatih, dari janda kaya raya yang juga seorang syahbandar, inilah nantinya akan kita temukan nama seseorang yang kemudian menjadi tonggak sejarah berdirinya kota Gresik. Dia adalah seorang bayi asal Blambangan (Kabupaten Banyuwangi) yang dibuang ke laut oleh orang tuanya, dan ditemukan oleh para pelaut anak buah Nyai Ageng Pinatih yang kemudian diberi

nama Jaka Samudra. Setelah perjaka bergelar raden paku yang kemudian menjadi penguasa pemerintah yang berpusat di Giri Kedaton, dari tempat inilah beliau kemudian dikenal dengan panggilan Sunan Giri.

Kalau Syeh Maulana Malik Ibrahim pada jamannya dianggap sebagai para penguasa, tiang para raja dan menteri, maka sunan giri disamping kedudukannya sebagai seorang sunan atau wali (Penyebar Agama Islam) juga dianggap sebagai Sultan/Prabu (Penguasa Pemerintahan). Sunan Giri yang dikenal menjadi salah satu tokoh wali songo ini, juga dikenal sebagai Prabu Satmoto atau Sultan Ainul Yaqin. Tahun dimana beliau dinobatkan sebagai penguasa pemerintahan (1487 M) akhirnya dijadikan sebagai hari lahirnya kota Gresik. Beliau memerintah Gresik selama 30 tahun dan dilanjutkan oleh keturunannya sampai kurang lebih 200 tahun.

Kota Gresik terkenal sebagai kota wali, hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya di kabupaten Gresik yaitu, Sunan Giri dan Syekh Maulana Malik Ibrahim. Di samping itu, kota Gresik juga bisa disebut dengan Kota Santri, karena keberadaan pondok-pondok pesantren dan sekolah yang bernuansa Islami, yaitu Madrasah Ibtida'iyah, Tsanawiyah, dan Aliyah hingga Perguruan Tinggi yang cukup banyak di kota ini. Hasil Kerajinan yang bernuansa Islam juga

dihasilkan oleh masyarakat kota Gresik, misalnya kopyah, sarung, mukenah, sorban dan lain-lain.

Semula kabupaten ini bernama kabupaten Surabaya. Memasuki dilaksanakannya PP No. 38 Tahun 1974, seluruh kegiatan pemerintahan mulai berangsur-angsur dipindahkan ke Gresik dan namanya kemudian berganti dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik dengan pusat kegiatan di kota Gresik. Kabupaten Gresik yang merupakan sub wilayah pengembangan bagian (SWPB) tidak terlepas dari kegiatan sub wilayah pengembangan Gerbangkertasusila (Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan). Termasuk salah satu bagian dari 9 sub wilayah pengembangan Jawa Timur yang kegiatannya diarahkan pada sektor pertanian, industri, perdagangan, maritim, pendidikan dan industri wisata. Dengan ditetapkannya Gresik sebagai bagian salah satu wilayah pengembangan Gerbangkertasusila dan juga sebagai wilayah industri, maka Kota Gresik menjadi lebih terkenal dan termashur, tidak saja di persada nusantara tetapi juga ke seluruh dunia yang ditandai dengan munculnya industri multi modern yang patut dibanggakan bangsa Indonesia.

b. Visi dan Misi

Visi :

Gresik Yang Agamis, Adil, Makmur Dan Berkehidupan Yang Berkualitas.

Secara filosofi visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Gresik adalah satu kesatuan masyarakat dengan segala potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan Kabupaten Gresik;
2. Agamis adalah suatu kondisi masyarakat yang hidup dalam sistem tata keimanan (kepercayaan) dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tata kaidah hubungan antar manusia dan lingkungannya;
3. Adil adalah perwujudan kesamaan hak dan kewajiban secara proporsional dalam segala aspek kehidupan tanpa membedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan;
4. Makmur adalah kondisi kehidupan individu dan masyarakat yang terpenuhi kebutuhannya;
5. Berkehidupan yang berkualitas adalah hidup yang sehat dengan berlatarbelakang pendidikan yang sesuai jaman serta pemenuhan pendapatan yang memadai.

Misi :

1. Mendorong tumbuhnya perilaku masyarakat yang sejuk, santun dan saling menghormati dilandasi oleh nilai-nilai agama sesuai dengan simbol Gresik sebagai Kota Wali dan Kota Santri;
2. Meningkatkan pelayanan yang adil dan merata kepada masyarakat melalui tata kelola pemerintahan yang baik;

3. Mendorong pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat secara merata melalui pengembangan ekonomi lokal, konsep ekonomi kerakyatan dan pembangunan yang berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

c. Keadaan Geografis

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Timur dengan luas wilayah 1.191,25 km² yang terbagi dalam 18 Kecamatan dan terdiri dari 356 Desa dan Kelurahan. Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan dan merupakan dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter di atas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujung Pangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean. Wilayah Kabupaten Gresik sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur berbatasan dengan Selat Madura dan Kota Surabaya, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Mojokerto, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lamongan. Untuk lebih jelas, perhatikan tabel berikut:

Tabel 4. Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Satuan	Luas
1.	Wringin Anom	Km ²	62,62
2.	Driyorejo	Km ²	51,29
3.	Kedamean	Km ²	65,95
4.	Menganti	Ha	6.871,35
5.	Cerme	Km ²	71,73
6.	Benjeng	Km ²	61,26
7.	Balong Panggang	Km ²	63,88
8.	Duduk Sampeyan	Km ²	74,29
9.	Kebomas	Km ²	30,06
10.	Gresik	Ha	3.006
11.	Manyar	Km ²	95,42
12.	Bungah	Km ²	79,44
13.	Sidayu	Km ²	47,13
14.	Dukun	Km ²	59,09
15.	Panceng	Km ²	62,59
16.	Ujung Pangkah	Km ²	94,82
17.	Sangkapura	Km ²	118,72
18.	Tambak	Km ²	78,70

Sumber: BPS Kabupaten Gresik (2012)

d. Keadaan Demografis

Penduduk merupakan subjek dan objek berharga sebagai target dan sasaran pembangunan. Berikut ini akan ditampilkan data jumlah penduduk dan jumlah kepadatan penduduk akhir tahun yang dirinci menurut kecamatan. Untuk lebih jelas, perhatikan tabel berikut:

Tabel 5. Jumlah Penduduk dan Jenis Kelamin menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	L	P	L+P
1.	Wringin Anom	35.711	35.023	70.734
2.	Driyorejo	51.427	50.786	102.213
3.	Kedamean	30.710	30.407	61.117
4.	Menganti	60.023	58.865	118.888
5.	Cerme	39.009	39.057	78.066
6.	Benjeng	33.189	32.968	66.157
7.	Balong Panggang	29.768	29.808	59.576
8.	Duduk Sampeyan	25.629	25.628	51.257
9.	Kebomas	51.572	49.954	101.526
10.	Gresik	47.169	46.490	93.659
11.	Manyar	55.310	53.474	108.784
12.	Bungah	33.138	33.062	66.200
13.	Sidayu	21.613	21.302	42.915
14.	Dukun	34.482	33.886	68.368
15.	Panceng	26.017	25.668	51.685

16.	Ujung Pangkah	25.306	25.157	50.463
17.	Sangkapura	37.646	37.324	74.970
18.	Tambak	21.067	20.350	41.417
	Total	658.786	649.209	1.307.995

Sumber: BPS Kabupaten Gresik (2012)

Tabel 6. Kepadatan Penduduk dan *Sex Ratio* menurut Kecamatan

No.	Kecamatan	Kepadatan (/Km ²)	<i>Sex Ratio</i> (%)
1.	Wringin Anom	1.130	102
2.	Driyorejo	1.992	101
3.	Kedamean	927	101
4.	Menganti	1.730	102
5.	Cerme	1.088	100
6.	Benjeng	1.080	101
7.	Balong Panggang	933	100
8.	Duduk Sampeyan	690	100
9.	Kebomas	3.377	103
10.	Gresik	16.906	101
11.	Manyar	1.140	103
12.	Bungah	833	100
13.	Sidayu	911	101
14.	Dukun	1.158	102
15.	Panceng	826	101

16.	Ujung Pangkah	532	101
17.	Sangkapura	631	101
18.	Tambak	526	104
	Kabupaten Gresik	1.098	102

Sumber: BPS Kabupaten Gresik (2012)

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik kabupaten Gresik di atas jumlah penduduk kabupaten Gresik pada akhir tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa yang terdiri dari 658.786 laki-laki dan 649.209 perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 1.270.351 jiwa, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 37.644 jiwa atau 2,9%. Dengan luas wilayah kabupaten Gresik sebesar 1.191,25/Km² maka tingkat kepadatan penduduk kabupaten Gresik adalah 1.098 jiwa/Km², dengan angka *sex ratio* sebesar 102%.

e. Potensi Sektor Industri Kabupaten Gresik

Kabupaten Gresik merupakan kabupaten yang terletak di sebelah utara kota Surabaya. Kabupaten Gresik lebih dikenal dengan kota industri karena merupakan salah satu kabupaten dengan wilayah industri terbesar di Jawa Timur. Banyak perusahaan dan industri kecil/besar berskala nasional maupun internasional berdiri di wilayah Kabupaten Gresik, misalnya PT. Petrokimia Gresik, PT. Semen Indonesia, Nippon Paint, Behaestex, dan kemudian ada salah satu perusahaan asing yaitu PT. Smelting. Melalui sektor industri, perekonomian dapat terangkat dengan cara menyerap tenaga kerja dan

sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah daerah. Potensi sektor industri di kabupaten Gresik berkembang sangat pesat. Dengan tersedianya modal dan sumber daya yang dimiliki kabupaten Gresik, potensi tersebut harus diidentifikasi secara konseptual yang harapannya bisa menjadi kunci dari pembangunan berkelanjutan.

Saat ini ada lebih dari 6000 industri besar maupun kecil berada di kabupaten Gresik (*Diskoperindag*). Angka tersebut sangat besar mengingat kesiapan dari kabupaten Gresik yang matang untuk menjadikan wilayahnya sebagai kawasan perindustrian. Pada awalnya industri di kabupaten Gresik hanya sedikit tetapi dengan didukung program yang matang, kabupaten Gresik gencar melakukan pembangunan industri di segala bidang sehingga dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar.

Tabel 7. Perkembangan Industri Kabupaten Gresik sampai Tahun 2013

Uraian	2010	2011	2012	2013
Industri Besar	1.186	1.324	1.357	1.373
Industri Kecil	5.373	5.434	5.479	5.504
Jumlah	6.559	6.758	6.836	6.877

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Gresik

Berdasarkan data di atas, perkembangan industri yang berdiri di kabupaten Gresik mengalami pertumbuhan pesat pada tahun 2011. Sebanyak 199 industri baru muncul dari jumlah kumulatif industri besar maupun kecil. Banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan

sektor industri di kabupaten Gresik yaitu yang pertama, lokasi kabupaten Gresik yang strategis dan dekat dengan kota-kota besar. Kedua, infrastruktur yang sudah lengkap dan memadai, baik sarana maupun prasarana industri. Ketiga, dari segi perijinan yang mudah. Keempat, transportasi yang sangat mendukung untuk sektor industri. Dengan wilayah yang berbatasan langsung dengan laut, menjadikan transportasi laut sebagai salah satu alat transportasi paling efisien, selain mudah dan paling murah untuk melakukan ekspor ke luar daerah maupun ke luar negeri dibandingkan melalui darat atau udara yang biayanya dianggap mahal dan memberatkan. Faktor-faktor tersebut yang menyebabkan banyak investor-investor asing menilai kabupaten Gresik sebagai lahan yang cocok untuk investasi.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

a. Visi dan Misi

Visi

Visi yang dirumuskan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik sebagaimana terdapat pada Rancangan Rencana Strategis Tahun 2011-2015 adalah “Koperasi dan UKM sebagai jembatan menuju kemakmuran, dan Industri Perdagangan sebagai pusat pertumbuhan”.

Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut di atas, ditetapkan misi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik yang akan dilaksanakan adalah:

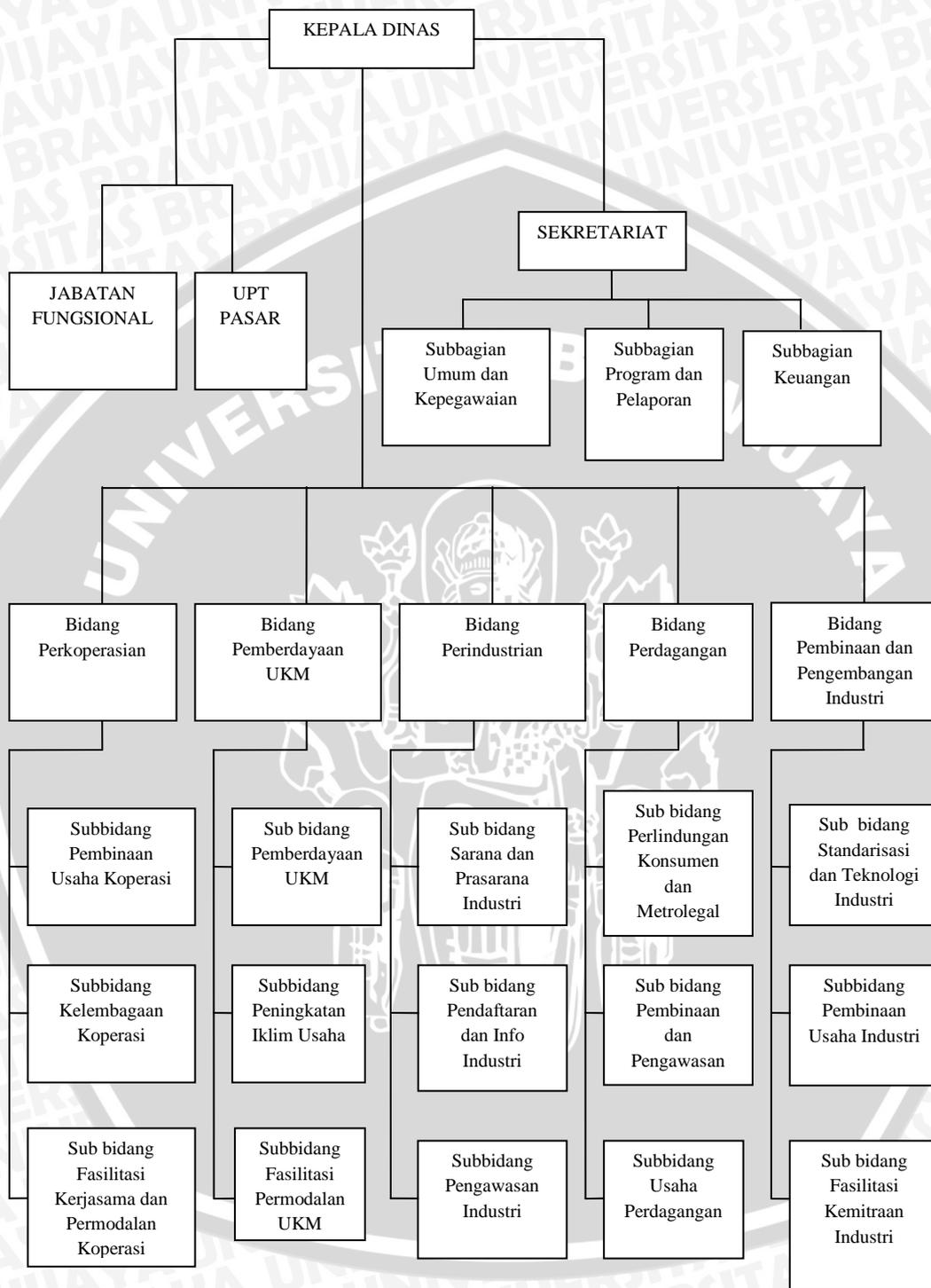
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas koperasi;
2. Menumbuhkembangkan UMKM/pedagang kaki lima sebagai ujung tombak perekonomian yang berbasis kerakyatan;
3. Meningkatkan kualitas produk, industri kecil maupun menengah;
4. Memfasilitasi pelayanan dan penyediaan barang-barang kebutuhan pokok;
5. Meningkatkan pertumbuhan Ekspor Non Migas.

b. Struktur Organisasi

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik dan Keputusan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, adalah terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Subbagian Program dan Pelaporan;

- c. Subbagian Keuangan;
3. Bidang Perkoperasian, terdiri dari:
 - a. Subbidang Kelembagaan Koperasi;
 - b. Subbidang Pembinaan Usaha Koperasi;
 - c. Subbidang Fasilitasi Kerjasama dan Permodalan Koperasi;
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Subbidang Peningkatan Iklim Usaha;
 - b. Subbidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah;
 - c. Subbidang Fasilitas Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Bidang Perindustrian, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pendaftaran dan Informasi Industri;
 - b. Subbidang Sarana dan Prasarana Industri;
 - c. Subbidang Pengawasan Industri;
6. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri, terdiri dari:
 - a. Subbidang Pembinaan Usaha Industri;
 - b. Subbidang Standarisasi dan Teknologi Industri;
 - c. Subbidang Fasilitasi Kemitraan Industri;
7. Bidang Perdagangan, terdiri dari:
 - a. Subbidang Usaha Perdagangan;
 - b. Subbidang Pembinaan dan Pengawasan;
 - c. Subbidang Perlindungan Konsumen dan Metrologi Legal;
8. Kelompok Jabatan Fungsional;
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas.



Gambar 4. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Gresik

3. Gambaran Umum PT. Petrokimia Gresik

a. Sejarah Perusahaan

PT. Petrokimia Gresik adalah salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam lingkup Departemen Perindustrian Republik Indonesia yang bernaung dibawah PT. Pupuk Indonesia *Holding Company*. PT. Petrokimia Gresik bergerak dalam bidang usaha produksi pupuk, bahan-bahan kimia dan produksi jasa lainnya. Nama Petrokimia itu sendiri berasal dari kata “*Petroleum Chemical*” dan kemudian disingkat menjadi “*Petrochemical*” yaitu bahan-bahan kimia yang terbuat dari minyak bumi dan gas. Bahan baku pertama yang digunakan untuk pembuatan pupuk di PT. Petrokimia Gresik berasal dari minyak bumi, maka nama Petrokimia dipakai sebagai nama perusahaan.

Pemerintah telah merancang keberadaannya sejak tahun 1965 melalui Biro Perancangan Negara (BPN). Pada mulanya, pabrik pupuk yang hendak dibangun di Jawa Timur ini disebut Proyek Petrokimia Surabaya yang dibentuk berdasarkan ketetapan MPRS No. II tahun 1960 yang dicantumkan sebagai proyek prioritas dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana Tahap I (1961-1969). Pembangunan proyek ini berdasarkan instruksi Presiden No. 1/Instr/1963 dan dinyatakan sebagai proyek vital sesuai dengan Surat Keputusan Presiden No. 225 Tahun 1963.

Dipilihnya daerah Gresik sebagai lokasi pabrik pupuk merupakan hasil studi kelayakan pada tahun 1962 oleh Badan Persiapan Proyek-Proyek Industri (BP3I) yang dikoordinir Departemen Perindustrian Dasar dan Pertambangan. Pada saat itu, Gresik dinilai ideal dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Cukup tersedianya lahan yang kurang produktif;
- b. Cukup tersedianya sumber air dan aliran Sungai Brantas dan Sungai Bengawan Solo;
- c. Berdekatan dengan daerah konsumen pupuk terbesar, yaitu perkebunan dan petani tebu;
- d. Dekat dengan pelabuhan sehingga memudahkan untuk mengangkut peralatan pabrik selama masa konstruksi, pengadaan bahan baku, maupun pendistribusian hasil produksi melalui angkutan laut;
- e. Dekat dengan Surabaya yang memiliki kelengkapan yang memadai, antara lain tersedianya tenaga-tenaga terampil.

Kontrak pembangunan proyek yang menggunakan fasilitas kredit dari Pemerintah Italia ini berlaku mulai Desember 1964 dan sebagai pelaksanaanya Considit SpA yaitu kontraktor dari Italia. Kontrak pembangunannya ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 1964, dan mulai berlaku pada tanggal 8 Desember 1964. Pembangunan fisiknya dimulai pada awal tahun 1966 dengan berbagai hambatan yang dialami terutama masalah kesulitan pembiayaan sehingga

menyebabkan pembangunan proyek tertunda. Kemudian pembangunan proyek dimulai kembali pada Maret 1970. Pabrik yang memproduksi pupuk ZA berkapasitas 150.000 ton/tahun dan produksi Urea sebanyak 62.600 ton/tahun ini kemudian diresmikan penggunaannya pada tanggal 10 Juli 1972 oleh Presiden Republik Indonesia yang kemudian tanggal dan bulan tersebut diabadikan sebagai hari jadi PT. Petrokimia Gresik. Perubahan status perusahaan:

1. Perusahaan Umum (Perum): PP No. 55/1971;
2. Persero: PP No. 35/1974 jo PP No. 14/1975;
3. Anggota Holding PT. Pupuk Sriwijaya: PP No. 28/1997.

PT. Petrokimia Gresik saat ini menempati lahan kompleks seluas 450 Ha. Area tanah yang ditempati berada di 3 kecamatan yang meliputi 10 desa, yaitu:

- a. Kecamatan Gresik, meliputi: Ngipik, Karangturi, Sukorame, Tlogopojok.
- b. Kecamatan Kebomas, meliputi: Kebomas, Tlogopatut, Randu Agung.
- c. Kecamatan Manyar, meliputi: Roomo Meduran, Tepen, Pojok Pesisir.

Untuk penjelasan lebih detail mengenai area di atas, dapat dilihat pada peta batas administrasi PT. Petrokimia Gresik, dibawah ini:



Gambar 5. Peta Batas Administrasi PT. Petrokimia Gresik

Sumber: PT. Petrokimia Gresik

b. Visi dan Misi

Visi

Visi PT. Petrokimia Gresik adalah “Menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen”.

Misi

1. Mendukung penyediaan pupuk nasional untuk tercapainya program swasembada pangan;
2. Meningkatkan hasil usaha untuk menunjang kelancaran kegiatan operasional dan pengembangan usaha perusahaan;
3. Mengembangkan potensi usaha untuk mendukung industri kimia nasional dan berperan aktif dalam *community development*.

c. Logo Perusahaan

PT. Petrokimia Gresik memiliki lambang/logo, yaitu: seekor kerbau berwarna kuning emas dan daun berwarna hijau berujung lima dengan huruf PG berwarna putih yang terletak di tengah-tengahnya.



Gambar 6. Logo PT. Petrokimia Gresik

Sumber: PT. Petrokimia Gresik

Masing-masing bagian dari lambang tersebut mengandung arti sebagai berikut:

1. Kerbau berwarna kuning emas:
 - a. Dalam bahasa daerah (Jawa) adalah Kebomas, sebagai penghargaan kepada daerah di mana PT. Petrokimia Gresik berdomisili, yaitu di wilayah kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. PT. Petrokimia Gresik saat ini mempunyai areal seluas 450 hektar yang terletak di kecamatan Gresik, Manyar dan Kebomas;

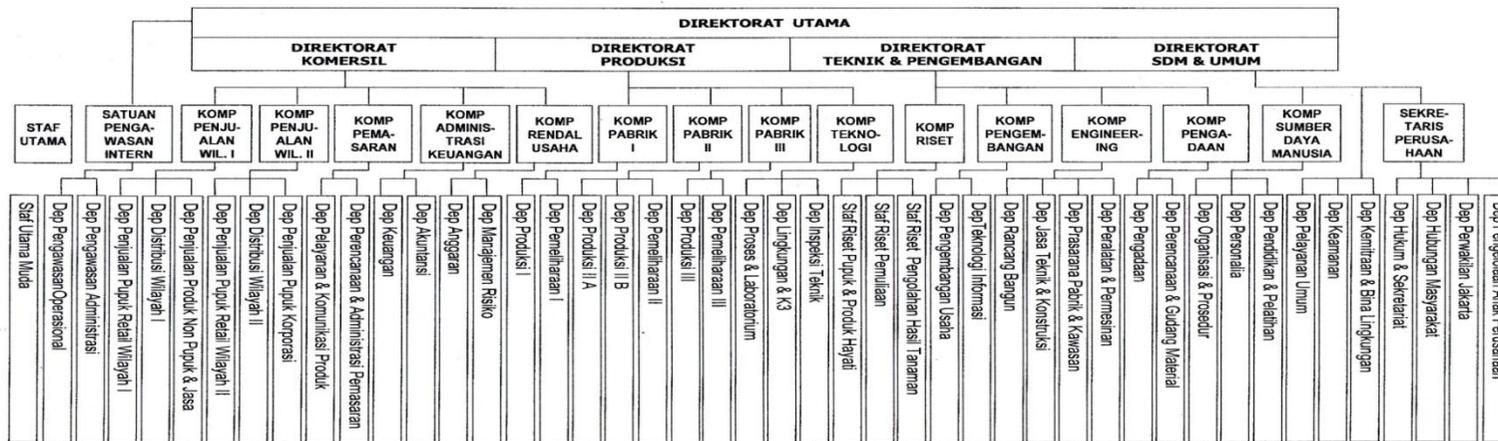
- b. Warna emas sebagai lambang keagungan;
 - c. Kerbau merupakan sahabat petani, yang dipergunakan oleh petani untuk mengolah sawah.
2. Kelopak daun hijau berujung lima:
 - a. Daun berujung lima melambangkan kelima sila dari Pancasila;
 - b. Warna hijau sebagai lambang kesuburan dan kesejahteraan.
 3. Huruf PG berwarna putih:
 - a. PG singkatan dari Petrokimia Gresik;
 - b. Warna putih sebagai lambang bersih dan suci.

d. Budaya Perusahaan

1. Mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja serta pelestarian lingkungan hidup dalam setiap kegiatan operasional;
2. Memanfaatkan profesionalisme untuk peningkatan kepuasan pelanggan;
3. Meningkatkan inovasi untuk memenangkan bisnis;
4. Mengutamakan integritas di atas segala hal;
5. Berupaya membangun semangat kelompok yang sinergistik.

LAMPIRAN
SK DIREKSI NO. 0001/LI.00.01/30/SK/2011
TANGGAL 03 JANUARI 2011

STRUKTUR ORGANISASI PT PETROKIMIA GRESIK



Gambar 7. Struktur Organisasi PT. Petrokimia Gresik
Sumber: Dept. Lingkungan & Keselamatan dan Kesehatan Kerja (LK3) PT. Petrokimia Gresik

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Akuntabilitas Industri dalam *Sustainable Development* pada PT. Petrokimia Gresik

Perusahaan dan lingkungan di sekitarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta saling mempengaruhi. Hubungan yang harmonis diantara keduanya tentu menjadi harapan bersama. Seperti juga PT. Petrokimia Gresik bersama masyarakat sekitar tentu sangat berkepentingan menjaga harmonisasi tersebut. Pertanggungjawaban yang dilaksanakan PT. Petrokimia Gresik dalam hal ini tentu saja bukan hanya sekedar *charity*, namun hal ini telah berkembang menjadi sebuah konsep pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup jangka panjang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Kesenjangan akan menimbulkan dampak nyata bagi perusahaan, yang bisa berbentuk gangguan, hambatan dan kampanye negatif. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dikategorikan dalam *Corporate Social Responsibility* (CSR) yang mana dapat diartikan sebagai suatu konsep bahwa suatu organisasi (khususnya, tapi tidak terbatas pada perusahaan) memiliki kewajiban untuk memperhatikan kepentingan pelanggan, karyawan, pemegang saham, komunitas dan pertimbangan-pertimbangan ekologis dalam segala aspek dari usahanya.

Penguatan terhadap peran perusahaan untuk melakukan tanggung jawab terhadap aspek sosial dan lingkungan merujuk pada *ISO 26000 Guidance Standard on Social Responsibility* yang secara konsisten

mengembangkan tanggung jawab sosial, maka masalah *social responsibility* akan mencakup 7 isu pokok, yaitu: (1) pengembangan masyarakat, (2) konsumen, (3) praktek kegiatan institusi yang sehat, (4) lingkungan, (5) ketenagakerjaan, (6) hak asasi manusia, dan (7) *organizational governance*. Pada prakteknya *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu bentuk tanggung jawab yang dilakukan perusahaan dalam memperbaiki kesenjangan sosial dan kerusakan-kerusakan lingkungan terdekatnya yang terjadi sebagai akibat dari aktivitas operasional perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perlu ditunjang dengan program-program yang sesuai dengan tujuan industri yang telah direncanakan. Melalui program-program yang telah ada kemudian didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai dan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan, diharapkan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran.

a. Program-Program Industri dalam Rangka *Sustainable Development*

Sesuai dengan visinya, PT. Petrokimia Gresik ingin menjadi produsen pupuk dan produk kimia lainnya yang berdaya saing tinggi dan produknya paling diminati konsumen, tentu PT. Petrokimia Gresik akan terus mengembangkan pembangunan industri dalam rangka pencapaian visi tersebut. PT. Petrokimia Gresik memiliki komitmen penuh dalam isu permasalahan lingkungan hidup dan sosial

karena isu permasalahan lingkungan hidup dan sosial menjadi bagian penting dalam pembangunan berkelanjutan serta perumusan strategi maupun kebijakan perseroan. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dalam rangka *sustainable development* diwujudkan dalam program kemitraan dan bina lingkungan. Adapun rincian pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan pada PT. Petrokimia Gresik, sebagai berikut:

1. Kemitraan

Industri kecil mempunyai peranan yang sangat strategis untuk meningkatkan pertumbuhan industri secara keseluruhan dalam perekonomian nasional karena mencakup hampir seluruh lapangan usaha baik yang ada di desa maupun di kota. Dalam hal ini, BUMN meningkatkan upayanya untuk memberdayakan dan mengembangkan kondisi ekonomi sosial masyarakat dan lingkungan sekitarnya melalui program kemitraan dengan usaha kecil dalam rangka untuk mendorong kegiatan dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan serta terciptanya pemerataan pembangunan melalui perluasan lapangan kerja, kesempatan berusaha dan pemberdayaan masyarakat.

Program kemitraan yang dilaksanakan mengacu pada dua tujuan yaitu, *pro-job* dan *pro-growth*. *Pro-job* hanya bisa terjadi bila terjadi pertumbuhan dan pengembangan (*pro-growth*) dan semuanya akan bermuara pada pembinaan, baik itu permodalan,

pasar, teknologi serta informasi. Program kemitraan bisa membantu mengurangi kesenjangan ekonomi di sektor usaha riil bila pertumbuhan usaha kecil menengah bisa lebih tinggi dibandingkan usaha besar dan menengah. Program kemitraan yang dijalankan oleh PT. Petrokimia Gresik diarahkan untuk memperkuat permodalan usaha kecil dan mikro yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan formal. Adapun usaha kecil yang menjadi mitra binaan PT. Petrokimia Gresik bergerak pada sektor:

a) Sektor Industri

Industri yang dimaksud adalah usaha yang melakukan proses perubahan bentuk baik itu pengolahan massal maupun kerajinan, dimana perubahan bentuk itu produk akhir berbeda dari masukan. Adapun mitra binaan antara lain *bakery*, sarung tenun, *handycraft*, mebel, konveksi, tas, anyaman, gerabah, petis udang, senapan, tempe, jilbab, bordir, batik. Bila dirunut data yang ada, kebanyakan industri yang dibiayai mengarah kepada kerajinan dengan aspek manusia yang menonjol. PT. Petrokimia Gresik mengarahkan industri kerajinan karena pertimbangan penyerapan tenaga kerja.

b) Sektor Perdagangan

Mitra binaan perdagangan adalah usaha yang mendapatkan nilai tambah dari perubahan tempat dan waktu.

Ciri usaha perdagangan yaitu tidak terjadi perubahan bentuk dari saat masuk dan keluar (transaksi pembelian). Mitra binaan sektor perdagangan antara lain kios pertanian, bahan bangunan, sembako/kelontong/pracangan, *stationary*, tanaman hias, pewarna batik, perlengkapan olahraga, barang dapur, toko keramik dan perdagangan *snack*.

Alokasi pinjaman terbesar diarahkan untuk perdagangan kios pertanian dengan mempertimbangkan hubungan bisnis antara PT. Petrokimia Gresik dengan mitra binaan. Dengan statusnya sebagai kios penyalur pupuk resmi dapat dipastikan monitoring pinjaman dapat dilakukan dengan baik.

c) Sektor Pertanian

Mitra binaan sektor pertanian meliputi pertanian dengan komoditas jagung, padi, cabai, cabai rawit, cabai merah dan melon. PT. Petrokimia Gresik menetapkan alokasi dana pinjaman pada sektor pertanian terbesar dibandingkan sektor lainnya. Salah satu pertimbangannya adalah pemerintah menetapkan beras sebagai komoditas penting yang perlu dikelola dengan memanfaatkan potensi dalam negeri.

Terkait dengan kebijakan pemerintah berupa swasembada beras mulai tahun 2011 sampai dengan tahun

2014, PT. Petrokimia Gresik melakukan pembinaan kepada kelompok tani yang membudidaya tanaman padi dengan memberikan dana pinjaman untuk pengolahan tanah, pemupukan, pengadaan benih. Pinjaman ini sangat berarti untuk memberikan kesempatan bagi petani untuk melakukan budidaya padi dengan baik.

d) Sektor Peternakan

Sektor peternakan menghasilkan produk untuk memenuhi kebutuhan protein hewani bagi manusia baik dalam bentuk daging, susu dan telur. PT. Petrokimia Gresik menilai adanya peluang usaha di sektor peternakan yang akan membutuhkan dukungan pembiayaan untuk peningkatan usaha. Pendekatan kelompok untuk memudahkan monitoring pengelolaan usaha dan pinjaman juga diterapkan pada sektor peternakan. Pada kenyataannya pinjaman dengan pola kelompok lebih terkelola dengan baik.

e) Sektor Perkebunan

Mitra binaan pada sektor perkebunan ini diperuntukkan untuk usaha budidaya komoditas pertanian non-pangan dan hortikultura. Gula masih dianggap komoditas penting yang dikategorikan sebagai kebutuhan pokok. Untuk itu, PT. Petrokimia Gresik memberikan perhatian pada wilayah yang dikenal sebagai pemasok tebu dengan memberikan sarana

pertanian. Pinjaman tersebut memberikan ruang kepada petani untuk memenuhi kebutuhan dana agar mampu melakukan budidaya perkebunan secara tepat.

f) Sektor Perikanan

Perikanan darat dan laut telah memberikan kontribusi pada pemenuhan kebutuhan protein hewani. Kebijakan pada sektor perikanan darat (payau dan tawar) dikarenakan perlunya produk substitusi untuk produk perikanan laut. Pasokan ikan dari laut menjadi terhambat karena *over fishing* serta cuaca yang semakin sulit diprediksi. Pergeseran pola *supply* ikan pada perikanan darat memberikan ruang pada pertumbuhan usaha ini. Mitra binaan sektor perikanan darat meliputi komoditas ikan lele, bandeng dan gurame.

g) Sektor Jasa

Mitra binaan pada sektor jasa antara lain usaha perbaikan komputer, persewaan *sound system* dan bengkel motor. Bila dibandingkan dengan sektor usaha lain, usaha sektor jasa mendapat alokasi dana paling kecil penyalurannya karena usaha jasa masih relatif baru di masyarakat sehingga memerlukan waktu untuk melihat pola dan siklus usahanya (masih diperlukan waktu untuk mempelajari pola usahanya).

Perkembangan jumlah mitra binaan dalam program kemitraan pada PT. Petrokimia Gresik dari seluruh sektor usaha dapat dilihat pada tabel, sebagai berikut:

Tabel 8. Perkembangan Jumlah Unit Mitra Binaan

No.	Uraian	Thn. 2012	Thn. 2013
1.	Sektor Industri	20	3
2.	Sektor Perdagangan	138	11
3.	Sektor Pertanian	399	71
4.	Sektor Peternakan	159	40
5.	Sektor Perkebunan	22	3
6.	Sektor Perikanan	14	5
7.	Sektor Jasa	4	1
	JUMLAH	756	134

Sumber: Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan

Pertanggungjawaban korporasi juga dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat sebagai nilai inti dengan disertai perbaikan lingkungan hidup dimana manusia beraktivitas, diharapkan nantinya ada manfaat yang didapat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beberapa program bina lingkungan yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik antara lain bantuan bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah dan bantuan pelestarian alam. Disamping kegiatan pemberian bantuan juga ada kegiatan pengelolaan limbah. Adapun rincian program bina lingkungan sebagai berikut:

2. Bina lingkungan

a) Bantuan Bencana Alam

1) Bantuan korban bencana kekeringan

Musim kemarau yang terus menerus terjadi dan berkepanjangan mengakibatkan beberapa desa/kelurahan di kabupaten Gresik mengalami kekeringan dan kesulitan mendapatkan air bersih. Melalui kerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Gresik, PT. Petrokimia Gresik menyerahkan bantuan dana untuk pengadaan air bersih yang senilai 10 juta rupiah.

2) Bantuan korban banjir

PT. Petrokimia Gresik bekerja sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah kabupaten Gresik dan Rumah Sakit (PT. Petro Graha Medika) menunjukkan kepeduliannya dengan membantu sebanyak 411 pasien korban banjir di kecamatan Benjeng dan Kedamean untuk mendapatkan layanan kesehatan. Selain itu bentuk kepedulian lainnya juga diwujudkan dalam penyaluran bantuan sembako sebanyak 1.500 paket dari PT. Petrokimia Gresik kepada korban banjir.

b) Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan

1) Lomba dan pelatihan bahasa Inggris;

Lomba Bahasa Inggris diikuti oleh siswa SD Negeri dari 4 desa/kelurahan sekitar perusahaan. Lomba yang digelar merupakan upaya perusahaan dalam rangka meningkatkan kualitas anak didik dalam menguasai bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Diawali dengan bantuan sarana laboratorium pada tahun 2011 di SDN Karangturi, SDN Tlogopojok, SDN Lumpur dan SDN Roomo dilanjutkan dengan pelatihan bahasa Inggris selama 6 bulan dan diakhiri dengan seminar. Pelatihan ini juga sebagai upaya persiapan memasuki SMP RSBI.

- 2) Bantuan beasiswa Perguruan Tinggi Negeri *Full Cover*; Program Beasiswa *Full Cover* diberikan kepada putra/putri daerah Gresik yang mempunyai prestasi akademik baik, dari proses penjangkaran tersebut diperoleh 6 anak pada tahun 2013. Berikut daftar 6 anak yang beruntung tersebut adalah:

Tabel 9. Daftar Nama Penerima Beasiswa *Full Cover*

No.	Nama	Asal Sekolah	Perguruan Tinggi
1.	Nurul Aini	SMAN 1 Gresik	Tek. Metalurgi ITS
2.	M. Qamaruz Zaman	SMAN 1 Gresik	Tek. Fisika ITS
3.	M. Salman Al Farisi	SMAN 1 Gresik	Tek. Fisika ITS
4.	Kafabi	SMAN 1 Gresik	Tek. Elektro ITS
5.	Sayidah Aisyah	SMAN 1 Kebomas	Eko. Pemb. Unair
6.	M. Dadang Tesna	SMAN 1 Manyar	FMIPA Unair

Sumber: Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan

- 3) Pelatihan mekanik mesin diesel untuk perahu di kelurahan Lumpur kabupaten Gresik;
- 4) Bantuan buku ensiklopedia untuk Sekolah Dasar di 8 desa/kelurahan, Tlogopojok, Roomo, Lumpur, Kroman, Karangpoh, Sukorame, Ngipik dan Karangturi.
- 5) Bantuan seragam dan perlengkapan sekolah untuk siswa dan siswi Sekolah Menengah Pertama di Duduk Sampeyan.
- 6) Pelatihan pemberdayaan masyarakat nelayan; PT. Petrokimia Gresik mencoba untuk memberikan sentuhan agar kehidupan masyarakat dua kelurahan Lumpur dan Kroman yang mayoritas bermata pencaharian sebagai nelayan bisa lebih baik, bertempat di Hotel Saptanawa sebanyak 70 orang ibu-ibu dari 2 kelurahan tersebut diberikan pelatihan pengolahan aneka hasil laut menjadi beberapa produk kemasan seperti abon ikan, kripik ikan, dan ikan kemasan. Kegiatan tersebut merupakan upaya PT. Petrokimia Gresik untuk memberdayakan para istri nelayan, selain tugas sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak-anak, diharapkan juga bisa melakukan kegiatan pengolahan hasil tangkapan suaminya menjadi produk yang bernilai lebih, sehingga bisa membantu meningkatkan ekonomi

keluarga. Selesai pelatihan kepada para peserta, diberikan hibah berupa peralatan untuk memasak.

c) Bantuan peningkatan kesehatan masyarakat

1) Program kampung sehat;

Sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar, PT. Petrokimia Gresik bekerja sama dengan Rumah Sakit (PT. Petro Graha Medika) secara periodik bulanan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada warga di 11 desa/kelurahan yang berada di sekitar perusahaan, yaitu Ngipik, Sukorame, Karangturi, Karangpoh, Tlogopojok, Kroman, Lumpur, Roomo, Trate, Kebungson dan Sukomulyo. Sebanyak 9.020 pasien selama tahun 2013 telah menerima layanan kesehatan gratis tersebut.

2) Program penyuluhan gizi kurang dan gizi buruk bagi balita;

Perkembangan anak balita yang mengalami gizi buruk juga mendapat perhatian dari PT. Petrokimia Gresik, selama tahun 2013 sebanyak 550 anak balita dari 4 desa/kelurahan sekitar perusahaan yaitu, Kroman, Roomo, Tlogopojok dan Lumpur yang mengalami gizi buruk telah mendapat pelayanan kesehatan berupa

penyuluhan kesehatan dan bantuan makanan bergizi berupa susu dan roti setiap minggu.

3) Bantuan pengasapan nyamuk (*fogging*);

Sebagai wujud tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat sekitar, PT. Petrokimia Gresik memberikan bantuan penyemprotan *fogging* untuk rumah-rumah masyarakat sekitar PT. Petrokimia Gresik, penyemprotan *fogging* tersebut diberikan kepada desa Tlogopojok, sebanyak 1.169 rumah. Bantuan tersebut merupakan upaya untuk menutup rantai penyebaran penyakit demam berdarah di lingkungan pemukiman padat penduduk.

d) Bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum

1) Membina bank sampah;

Untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan khususnya sampah, PT. Petrokimia Gresik mengucurkan dana 250 juta rupiah untuk pengelolaan sampah dengan membangun Bank Sampah Meduran Bersatu “Bersih, Elok, Ramah, Santun, Aman, Terampil, dan Unggul” di desa Roomo Gresik. Peresmian bank sampah ini dilakukan oleh Direktur SDM dan Umum PT. Petrokimia Gresik Koeshartono bersama Bupati Gresik Sambari Halim Radianto. Selain lingkungan tampak bersih dan sehat, pengelolaan

sampah ini juga bernilai ekonomis. Dalam 6 bulan pertama beroperasi, Bank Sampah Meduran Bersatu berhasil meraup omset 30 juta rupiah.

2) Pembuatan Sumur Resapan;

Bapak HD selaku Kepala Bagian Operasional Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, menjelaskan:

“Sumur resapan ini penting fungsinya untuk menampung air hujan. Air hujan apabila tidak ditampung akan kembali langsung ke laut, akan tetapi bila dibuatkan sumur resapan maka air itu bisa masuk ke dalam. Pembuatannya pun dipilih pada daerah yang keadaan tanahnya cekung dan sering terjadi banjir, seperti di desa Yosowilangun. Selain itu sumur resapan ini digunakan untuk menyimpan cadangan air” (wawancara pada tanggal 14 April 2014).

Berdasarkan wawancara di atas, tanggung jawab PT. Petrokimia Gresik terhadap lingkungan hidup, khususnya pada daerah-daerah yang kering dan tandus diwujudkan dengan cara pembuatan sumur resapan. Pembuatan sumur resapan dilakukan di wilayah yang sering banjir. Sumur resapan berfungsi untuk menyimpan air hujan yang dapat dimanfaatkan masyarakat sehari-hari agar sumber cadangan air tidak cepat habis.

3) Bantuan pembuatan sumur bor;

Bapak HD selaku Kepala Bagian Operasional Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, menuturkan:

“Kami membantu untuk pembuatan sumur bor di kelurahan Lumpur. Pembuatan sumur bor ini difungsikan sebagai pemenuhan air bersih di daerah tersebut. Sumur bor ini berbeda dengan sumur resapan. Kalau sumur bor ini difungsikan untuk pengambilan air yang terus menerus. Nah untuk penyeimbangannya kita bangun sumur resapan sebagai tempat untuk cadangan air” (wawancara pada tanggal 21 April 2014).

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan pembuatan sumur bor tentu akan didapat manfaat lainnya, yaitu meminimalisir kekurangan stok air bersih karena pengambilan yang terus menerus. Untuk itu, perlu dilakukan upaya pencegahan salah satunya dengan membuat sumur resapan sebagai upaya penyeimbang dan untuk stok cadangan air.

- 4) Bantuan bedah rumah, renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 20 rumah di desa/kelurahan Tlogopojok, Roomo, Lumpur, Kroman, Karangpoh, Sukorame, Ngipik dan Karangturi.
 - 5) Bantuan pembuatan tambatan perahu nelayan di kelurahan Lumpur.
 - 6) Bantuan perbaikan dan pembangunan gedung sekolah di desa/kelurahan Tlogopojok, Roomo, Lumpur, Kroman, Karangpoh, Sukorame, Ngipik dan Karangturi.
- e) Bantuan sarana ibadah
- 1) Renovasi masjid dan musholla;

Datangnya bulan Ramadhan sangat dinanti masyarakat Gresik yang dikenal sangat agamis, masjid dan musholla menjadi pusat perhatian masyarakat. PT. Petrokimia Gresik sebagai bagian dari masyarakat Gresik menyambut suasana itu dengan memberikan bantuan dana untuk perbaikan 13 masjid dan 62 musholla yang berada di 8 desa/kelurahan sekitar PT. Petrokimia Gresik, yaitu Tlogopojok, Roomo, Lumpur, Kroman, Karangpoh, Sukorame, Ngipik dan Karangturi.

2) Bantuan sembako gratis menjelang lebaran sebanyak 2.179 paket untuk warga di 8 desa/kelurahan sekitar perusahaan yaitu, Tlogopojok, Roomo, Lumpur, Kroman, Karangpoh, Sukorame, Ngipik dan Karangturi.

f) Bantuan pelestarian alam

1) Bantuan 7.000 bibit pohon mangga, trembesi, mahoni, tanjung, nangka, jambu air dan jambu biji merah untuk kelurahan Ngipik.

2) Bantuan Bibit Tanaman Hortikultura;

10.000 bibit tanaman hortikultura terdiri dari (tomat, kubis, cabai besar, cabai kecil, jeruk purut dan terong) beserta polibag dan media tanamnya diberikan kepada para penggerak PKK di 8 desa/kelurahan sekitar perusahaan yaitu, Tlogopojok, Roomo, Lumpur,

Kroman, Karangpoh, Sukorame, Ngipik dan Karangturi. Bantuan tersebut diberikan PT. Petrokimia Gresik sebagai bagian dari kegiatan edukasi pemanfaatan lahan sempit (*urban farming*) di pemukiman perkotaan yang padat penduduk. Bantuan tersebut merupakan upaya PT. Petrokimia Gresik untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup serta meningkatkan kesehatan masyarakat dengan menanam sendiri kebutuhan dapur melalui pemanfaatan celah-celah pekarangan rumah.

3. Pengelolaan Limbah

a) Pengelolaan limbah melalui Pendekatan Teknologi;

Memanfaatkan teknologi terbaru guna pencegahan dan pengendalian potensi pencemaran, dikaitkan dengan peningkatan efisiensi dan daur ulang.

b) Pemilihan *design*/teknologi yang ramah lingkungan;

Kebijakan strategis dalam pengembangan industri adalah penggunaan dan pemanfaatan *design*/teknologi yang ramah lingkungan. Tujuannya untuk menghasilkan *output* yang tidak mencemari lingkungan hidup, sehingga sesuai dengan azas industri berwawasan lingkungan.

c) Mengoperasikan unit produksi dengan efisiensi tinggi;

Mengoptimalkan proses produksi yang menghasilkan energi atau produk dengan inovasi baru dan menciptakan perubahan dalam proses produksi sehari-hari.

- d) Mengoperasikan unit pengendali dan pengolah limbah, serta melakukan pemantauan rutin sebagai sarana pengendalian;

Pengendalian dan pengolahan merupakan salah satu cara untuk meminimalisir bahan-bahan berbahaya yang masih tercampur pada limbah sebelum dibuang. Pemantauan rutin dilakukan sebagai upaya pengendalian agar limbah yang dibuang tidak berdampak negatif terhadap lingkungan.

- e) Melakukan upaya minimalisasi buangan/limbah;

Meminimalisir segala bentuk buangan dengan cara (4R), yaitu mengurangi (*reduce*) penggunaan bahan-bahan berbahaya yang dapat merusak lingkungan, mendaur ulang (*recycle*) buangan atau limbah, menggunakan kembali (*reuse*) hasil limbah untuk digunakan kembali dalam proses produksi, pengembalian (*recovery*) komponen-komponen yang masih bermanfaat melalui proses kimia dan harus sesuai dengan baku mutu yang sudah ditetapkan.

- f. Minimasi limbah dilakukan sejak dari penyediaan bahan baku, proses maupun penanganan produk;

- g. Minimasi dilakukan untuk semua jenis buangan baik padat, cair maupun gas;

- h. Minimasi dilakukan terus menerus secara berkelanjutan untuk menekan buangan dan biaya produksi;
- i. Minimasi dilakukan dengan cara mencegah limbah dari sumbernya, memanfaatkan limbah baik *on site* maupun *off site*;
- j. Limbah yang masih lolos (sudah minimal) diolah di tempat pengolahan limbah yang sudah disediakan. Bapak SR selaku Staf Muda Departemen LK3 PT. Petrokimia Gresik, menjelaskan:

“Minimasi limbah ini dilakukan dengan tujuan yang bermacam-macam, salah satu tujuannya untuk menekan semaksimal hasil buangan atau limbah, baik itu limbah padat, cair atau gas. Dengan menekan buangan limbah tentu saja untuk mereduksi dampak negatif yang ditimbulkan dan yang kemungkinan bisa berpengaruh terhadap lingkungan. Walaupun sudah ada program minimasi ini tentu saja tidak mengesampingkan aturan-aturan yang lain misalnya undang-undang tentang baku mutu limbah yang ditetapkan oleh pemerintah. Minimasi limbah ini tetap dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan baku mutu limbah. Baku mutu limbah adalah aturan yang mengatur ukuran batas atau jumlah unsur pencemar yang diperbolehkan dibuang ke lingkungan” (wawancara pada tanggal 8 April 2014).

- k. Peninggian Cerobong Asap/*Stack*. Bapak SR selaku Staf Muda Departemen LK3 PT. Petrokimia Gresik, menuturkan:

“Peninggian cerobong ini wajib diprioritaskan. Buangan emisi gas atau asap ke langit bisa saja mempengaruhi kualitas udara di sekitar, walaupun sudah semaksimal mungkin dilakukan antisipasi dengan cara penyaringan sebelum gas atau asap keluar dari cerobong. Peninggian cerobong dimaksudkan agar gas atau asap tidak sampai mengganggu masyarakat yang tinggal di sekitar industri maupun mengganggu fungsi lingkungan hidup. Dengan

cerobong yang makin tinggi, diharapkan gas atau asap akan melalui proses penyaringan yang lebih panjang dan sisanya yang keluar dapat terurai oleh oksigen dengan baik” (wawancara pada tanggal 8 April 2014).

l. *Degassing* dan *Scrubbing*;

Proses penyaringan kotoran seperti partikel debu atau sisa pembuangan dari hasil produksi agar debu tersebut tidak terlalu berterbangan dan mencemari lingkungan serta sebagai alat untuk pengendali polusi udara.

m. Segregasi air limbah;

Segregasi air limbah adalah pemisahan jenis aliran limbah menurut jenisnya sehingga dapat mempermudah proses pembuangannya. Contohnya seperti memisahkan air limbah dan air sanitasi/hujan sebelum dibuang ke laut.

Metode-metode dalam pengelolaan limbah di atas merupakan salah satu cara pertanggungjawaban PT. Petrokimia Gresik untuk menjaga kelestarian alam kaitannya dengan pengelolaan lingkungan hidup. Penerapan metode pengelolaan limbah didasarkan dengan adanya Program Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Program Peringkat Kinerja Perusahaan adalah instrumen kebijakan alternatif untuk meningkatkan tingkat penataan perusahaan dan untuk mengurangi tingkat pencemaran perusahaan melalui penyebaran tingkat kinerja penataan perusahaan secara nasional. Program Peringkat Kinerja Perusahaan bukan pengganti instrumen penegakan hukum melainkan hanya

instrumen pelengkap. Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan dilakukan terhadap semua jenis usaha dan/atau kegiatan yang mempunyai potensi dapat menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup. Pelaksanaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan yang tersedia. Program Peringkat Kinerja Perusahaan bersifat wajib karena ditunjuk langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Untuk lebih jelas mengenai nilai Program Peringkat Kinerja Perusahaan, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 10. Nilai Program Peringkat Kinerja Perusahaan/PROPER

Warna	Keterangan
Emas	Telah secara konsisten menunjukkan keunggulan lingkungan (<i>environmental excellency</i>) dalam proses produksi dan/atau jasa, melaksanakan bisnis yang beretika dan bertanggung jawab terhadap masyarakat.
Hijau	Telah melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan, melakukan Sistem Manajemen Lingkungan (SML), pemanfaatan sumber daya dan upaya tanggung jawab sosial (<i>CSR/Community development</i>) dengan baik.
Biru	Telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Merah	Upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan belum sesuai dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dalam tahapan melaksanakan sanksi administrasi.
Hitam	Sengaja melakukan perbuatan atau melakukan kelalaian yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan serta pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak melaksanakan sanksi administrasi.

Sumber: Departemen Lingkungan & Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Kaitannya dengan Program Peringkat Kinerja Perusahaan, PT.

Petrokimia Gresik wajib mengikuti karena termasuk dalam industri

besar yang berpotensi mencemari lingkungan hidup. Penilaian meliputi bidang pengelolaan limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun), pengelolaan limbah cair, pengelolaan emisi udara. Salah satu manfaat keikutsertaan dalam Program Peringkat Kinerja Perusahaan bagi PT. Petrokimia Gresik sebagai alat promosi perusahaan ramah lingkungan serta untuk meningkatkan *image* perusahaan. Berikut Penilaian Program Peringkat Kinerja Perusahaan PT. Petrokimia Gresik:

Tabel 11. Hasil Penilaian PROPER PT. Petrokimia Gresik

No.	Tahun	Peringkat
1.	2006 - 2007	Merah
2.	2007 - 2009	Biru (Minus)
3.	2009 - 2010	Biru
4.	2010 - 2011	Biru
5.	2011 - 2012	Biru
6.	2012 - 2013	Biru

Sumber: Departemen Lingkungan & Keselamatan dan Kesehatan Kerja

b. Sarana dan Prasarana Industri dalam Rangka *Sustainable Development*

Program kemitraan dan bina lingkungan sebagai pertanggungjawaban industri yang telah dibuat perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Berdasarkan penelitian dan observasi, diperoleh data sebagai berikut:

1. Sarana Pokok Industri

Sarana pokok industri pada PT. Petrokimia Gresik meliputi sarana pengolahan limbah industri. Sarana pengolahan limbah industri adalah semua fasilitas yang digunakan suatu industri untuk mengolah limbah. Berdasarkan penelitian dan observasi, diperoleh informasi tentang sarana pengolahan limbah industri, sebagai berikut:

- a) Gas *Scrubber/Dust Collector* adalah alat yang digunakan untuk menyaring kotoran seperti debu atau sisa pembuangan emisi gas dari hasil produksi agar debu tersebut tidak berterbangan dan mencemari lingkungan sekitarnya.
- b) *Electrostatic Precipitator* (EP) merupakan alat yang hampir sama fungsinya dengan *Scrubber* yaitu alat yang digunakan untuk menyaring debu. Bedanya untuk *Electrostatic Precipitator* ini menggunakan mekanisme magnet.
- c) *Cyclonic Separator/Bagian Filter*, adalah alat untuk memisahkan materi debu atau gas yang akan dibuang berdasarkan perbedaan massa jenis, ukuran dan bentuk.
- d) Kolam untuk *Biological Treatment*;

Teknik pengolahan dengan menggunakan proses biologi. Proses ini menggunakan jenis bakteri khusus yang ditempatkan pada kolam-kolam khusus untuk mengolah kadar kimia tertentu. Bakteri ini diberi makan Gula dan Nitrogen agar tetap hidup. Kolam pengolahan dengan proses biologi terdapat di Pabrik Ammurea.

e) Kolam untuk *Chemical Treatment*;

Teknik pengolahan dengan proses kimiawi, yaitu dengan menggunakan kolam untuk pengendapan solid-solid kimia sebelum dibuang ke laut, seperti kolam *Effluent Treatment*, kolam *Neutralizer*, dan kolam *Equalizer*.

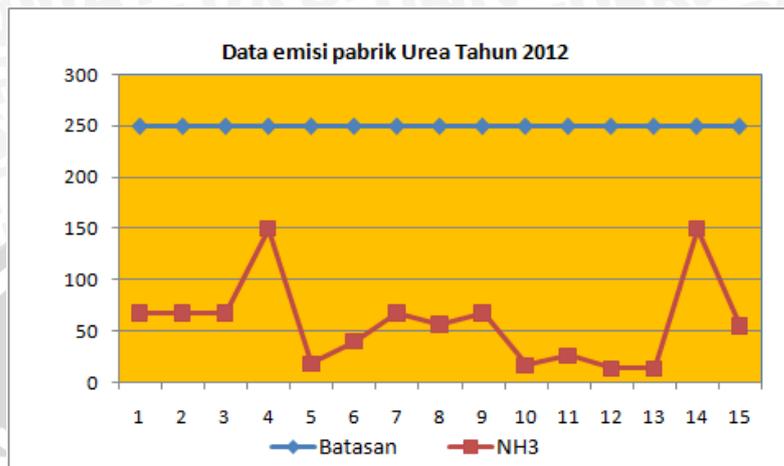
f) Kolam Penampungan Sementara/*Disposal Area*;

Disposal Area berfungsi untuk tempat penampungan sementara hasil buangan atau limbah padat sebelum diolah dan dimanfaatkan lagi untuk proses industri. Bapak SR selaku Staf Muda Departemen LK3 PT. Petrokimia Gresik, menjelaskan:

“Saat ini beberapa pabrik sudah dilengkapi dengan sarana pengolah limbah gas, cair dan padat sesuai dengan teknologi terbaru saat konstruksi pabrik. Secara umum limbah yang dibuang telah memenuhi baku mutu emisi sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2009 dan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 133 tahun 2004” (wawancara pada tanggal 8 April 2014).

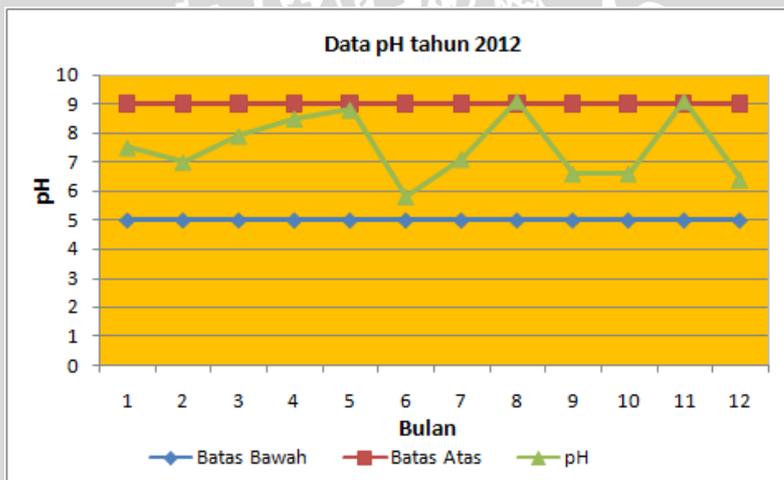
Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup diwujudkan dengan sarana pengelola limbah yang digunakan dalam proses produksi. Pemenuhan sarana pengolah limbah industri di atas merupakan salah satu faktor penting karena berhubungan langsung dengan dampak buruk yang mungkin ditimbulkan.

Untuk lebih jelasnya, berikut ini ditampilkan data hasil limbah yang diproses menggunakan sarana pengolah limbah industri:



Gambar 8. Data Hasil Emisi Tahun 2012

Sumber: Departemen LK3 PT. Petrokimia Gresik

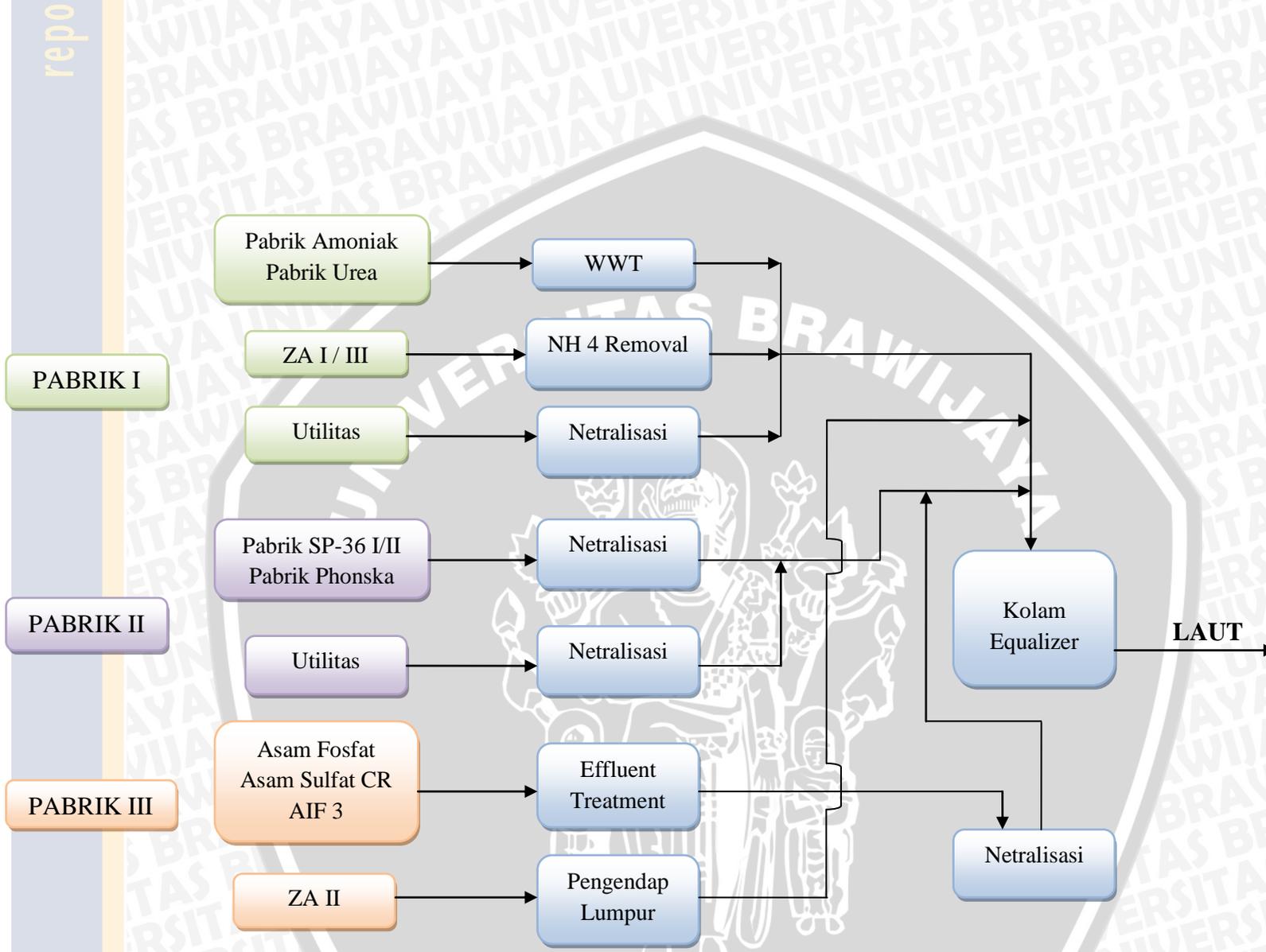


Gambar 9. Data Hasil pH Limbah Cair Tahun 2012

Sumber: Departemen LK3 PT. Petrokimia Gresik

Dari data di atas menunjukkan bahwa semua buangan emisi gas masih jauh di bawah ambang batas normal. Begitu pula untuk hasil buangan limbah cair, data menunjukkan bahwa buangan limbah cair masih terkontrol dan tidak melebihi ambang batas normal. Berikut ini ditampilkan gambar rangkaian sarana pengolah industri pada PT. Petrokimia Gresik:





Gambar 10. Sarana Pengolah Limbah Industri

Sumber: Departemen Lingkungan & Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. Petrokimia Gresik

2. Sarana Penunjang Industri

Untuk menunjang program kemitraan dan bina lingkungan, perusahaan menyediakan fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh karyawan/karyawati beserta keluarganya. Sebagian dari fasilitas ini juga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Sarana/fasilitas penunjang tersebut meliputi:

- a) Sarana kerohanian, pendidikan, sosial dan kesehatan:
 - 1) Masjid Nurul Jannah;
 - 2) Panti Asuhan Nurul Jannah;
 - 3) Taman Pendidikan Al-Qur'an;
 - 4) Taman Kanak-kanak dan Play Group (TK PIKPG);
 - 5) Sekolah Dasar;
 - 6) Beasiswa *Full Cover*;
 - 7) Rumah Sakit (PT. Petro Graha Medika).
- b) Kompleks sarana olahraga, meliputi:
 - 1) Stadion Tri Dharma;
 - 2) Lapangan tenis;
 - 3) Gedung olahraga/serbaguna;
 - 4) *Fitness Center*;
 - 5) *Jogging Track*;
 - 6) Lapangan bola;
 - 7) Kolam renang;
 - 8) Lapangan golf.

c) Koperasi Keluarga Karyawan PT. Petrokimia Gresik

Berdiri sejak tahun 1984. Selain untuk anggota, beberapa unit usaha yang dikelola juga melayani umum, seperti unit toko, SPBU, apotek, toko bahan bangunan, toko olah raga (K-sport), bengkel & unit bengkel & suku cadang, dan air minum kemasan (air K). Unit usaha lainnya meliputi:

- 1) Kantin;
- 2) Usaha patungan;
- 3) Unit simpan pinjam.

d) Penyediaan Perumahan Karyawan

Selain penyediaan perumahan dinas untuk pejabat, PT. Petrokimia Gresik juga menyediakan perumahan bagi karyawan/karyawati dengan fasilitas kredit yang dikelola oleh Yayasan Petrokimia Gresik. Sampai dengan akhir tahun 2007, perumahan yang disediakan oleh Yayasan Petrokimia Gresik telah mencapai 3.384 rumah, dan berlokasi di desa Pongangan, desa Suci, desa Sukomulyo dan desa Krembangan kabupaten Gresik.

3. Prasarana Industri

Prasarana industri adalah fasilitas pendukung yang digunakan untuk membantu fungsi dari fasilitas utama yang digunakan suatu industri dalam mencapai tujuan. Dalam hal ini yang termasuk prasarana industri adalah:

a) Sumur Resapan;

Sumur resapan berfungsi sebagai tempat resapan air hujan agar dapat dimanfaatkan untuk cadangan air di beberapa daerah. Sumur resapan dibuat di beberapa daerah dengan kondisi wilayah yang kering dan tandus serta pada daerah yang sering terjadi bencana banjir.

b) Sumur Bor;

Pemenuhan air bersih sangat penting peranannya bagi kehidupan sehari-hari. Sumur bor dapat dimanfaatkan bagi masyarakat sekitar perusahaan untuk pemenuhan air bersih.

c) Kebun Percobaan;

Kebun percobaan (Buncop) sebagai tempat melakukan penelitian hasil uji coba pupuk yang diproduksi oleh PT. Petrokimia Gresik kepada tanaman sebelum pupuk dipasarkan. Uji coba ini berguna untuk mengetahui sejauh mana pupuk dapat meningkatkan produktivitas tanaman. Kebun percobaan juga dilengkapi dengan laboratorium riset. Selain itu kebun percobaan juga sebagai pusat penelitian produk-produk inovasi, difungsikan sebagai tempat percontohan pemeliharaan tanaman dan ternak, sumber informasi pertanian, koleksi tanaman, indikator lingkungan, media belajar dan studi wisata bagi pelajar, petani dan masyarakat, serta sarana pendidikan dan latihan.

d) Kartu Jaminan Kesehatan Karyawan

Sebagai industri besar, PT. Petrokimia Gresik tidak lantasi acuh terhadap kesehatan seluruh karyawan/karyawatnya. Bentuk tanggung jawab PT. Petrokimia Gresik terhadap karyawan/karyawatnya diwujudkan dalam bentuk kartu jaminan kesehatan yang bisa digunakan seluruh keluarga karyawan/karyawati untuk berobat tanpa dipungut biaya hingga pensiun.

c. Menumbuhkan *Partnership* dalam Rangka *Sustainable Development*

PT. Petrokimia Gresik sebagai anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia *Holding Company* (Persero) memiliki komitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam pembinaan usaha kecil, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Demi terciptanya komitmen tersebut, PT. Petrokimia Gresik melakukan *partnership* dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan program-program yang telah dibuat. Bentuk *partnership* PT. Petrokimia Gresik yang dilakukan dengan beberapa pihak lain, antara lain yaitu:

1. *Partnership* dengan Badan Lingkungan Hidup kabupaten Gresik dan Propinsi Jawa Timur.
 - a) Program Gresik Berhias “Bersih Hijau dan Asri”;

Program *partnership* ini dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dengan Badan Lingkungan Hidup kabupaten Gresik. Kegiatan yang dilakukan yaitu pembagian bibit tanaman dengan jumlah 1000 batang dan pembagian pupuk NPK dan Petrogladiator dengan jumlah masing-masing 300 bungkus. Tak hanya itu, kegiatan lainnya pembagian tas pengganti kresek yang bisa dipakai berulang kali sehingga dapat mengurangi penggunaan tas kresek yang kurang ramah untuk lingkungan hidup.

b) Pameran Lingkungan Hidup;

Badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur melaksanakan kegiatan pameran lingkungan hidup yang digelar di Semen Gresik. Pada kesempatan itu PT. Petrokimia Gresik turut andil dalam pameran tersebut dengan membuka stan berisi bibit tanaman dengan jumlah 1000 batang yang nantinya akan diserahkan kepada pihak panitia untuk dibagikan kepada pengunjung. Selain itu, stan juga menyediakan kaos dan topi hingga 500 buah, nasi kotak dan kue sebanyak 200 kotak yang dibagikan kepada pengunjung.

2. *Partnership* dengan beberapa Dinas/Instansi di Pemerintah Daerah kabupaten Gresik

a) *Partnership* dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik dalam program sekolah adiwiyata. Program dilakukan

dengan cara penyaluran bantuan bibit pohon mangga, sukun, mahoni, tanjung, nangka, jambu air dan jambu biji merah sebanyak 51.000 bibit.

- b) *Partnership* dengan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Gresik dengan kegiatan bantuan 10.000 bibit pohon mangga, trembesi, mahoni, tanjung, nangka, jambu air dan jambu biji merah.
- c) Bantuan 5.000 bibit pohon mangga, nangka, sirsat, jambu air dan jambu biji merah kepada Bupati Gresik dalam rangka Hari Lingkungan Hidup pada kegiatan *Car Free Day*.
- d) *Partnership* dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dalam membantu korban bencana alam banjir beberapa desa/kelurahan di kabupaten Gresik.
- e) *Partnership* dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan kabupaten Gresik. Berdasarkan observasi dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, serta penulis ikut serta dalam kegiatan pelatihan yang dilaksanakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan untuk usaha kecil menengah, dalam hal ini pengerajin keripik tempe kecamatan Kebomas yang dilaksanakan di Balai RW Kebon Dalem pada tanggal 17 April 2014 adalah:
 - 1) Pelatihan pengolahan limbah industri;

Pelatihan guna pemanfaatan limbah yang dihasilkan proses produksi agar bisa digunakan kembali untuk produksi yang lainnya.

2) Pelatihan kewirausahaan dan pembekalan motivasi;

Pelatihan kewirausahaan ini diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki di desa Sekarkurung, yaitu sebagai sentra penghasil keripik tempe. Pembekalan motivasi kepada pengerajin tempe ini dilakukan dengan mengajak pihak konsultan. Bapak IY selaku Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik, menjelaskan:

“Di Gresik ini sangat banyak usaha kecil yang berkembang. Apalagi usaha kecil yang bergerak di bidang pengolahan makanan, contohnya seperti keripik tempe. Di Gresik banyak sentra penghasil keripik tempe namun *image*-nya masih kalah dengan keripik tempe malang, padahal ada beberapa hasil produksi keripik kita yang dikirim ke malang dan kemudian diberi label di malang, itu kan sangat merugikan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi para pengerajin keripik tempe agar jangan mau kalah dengan hasil produksi daerah lain” (wawancara pada tanggal 16 April 2014).

Berdasarkan wawancara di atas, pelatihan-pelatihan dan pembekalan motivasi untuk usaha kecil seperti di atas wajib diberikan secara rutin dan berkelanjutan untuk semua usaha kecil menengah. Harapannya hal ini bisa memberikan ilmu baru tentang pengolahan suatu usaha

kecil dan selain itu memberikan lecutan motivasi kepada para pengerajin keripik tempe agar tidak stagnan pada kondisi mereka yang seperti itu terus menerus yang akan menyebabkan mereka tenggelam dalam kompetisi peningkatan usaha dengan daerah lain.

3) Penawaran untuk menjadi mitra binaan;

Program ajakan untuk menjadi mitra binaan dilakukan dengan menggandeng PT. Petrokimia Gresik sebagai induk pembina usaha kecil. Tujuannya untuk mengajak para pengerajin keripik tempe di kabupaten Gresik yang membutuhkan pinjaman modal untuk usahanya. Selain itu, nantinya pihak PT. Petrokimia Gresik akan memberikan pelatihan keterampilan guna meningkatkan hasil produksi usaha kecil tersebut agar usahanya bisa terus berkembang pesat dan berdiri secara mandiri.

3. *Partnership* dengan Rumah Sakit (PT. Petro Graha Medika).

a) Kampung sehat;

Sebagai wujud tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat sekitar, PT. Petrokimia Gresik bekerja sama dengan Rumah Sakit (PT. Petro Graha Medika) secara periodik bulanan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis kepada warga di 17 desa yang berada di sekitar perusahaan,

sebanyak 9.020 pasien selama tahun 2013 telah menerima layanan kesehatan gratis tersebut.

b) Bantuan bagi anak gizi buruk;

Perkembangan anak balita yang mengalami gizi buruk juga mendapat perhatian dari PT. Petrokimia Gresik, selama tahun 2013 sebanyak 550 anak balita dari 4 desa sekitar perusahaan yang mengalami gizi buruk telah mendapat pelayanan kesehatan berupa penyuluhan kesehatan dan bantuan makanan bergizi berupa susu dan roti setiap minggu.

c) Bantuan operasi katarak;

Keluhan para lansia akan gangguan penglihatan akibat katarak tidak luput mendapat perhatian PT. Petrokimia Gresik, bekerja sama dengan Rumah Sakit (PT. Petro Graha Medika) sebanyak 100 orang penderita katarak telah mendapat pelayanan operasi katarak gratis yang dilaksanakan dua kali dalam setahun.

d) Sunatan Umum

Kegiatan yang diselenggarakan setiap tahun sekaligus merupakan rangkaian kegiatan HUT PT. Petrokimia Gresik ini banyak diminati anak-anak karena dilaksanakan bertepatan pada hari libur sekolah, bekerjasama dengan Rumah Sakit (PT. Petro Graha Medika) sebanyak 320 anak

dari masyarakat sekitar perusahaan mendapat layanan sunatan gratis.

e) Bantuan korban banjir kabupaten Gresik;

Curah hujan yang tinggi menyisakan derita bagi korban banjir warga desa/kelurahan di beberapa kecamatan di kabupaten Gresik. PT. Petrokimia Gresik bekerjasama dengan Rumah Sakit (PT. Petro Graha Medika) turut ambil bagian dalam rangka acara “Peduli Gresik”, sebanyak 411 pasien korban banjir di kecamatan Benjeng dan Kedamean mendapat layanan kesehatan.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Industri dalam Sustainable Development pada PT. Petrokimia Gresik

a. Faktor Pendukung

1) Partisipasi Masyarakat Sekitar Industri

PT. Petrokimia Gresik mempunyai tanggung jawab besar terhadap sekitarnya. Salah satu pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam program bina lingkungan yang salah satu fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat. Suksesnya program bina lingkungan oleh PT. Petrokimia Gresik tidak terlepas dari peran serta aktif dari masyarakat sekitar dalam memahami segala macam bentuk bantuan yang diberikan. Bapak HD selaku Kepala

Bagian Operasional Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, menjelaskan:

“*Alhamdulillah*, selama ini kami diterima dengan baik oleh masyarakat Gresik sewaktu memberikan segala jenis bentuk bantuan. Masyarakat sekitar industri khususnya sangat menghargai pemberian bantuan yang kami sampaikan sebagai wujud timbal balik antara industri dengan lingkungan sekitar. Contohnya, seperti kami mengadakan pelatihan bagi istri-istri nelayan, yang mendukung dan hadir pada pelatihan tersebut sangat banyak, dari kegiatan tersebut terlihat bagaimana antusiasme masyarakat Gresik terhadap program yang kami lakukan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan” (wawancara pada tanggal 21 April 2014).

2) Tersedianya Dana

Bentuk pertanggungjawaban industri dalam rangka *sustainable development* diwujudkan dalam program kemitraan dan bina lingkungan. Berkaitan dengan hal tersebut, PT. Petrokimia Gresik khusus menyiapkan anggaran dana untuk program kemitraan dan bina lingkungan. Bapak HD selaku Kepala Bagian Operasional Departemen KBL PT. Petrokimia Gresik, menjelaskan:

“Khusus untuk dana kegiatan kemitraan dan bina lingkungan ini kami menyiapkan anggaran dana yang berasal dari laba perusahaan. Untuk dana program kemitraan mengambil 1 sampai 2 persen dari keuntungan perusahaan. Begitu juga untuk dana program bina lingkungan diambilkan dari keuntungan perusahaan sebesar 1 sampai 2 persen juga” (wawancara pada tanggal 21 April 2014).

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dana yang disiapkan untuk program kemitraan dan bina

lingkungan berasal dari 1-2% keuntungan perusahaan. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membantu usaha kecil menengah sebagai mitra binaan agar lebih mandiri dalam menjalankan proses usahanya serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan kualitas lingkungan hidup di sekitar wilayah perusahaan. Jumlah dana untuk program kemitraan dengan usaha kecil menengah pada tahun 2013 sebesar Rp. 15.028.496.448, sedangkan untuk dana program bina lingkungan pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.298.811.966.

3) Adanya Regulasi

Pertanggungjawaban industri dalam rangka mendukung *sustainable development* didasari dengan adanya regulasi yang telah dibuat. Regulasi dijadikan pedoman dasar untuk melakukan bentuk pertanggungjawaban terhadap sekitar. Adapun regulasi yang mendasari dilaksanakannya program kemitraan dan bina lingkungan oleh PT. Petrokimia Gresik, antara lain sebagai berikut:

- a) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
- b) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- c) Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;

- d) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- e) Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air;
- f) Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
- g) Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

Sumber: Departemen Kemitraan dan Bina Lingkungan

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Lahan

Bapak SR selaku Staf Muda Departemen LK3 PT. Petrokimia Gresik, menjelaskan:

“Kaitannya dengan penataan ruang terbuka hijau, di Petrokimia Gresik saat ini masih kurang lahan untuk hal tersebut. Masih kurang beberapa persen dari jumlah yang sudah diregulasikan untuk ruang terbuka hijau, oleh karena itu dibuatlah program untuk mengatasi masalah itu. Selain itu juga dalam hal pengembangan industri jadi seperti pembangunan proyek-proyek baru yang pastinya akan memakan lahan” (wawancara pada tanggal 8 April 2014).

Penggunaan lahan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan karena lahan memiliki keterbatasan. Bentuk penggunaan lahan salah satunya oleh aktivitas pembangunan industri. Keberadaan industri di suatu tempat bergantung pada faktor lingkungan yang akan menentukan keberlangsungan proses industri. Penggunaan lahan yang diakibatkan oleh aktivitas industri harus

didasari juga dengan pemanfaatan lahan untuk ruang terbuka hijau. Hal ini selaras dengan prinsip kawasan berwawasan lingkungan yaitu sebagai cara suatu industri untuk tetap menjaga fungsi lingkungan hidup di tengah proses kegiatan produksinya, oleh sebab itu, PT. Petrokimia Gresik wajib melakukan penataan ruang sesuai kebutuhan dan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap peningkatan daya dukung lingkungan agar proses industri tetap berjalan secara berkelanjutan.

2) **Kurangnya Pemerataan Revitalisasi Teknologi**

Bapak SR Selaku Staf Muda Departemen LK3 PT. Petrokimia Gresik, menjelaskan:

“Belum ratanya revitalisasi teknologi di Petrokimia disebabkan karena butuh waktu yang lama untuk penggantian alat atau teknologi yang ramah lingkungan pada beberapa pabrik. Penggantian alat atau teknologi pada satu pabrik akan mengakibatkan proses produksi berhenti untuk sementara waktu. Berhentinya proses produksi untuk sementara waktu tentu akan mengurangi hasil produksi. Dengan berhentinya proses produksi industri sementara waktu akan menyebabkan kerugian besar” (Wawancara pada tanggal 8 April 2014).

Kebutuhan revitalisasi teknologi yang ramah lingkungan sangat diperlukan untuk dalam rangka pengelolaan limbah untuk mendukung program bina lingkungan. PT. Petrokimia Gresik sebagai industri yang memproduksi bahan-bahan kimia tentu memahami dampak apa yang akan ditimbulkan oleh aktivitas industrinya. Berdasarkan wawancara di atas peneliti mendapatkan

informasi bahwa pada PT. Petrokimia Gresik masih belum semua pabrik menggunakan teknologi ramah lingkungan. Hal ini disebabkan karena belum meratanya revitalisasi terhadap teknologi ramah lingkungan. Teknologi terbaru dan ramah lingkungan digunakan untuk pengelolaan limbah industri yang dihasilkan dari aktifitas operasional industri agar tidak merusak fungsi lingkungan hidup di sekitarnya.

C. Pembahasan

1. Akuntabilitas Industri dalam *Sustainable Development* pada PT.

Petrokimia Gresik

a. Program-Program Industri dalam Rangka *Sustainable Development*

Bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dalam rangka *sustainable development* diwujudkan dengan program kemitraan dan bina lingkungan. Program kemitraan adalah program yang menempatkan PT. Petrokimia Gresik sebagai induk pembina untuk menjalin kerjasama dengan usaha kecil menengah sebagai mitra binaannya. Program kemitraan ini sudah mencakup semua bidang yang ada, seperti bidang industri, bidang perdagangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang perkebunan, bidang perikanan dan bidang jasa.

Secara umum program kemitraan terdiri dari beberapa kegiatan utama yaitu bantuan peminjaman modal, pembinaan pendidikan/pelatihan serta media promosi atau pameran. Bantuan peminjaman modal lebih ditujukan kepada usaha kecil menengah yang masih kesulitan memperoleh modal untuk mengembangkan usahanya. Sedangkan untuk pembinaan pendidikan/pelatihan ini bertujuan untuk memberikan motivasi serta ilmu-ilmu baru untuk setiap bidang mitra binaan agar dapat lebih meningkatkan produktifitasnya. Secara implisit telah tertuang di dalam Undang-Undang No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil juga menjelaskan bahwa, “Kemitraan adalah kerja sama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan”.

Penguatan permodalan yang diberikan dalam kerangka program kemitraan bisa diarahkan untuk pencapaian beberapa hal. Dengan adanya penambahan permodalan usaha yang dibantu dengan dana bantuan kemitraan akan terus tumbuh dan berkembang. Setiap perkembangan usaha akan berkonsekuensi pada penambahan jumlah tenaga kerja atau dengan kata lain PT. Petrokimia Gresik secara tidak langsung membantu untuk memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

PT. Petrokimia Gresik mempunyai tanggung jawab terhadap perkembangan masyarakat sekitar. Dalam program bina lingkungan ada beberapa kegiatan yaitu bantuan bencana alam, bantuan pendidikan/pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah, serta bantuan pelestarian alam. Pertanggungjawaban ini akan terus berkembang sejalan dengan eksistensi industri itu sendiri. Program bina lingkungan yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik untuk mendorong pemberdayaan masyarakat sekitar dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan.

Penjabaran program di atas dapat dipahami bahwa adanya kesesuaian antara pelaksanaan program dengan indikator keberhasilan *corporate social responsibility*. Indikator keberhasilan dari pelaksanaan *corporate social responsibility* terpenuhinya tiga dimensi yaitu, dimensi ekonomi, dimensi sosial dan dimensi lingkungan yang lebih dikenal dengan *triple bottom line*, Elkingston dalam Azheri (2008:44). Keberhasilan *corporate social responsibility* dalam dimensi ekonomi misalnya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Industri harus tetap berorientasi mencari keuntungan yang memungkinkan untuk terus beraktifitas dan mengembangkan usahanya. Selain itu, PT. Petrokimia Gresik sebagai salah satu industri besar tentu mempunyai andil bagi pertumbuhan ekonomi khususnya

bagi kabupaten Gresik yaitu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Selain itu, PT. Petrokimia Gresik juga menyerap tenaga kerja atau membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat di kabupaten Gresik dan dengan demikian masyarakat juga akan meningkat kualitas hidupnya. Pemenuhan dimensi sosial terkait dengan cara pemecahan masalah, contohnya peningkatan kesehatan dan peningkatan pendidikan bagi masyarakat sekitar. Indikator keberhasilan *corporate social responsibility* lainnya adalah dimensi lingkungan, pada tataran dimensi ini lebih dikaitkan dengan cara untuk pengelolaan limbah dan upaya dalam pencegahan terhadap polusi. Polusi tersebut terdiri dari polusi udara yang berasal dari kendaraan bermotor dan pabrik-pabrik industri, polusi suara, polusi oleh radiasi, serta polusi air dan tanah akibat detergen, zat kimia dari pabrik, pupuk, dsb, Azheri (2008:62).

Pertanggungjawaban industri yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan apabila dikaitkan dengan teori piramida Carrol (1991:5) termasuk ke dalam tanggung jawab filantropi. Tanggung jawab filantropi dimaksudkan bahwa selain PT. Petrokimia Gresik melaksanakan aktifitas operasional untuk memperoleh laba juga harus didukung dengan upaya mematuhi peraturan hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, PT. Petrokimia Gresik harus bersikap etis atau memperhatikan keadaan sekitarnya dan yang paling penting dari itu semua industri dituntut agar dapat memberi kontribusi yang dapat

dirasakan langsung oleh masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan semua.

b. Sarana dan Prasarana Industri dalam Rangka *Sustainable Development*

Sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor penting yang sangat menunjang pengembangan industri. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup dengan kualitas yang baik sangat dibutuhkan suatu industri untuk melakukan kegiatannya dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Tanpa sarana dan prasarana sangat tidak mungkin tujuan yang diinginkan akan tercapai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:999), “Sarana adalah segala sesuatu (bisa berupa syarat atau upaya) yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud atau tujuan”. Sarana yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah suatu alat yang secara langsung mempengaruhi kegiatan operasional yang dapat mendorong pencapaian target suatu industri yang mendukung upaya akuntabilitas industri. Adapun sarana yang tersedia pada PT. Petrokimia Gresik, sebagai berikut:

- 1) Sarana pengolah limbah industri, meliputi:
 - a) *Gas Scrubber/Dust Collector*;
 - b) *Electrostatic Precipitator*;
 - c) *Cyclonic Separator/Bagian Filter*;
 - d) Kolam untuk *Biological Treatment*;

- e) Kolam untuk *Chemical Treatment*;
 - f) Kolam Penampungan Sementara/*Disposal Area*).
- 2) Sarana penunjang industri, meliputi:
- a) Sarana kerohanian, pendidikan, sosial dan kesehatan yang terdiri dari Masjid Nurul Jannah, Panti Asuhan Nurul Jannah, Taman Pendidikan Al-Qur'an, Taman Kanak-Kanak dan Play Group (TK PIKPG), Sekolah Dasar, Beasiswa *Full Cover*, Rumah Sakit (Petro Graha Medika).
 - b) Kompleks sarana olahraga yang terdiri dari Stadion Tri Dharma, lapangan tenis, gedung olahraga/serbaguna, *fitness center*, *jogging track*, lapangan bola, kolam renang, lapangan golf.
 - c) Koperasi Keluarga Karyawan PT. Petrokimia Gresik yang terdiri dari unit toko, SPBU, apotek, toko bahan bangunan, toko olah raga (K-sport), bengkel & unit bengkel & suku cadang, dan air minum kemasan (air K);
 - d) Perumahan karyawan.

Sedangkan prasarana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002:893) adalah "Segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses (usaha, pembangunan, proyek, dsb)".

Pada PT. Petrokimia Gresik terdapat prasarana yang sudah memadai untuk digunakan menunjang kegiatan dalam upaya akuntabilitas

industri yang meliputi sumur resapan, sumur bor, kebun percobaan dan kartu jaminan kesehatan.

c. Menumbuhkan *Partnership* dalam Rangka *Sustainable Development*

Partnership atau kemitraan adalah salah satu konsep yang sudah banyak dikenal. Dalam *partnership* diharapkan suatu instansi mampu berfungsi sebagai *partner* atau mitra yang mampu berkolaborasi dengan baik terhadap instansi lainnya dalam menjalankan program yang disepakati bersama. Fungsi dari *partnership* adalah mampu mengikutsertakan anggotanya dan mengikutsertakan masyarakat agar dapat berakuntabilitas aktif dalam pembangunan di daerah mereka masing-masing.

Sulistiyani (2004:129), menjelaskan kemitraan adalah merupakan suatu bentuk persekutuan antara dua pihak atau lebih yang membentuk suatu ikatan kerjasama antar dasar kesepakatan dan rasa saling membutuhkan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas di suatu bidang usaha tertentu dan tujuan tertentu. Kemudian, Sulistiyani (2004:129) menjelaskan juga tentang tujuan terjadinya kemitraan adalah untuk mencapai hasil yang lebih baik dengan saling memberikan manfaat antara pihak yang bermitra.

Kemudian Azheri (2008:62) menjelaskan juga, “Kemitraan antara perusahaan dengan masyarakat, khususnya masyarakat lokal. Kemitraan ini diwujudkan secara umum dalam program *community development* untuk membantu peningkatan kesejahteraan umum masyarakat setempat dalam kurun waktu yang cukup panjang. Melalui program ini diharapkan masyarakat akan menerima manfaat keberadaan perusahaan yang digunakan untuk menopang kemandiriannya bahkan setelah perusahaan itu berhenti beroperasi”.

Partnership antara dunia usaha dengan pihak-pihak lain yang terkait harus memiliki hubungan yang saling menguntungkan dan

memperoleh manfaat dari kegiatan *partnership* itu. PT. Petrokimia Gresik memiliki komitmen penuh untuk mendukung program pemerintah dalam pembinaan usaha kecil, pemberdayaan masyarakat dan lingkungan hidup sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan. Demi terciptanya komitmen tersebut, PT. Petrokimia Gresik melakukan *partnership* dengan pihak-pihak lain yang terkait dengan program-program yang telah dibuat. Bentuk *partnership* PT. Petrokimia Gresik yang dilakukan dengan beberapa pihak lain, yaitu:

- 1) *Partnership* dengan Badan Lingkungan Hidup kabupaten Gresik dan Propinsi Jawa Timur;
- 2) *Partnership* dengan beberapa Dinas/Instansi Pemerintah Daerah kabupaten Gresik;
- 3) *Partnership* dengan Rumah Sakit (PT. Petro Graha Medika).

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Akuntabilitas Industri dalam *Sustainable Development* pada PT. Petrokimia Gresik

a. Faktor Pendukung

1) Partisipasi Masyarakat Sekitar Industri

Pertumbuhan industri dapat terus berkembang apabila ada penerimaan dari masyarakat dimana industri itu beroperasi. Begitu pula sebaliknya, berkembangnya industri diharapkan mampu memecahkan isu-isu masalah yang terjadi di masyarakat dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekitar.

Masyarakat merupakan salah satu objek penting dari pertanggungjawaban yang diwujudkan dalam program kemitraan dan bina lingkungan oleh PT. Petrokimia Gresik.

Dari pernyataan diatas dapat dianalisa bahwa program kemitraan dan bina lingkungan yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik dianggap mampu memecahkan masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan adanya penerimaan dari masyarakat yang berarti tidak adanya tuntutan secara berlebih. Dengan demikian hal ini bisa dijadikan indikator keberhasilan program *corporate social responsibility* yang menjelaskan bahwa program kemitraan dan bina lingkungan telah terealisasi dengan baik. Antusiasme masyarakat terhadap program kemitraan dan bina lingkungan merupakan salah satu modal penting yang bisa menjadikan masyarakat termotivasi untuk lebih meningkatkan kualitas hidupnya dengan memanfaatkan sebaik mungkin bantuan-bantuan yang telah disalurkan oleh PT. Petrokimia Gresik sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara merata, konsisten dan terencana secara tidak langsung akan meningkatkan *image/citra* industri. *Image* yang baik dari masyarakat tentunya akan berdampak baik pula terhadap aktifitas operasional PT. Petrokimia Gresik dalam pembangunan berkelanjutan.

2) Tersedianya Dana

Pada penyajian data telah dijelaskan secara rinci bahwa alokasi dana peminjaman modal untuk usaha kecil diambil dari program kemitraan lebih difokuskan kepada bidang pertanian dan perkebunan. Hal ini karena keberadaan PT. Petrokimia Gresik untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan produksi pertanian dengan tujuan utama adalah program swasembada beras dan swasembada pangan. Terkait dengan program pemerintah tersebut PT. Petrokimia Gresik melakukan pembinaan kepada kelompok tani yang membudidayakan tanaman padi dengan memberikan alokasi dana yang lebih besar untuk pengolahan tanah, pemupukan dan pengadaan benih serta memberikan bantuan alat pendukung untuk proses usahanya. Dana tersebut sangat berarti untuk memberikan kesempatan pada petani untuk melakukan budidaya padi dengan baik.

Berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER/05/MBU/2007, tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan, sumber dana untuk pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan berasal dari laba perusahaan maksimal 2% (dua persen). Adapun jumlah dana yang digunakan PT. Petrokimia Gresik untuk melaksanakan program kemitraan dan bina lingkungan pada tahun 2013 sebagai berikut:

- a) Dana program kemitraan pada tahun 2013 sebesar Rp. 15.028.496.448,-
- b) Dana program bina lingkungan pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.298.811.966,-

Terkait penggunaan dana untuk program kemitraan sebesar Rp. 15.028.496.448 digunakan untuk mendukung program pemerintah tentang swasembada beras dan swasembada pangan.

PT. Petrokimia Gresik mengeluarkan dana yang demikian besar merupakan bentuk upaya yang secara konsisten mendukung program pemerintah tersebut walaupun kenyataannya program swasembada beras dan pangan masih belum berhasil dilakukan.

PT. Petrokimia Gresik harus sepenuhnya melakukan pendampingan dan pembinaan secara mendalam agar para petani dapat mengetahui cara untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan perkebunan yang selama ini masih dianggap kurang. Hal tersebut akan memberikan motivasi besar kepada para petani dan bisa dijadikan modal untuk keberhasilan program swasembada beras dan swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Keberhasilan PT. Petrokimia Gresik untuk mewujudkan program pemerintah tentang swasembada beras dan pangan akan menghilangkan spekulasi yang mungkin bisa saja berkembang karena tidak adanya hasil yang tercapai dengan mengeluarkan dana yang begitu besar.

3) Adanya Regulasi

Pelaksanaan program kemitraan dan bina lingkungan dilandasi dengan landasan hukum yang berlaku saat ini. Sebagai dasar dalam pelaksanaan kegiatan program kemitraan dan bina lingkungan di PT. Petrokimia Gresik adalah Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER/05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Selain itu, ditunjang dengan adanya regulasi lain seperti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Undang-Undang No. 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Berbagai ketentuan yang sebagaimana telah disebutkan di atas, landasan hukum tersebut digunakan PT. Petrokimia Gresik sebagai pijakan agar pelaksanaan akuntabilitas industri dapat berjalan sebagaimana mestinya dan dapat diperoleh manfaat serta hasil yang maksimal dalam pelaksanaannya.

b. Faktor Penghambat

1) Keterbatasan Lahan

Dalam era persaingan global saat ini, dibutuhkan peningkatan daya saing dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan. Peningkatan daya saing sangat diperlukan oleh industri guna mendukung kebijakan pembangunan nasional. Pembangunan industri merupakan salah satu cara untuk meningkatkan daya saing. Tentu pembangunan industri harus disertai dengan kaidah yang mengedepankan aspek lingkungan guna menjaga dan melestarikan fungsi dari lingkungan hidup. Hal yang paling penting dan mendasar dalam pembangunan industri adalah bagaimana agar proses industri dapat berjalan secara berkelanjutan tanpa merusak dan/atau mengganggu fungsi dari lingkungan hidup di sekitarnya dengan cara pengelolaan lingkungan hidup.

Adapun pengelolaan lingkungan hidup menurut Supardi (2003:171) adalah melalui strategi pengelolaan lahan. Pengolahan lahan disini yang dimaksud pengelolaan lahan industri. Strategi pengelolaan lahan meliputi:

1. Memperoleh hasil atau produksi maksimum dari setiap unit lahan;
2. Memilih tata cara pengelolaan lahan yang memberi keuntungan maksimum;
3. Menekan sekecil mungkin ketidakmampuan kondisi lahan potensial sehingga dapat meningkatkan hasil maksimum;
4. Mencegah menurunnya potensi lahan potensial.

Penggunaan lahan harus sesuai dengan daya dukung lingkungan karena lahan memiliki keterbatasan. Bentuk penggunaan lahan salah satunya disebabkan oleh aktivitas pembangunan industri. Keberadaan industri di suatu tempat bergantung pada faktor lingkungan yang akan menentukan keberlangsungan proses industri. Penggunaan lahan yang diakibatkan oleh aktivitas industri harus didasari juga dengan pemanfaatan lahan untuk ruang hijau. Ruang hijau sebagai komponen yang tingkat ketersediannya baik secara kualitas maupun kuantitas harus selalu diperhitungkan dalam proses pembangunan industri agar tercipta suatu kawasan industri berwawasan lingkungan. Kawasan industri berwawasan lingkungan merupakan sekumpulan industri (penghasil produk/jasa) yang berlokasi pada suatu tempat dimana para pelaku-pelaku di dalamnya secara bersama mencoba meningkatkan performansi lingkungan, ekonomi dan sosialnya, Djajadiningrat (2004:80).

Berdasarkan pernyataan di atas, analisa yang dapat diangkat adalah pentingnya ruang hijau di tengah-tengah industri PT. Petrokimia Gresik. Dimensi lingkungan merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban industri untuk peduli terhadap lingkungan hidup. Lahan hijau seharusnya dipahami sebagai sebuah ekosistem, tidak hanya sebagai tempat berdirinya pabrik

untuk proses produksi. Mendesain ruang hijau harus diterapkan agar tetap menjaga kesinambungan ekosistemnya dan menyeimbangkan antara lingkungan dengan industri.

2) Kurangnya Pemerataan Revitalisasi Teknologi

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan pembangunan industri yaitu kurangnya pemerataan revitalisasi teknologi. Kebutuhan teknologi yang ramah lingkungan sangat diperlukan kaitannya dengan tanggung jawab perusahaan terhadap aspek lingkungan. Dengan teknologi berbasis *environmental sustainability* yang semakin lama semakin dicari, sebuah industri yang *sustainable* sudah sewajarnya memanfaatkannya.

Djajadiningrat (2004:81), menjelaskan bahwa industri yang dikembangkan haruslah:

1. Sebuah jaringan-jaringan hasil samping (*by-Product*) saja;
2. Sebuah daur ulang klaster bisnis (*recycling business cluster*);
3. Sebuah kumpulan perusahaan-perusahaan yang memiliki teknologi ramah lingkungan;
4. Sebuah kumpulan perusahaan yang membuat suatu produk hijau (*green products*);
5. Sebuah kawasan industri yang hanya menerapkan hanya satu tema yang berhubungan dengan lingkungan, seperti kawasan industri yang merupakan kumpulan perusahaan yang memanfaatkan tenaga matahari, dll;
6. Sebuah kawasan industri yang memiliki infrastruktur-infrastruktur yang ramah lingkungan.

Penggunaan teknologi ramah lingkungan jauh akan lebih bermanfaat apabila diterapkan secara menyeluruh dalam proses produksi industri. Penggunaan teknologi ramah lingkungan di

suatu industri merupakan sebagai pendekatan yang meletakkan aspek ekologi sebagai fokus utama dalam pembangunan berkelanjutan. Djajadiningrat (2004:82) menjelaskan tentang manfaat suatu industri menerapkan teknologi ramah lingkungan, sebagai berikut:

1. Manfaat bagi Industri.
Bagi industri-industri atau perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya, akan memberikan kesempatan bagi anggotanya untuk mengurangi biaya-biaya produksi melalui efisiensi terhadap material dan energi, daur ulang sampah/limbah industri dan meminimalisasi biaya-biaya tambahan yang mungkin timbul karena denda yang berhubungan dengan aturan-aturan pemerintah terhadap pelanggaran perusakan lingkungan dan aktivitas produksi yang dilakukan.
2. Manfaat bagi Lingkungan.
Mengurangi banyak sumber-sumber polusi, limbah dan sampah, juga mengurangi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Dari sisi perusahaan-perusahaan penerapan konsep ini akan mengurangi beban mereka terhadap tuntutan ramah lingkungan melalui pendekatan-pendekatan yang lebih inovatif bagi penerapan produksi bersih, diantaranya termasuk usaha-usaha dalam pengendalian polusi, efisiensi energi, manajemen limbah, pemulihan sumber daya alam, dan teknik dan metode-metode lain bagi penerapan konsep manajemen lingkungan.
3. Manfaat bagi Komunitas/Masyarakat
Dengan meningkatnya performansi perusahaan-perusahaan akan menjadikan suatu kekuatan alat pembangunan ekonomi suatu masyarakat. Seperti halnya kawasan-kawasan industri lain, maka ini akan memberikan kesempatan usaha-usaha baru, diantaranya adalah usaha-usaha penyelenggaraan fasilitas untuk mewujudkan industri-industri bersih. Perusahaan-perusahaan pada regional yang bersangkutan akan memperoleh klien baru, baik dari sisi jasa maupun pembeli produk-produk mereka dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru dalam kawasan tersebut. Berkembangnya konsep ini akan menciptakan program-program baru bagi kemajuan ekonomi regional bersangkutan dan juga memperoleh keuntungan lingkungan dari kemajuan yang diperoleh dari sektor industri mereka, diantaranya

masyarakat di sekitarnya akan memperoleh udara, air dan tanah yang lebih bersih, berkurangnya sampah dalam jumlah besar, dan keuntungan-keuntungan lingkungan lainnya.

Jika dianalisa dengan teori di atas, maka untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan indikator pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* maka dimensi lingkungan harus menjadi fokus dalam aktifitas operasional industri. Pemenuhan dimensi lingkungan adalah pengelolaan limbah dalam mengurangi polusi. Terkait akan hal itu diperlukan penggunaan teknologi ramah lingkungan pada PT. Petrokimia Gresik. Belum ratanya revitalisasi teknologi ramah lingkungan harus diperhatikan oleh seluruh *stakeholders* yang berkepentingan di dalamnya. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* terhadap dimensi lingkungan akan mampu memberikan dampak baik terhadap masyarakat sekitar dengan menekan dampak negatif semua bentuk buangan limbah terhadap lingkungan hidup.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis tentang Akuntabilitas Industri dalam *Sustainable Development* pada PT. Petrokimia Gresik, maka dapat dikemukakan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Akuntabilitas industri dalam *sustainable development* pada PT. Petrokimia Gresik dilandasi dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER 05/MBU/2007 yang diwujudkan dalam program kemitraan dan bina lingkungan. Program-program tersebut berpedoman pada konsep *triple bottom line*, yaitu dengan melihat dimensi ekonomi sosial dan lingkungan sebagai fokus utama. Terpenuhinya dimensi ekonomi sosial dan lingkungan merupakan indikator keberhasilan *corporate social responsibility* dalam mendukung pembangunan berkelanjutan. Hal tersebut dibuktikan dengan kondisi perekonomian yang terus berkembang, kualitas hidup masyarakat yang meningkat serta kondisi lingkungan hidup yang tetap terjaga. Apabila dikaitkan dengan teori piramida tingkatan *corporate social responsibility* menurut Archie B. Carrol, *corporate social responsibility* yang dilakukan oleh PT. Petrokimia Gresik termasuk pada tingkatan tanggung jawab filantropi yang artinya industri memberikan kontribusi yang dapat dirasakan

langsung oleh masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup.

2. Program kemitraan adalah kegiatan peminjaman modal dan pembinaan yang menempatkan PT. Petrokimia Gresik sebagai induk pembina terhadap usaha kecil pada sektor industri, perdagangan, pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan dan jasa. Program bina lingkungan adalah kegiatan pemberdayaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup. Bantuan yang diberikan meliputi bantuan bencana alam, bantuan pendidikan dan/atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan pengembangan sarana dan prasarana umum, bantuan sarana ibadah serta bantuan pelestarian alam.
3. Pelaksanaan akuntabilitas industri dalam *sustainable development* ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai. Selain itu, PT. Petrokimia Gresik juga menjalin *partnership* dengan instansi pemerintahan yang bertujuan agar program kemitraan dan bina lingkungan dapat dilakukan secara efektif.
4. Masyarakat merupakan salah satu fokus utama dalam pertanggungjawaban yang dilakukan PT. Petrokimia Gresik. Antusiasme masyarakat terhadap program kemitraan dan bina lingkungan merupakan salah satu indikator keberhasilan implementasi *Corporate Social Responsibility* dan sebagai modal penting yang bisa menjadikan masyarakat termotivasi untuk lebih

meningkatkan kualitas hidup dengan memanfaatkan bentuk bantuan yang disalurkan oleh PT. Petrokimia Gresik.

5. Dana program kemitraan pada tahun 2013 sebesar Rp. 15.028.496.448. Dana tersebut lebih banyak disalurkan pada bidang pertanian dan perkebunan karena untuk mendukung program swasembada beras dan swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah. Dana bina lingkungan pada tahun 2013 sebesar Rp. 4.298.811.966. Dana bina lingkungan disalurkan untuk seluruh program bantuan sosial yang telah disesuaikan dengan kebutuhan.
6. Masalah yang terjadi dalam pengembangan industri pada PT. Petrokimia Gresik adalah keterbatasan lahan dan kurangnya pemerataan revitalisasi teknologi.

B. Rekomendasi

1. PT. Petrokimia Gresik harus tetap meningkatkan upaya akuntabilitas industri yang diimplementasikan dalam praktek *Corporate Social Responsibility*, walaupun tanggung jawab yang dilakukan sudah termasuk pada tingkatan tanggung jawab filantropi tetapi penekanan terhadap nilai-nilai kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan hidup harus selalu menjadi fokus utama seiring dengan eksistensi industri. Penekanan nilai-nilai tersebut nantinya akan mendukung pembangunan berkelanjutan.

2. Sebagai industri milik negara (BUMN), PT. Petrokimia Gresik seharusnya bisa lebih dalam untuk mendukung sepenuhnya program swasembada beras dan swasembada pangan yang dicanangkan oleh pemerintah agar program pemerintah tersebut bisa diwujudkan karena dengan melihat dana untuk program kemitraan yang sebagian besar disalurkan kepada bidang pertanian dan perkebunan bisa saja menimbulkan spekulasi buruk seperti misalnya adanya korupsi atau adanya motif bisnis dibalik pelaksanaan *corporate social responsibility*.
3. PT. Petrokimia sebagai industri yang memproduksi bahan-bahan kimia dalam aktifitas operasionalnya diharapkan lebih fokus dalam melaksanakan tanggung jawab terhadap aspek lingkungan. Seperti halnya pengembangan industri harus lebih memperhatikan tata ruang hijau dan penggunaan teknologi ramah lingkungan. Hal ini kemudian harus ditekankan pada peraturan daerah serta ketegasan pemerintah kabupaten Gresik. Peran pemerintah kabupaten Gresik melalui dinas/instansi terkait sangat dibutuhkan sebagai evaluator dalam pelaksanaan akuntabilitas industri dalam *sustainable development* agar kelestarian lingkungan hidup tetap terjaga
4. PT. Petrokimia Gresik diharapkan menjalin kerjasama dengan media untuk mempublikasikan semua kegiatan *corporate social responsibility* agar masyarakat luas dapat mengetahui bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan.